

Editor : Anzizhan & Syafaruddin

# Al-Ittihadiyah

## Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa

Takbir Akbar  
&  
Silaturahmi  
Nasional  
1427 H/2006 M

Sambutan :

H. Bachtiar Chamsah, SE  
Brigjen. TNI (Purn) Drs. H. A. Nazri Adlani  
Mayjen TNI (Purn) H. Achdari, SIP

Prof. Dr. Hj. Djanius Djamin, SH. MS - Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA - Prof. Dr. Dede Rosyada, MA  
H. M. Ali Umri, SH, MKn - Prof. Dr. Armai Arief, MA  
Dr. Al Rasyidin, M.Ag



Menjalin  
Menjalin Kebersamaan  
Membangun Bangsa

RECEIVED 1 OF April 2009  
No. 1412 / 2009  
JASH

Hijri Pustaka Utama  
Jakarta, 2006



Anzizhan & Syafaruddin (Ed.)

PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS TARBIYAH  
IAIN-SU

Al-Ittihadiyah

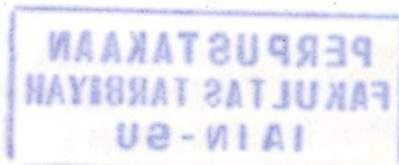
---

# Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa

---

TGL. TERIMA : 01 April 2009  
No. INDUK : 416 / 2009  
ASAL :

Hijri Pustaka Utama  
Jakarta, 2006



---

**AL-ITTIHADIIYAH**  
(Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa)

---

**Editor**  
Anzizhan & Syafaruddin

---

**Setting layout**  
Tim Pracetak Hijri

---

**Desain Cover**  
Auliart & Desain Grafis (ADG)

---

**Penerbit**  
Hijri Pustaka Utama  
Jl. Aria Putra No.101 Komplek Bank Duta  
Kedaung, Ciputat, Jakarta  
E-mail: hijri@gmail.com

---

Cetakan pertama : Oktober 2006

---

ISBN 979-25-9554-6

---

© All Right Reserved

---

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini ke dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

## DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR ..... 7

### SAMBUTAN :

Menteri Sosial Republik Indonesia  
H. Bachtiar Chamsah, SE ..... 17

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah  
Brigjen TNI (Purn) Drs. H. A. Nazri Adlani ..... 19

Ketua Pelaksana Takbir Akbar Nasional 2006  
Mayjen TNI (Purn) H. Achdari, SIP ..... 26

### SELAYANG PANDANG KIPRAH AL-ITTIHADIIYAH

Oleh Prof. Dr. Hj. Djanius Djamin, SH., MS ..... 35

### REVITALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LORONG GLOBAL DAN ERA OTONOMI

Oleh : Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. .... 47

### POLA PELAKSANAAN TAKBIR HARI RAYA BAGI UMAT ISLAM

Oleh: Prof. Dr. Dede Rosyada, MA..... 67

### REFORMULASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Oleh: Prof. Dr. Armai Arief, MA ..... 87



**NILAI ETIK DALAM MASYARAKAT MADANI**

(Tauhid Sebagai Prinsip Etik)

Oleh : H. M. Ali Umri, SH, MKn. .... 103

**KONTRIBUSI PESANTREN DALAM**

**KONSTRUKSI BUDAYA BANGSA**

Oleh: DR. Bedjo Sujanto, M.Pd ..... 125

**VISI AL-ITTIHADIAH MASA DEPAN**

(Mengubah wajah ormas Islam menjadi berkeunggulan)

Oleh : Drs. Anzizhan, MM ..... 143

**PENDIDIKAN BERBASIS UKHUWAH**

Oleh: Drs. Syafaruddin, M.Pd. .... 163

**DINAMIKA HISTORIS AL-ITTIHADIAH**

Réfleksi Ormas Islam di Tanah Kelahiran

Oleh: Dr. Al Rasyidin, M.Ag ..... 179

**PENGANTAR EDITOR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**P**uji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Buku ini berjudul: “*Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan, Membangun Bangsa*”, diketengahkan untuk memberi respon terhadap perkembangan kontemporer kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif Ormas Islam.

Ormas Islam menjadi bahagian dari kesejarahan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jejak langkah Ormas Islam sejak awal turut memberi warna bagi proses konstruksi budaya bangsa. Kehadiran Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, PERSIS, Jamiat Khair, Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah dan Ormas lainnya telah memberi makna sejak dari era kebangkitan nasional, masa perjuangan kemerdekaan, masa pembangunan dan fase reformasi bangsa menuju masyarakat madani. Tidak ada yang meragukan besarnya peran umat pada masa masa tersebut. Era reformasi yang telah berlangsung sejak 1998, mempunyai sejarah tersendiri dalam perjalanan peran ormas Islam. Semuanya fokus meraih tujuan perwujudan masyarakat madani, masyarakat sipil untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, adil, dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



Komitmen umat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang bhineka tunggal ika merupakan suatu kepastian kehendak Ilahi. Tidak ada yang menolak fakta sejarah betapa tujuan nasional yang diperjuangkan sejak masa kemerdekaan adalah memenuhi aspirasi semua kelompok, golongan, etnis, dan agama. Tentu saja dalam mencapai cita-cita bangsa itu ada dinamikanya. Sebagai suatu perjuangan dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Semua perlu diyakini sebagai rahmat dan ujian bagi bangsa.

Belakangan ini berbagai perpecahan muncul. Simpul tali ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air mulai lapuk. Orang mudah curiga. Persoalan sepele saja sekarang ini sudah bisa memicu pertarungan. Ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam. Tetapi merambah ke semua lapisan masyarakat. Baik di ruang legislatif, pada sidang-sidang pengadilan, di lingkungan partai politik bahkan di batang tubuh ormas Islam sendiri. Tidak jarang ormas Islam yang memiliki dua kepengurusan. Bahkan yang sangat memprihatinkan ada pula gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlangsung sedemikian rupa. Harus ada upaya bersama ormas Islam dan pemerintah untuk menelaah apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan. Selama ini alasan alasan sepihak dan cenderung bias atau sekedar bela diri dan bela institusi selalu dikumandangkan. Tetapi berbagai peristiwa buruk tetap saja terjadi. Kenapa ormas Islam dan pemerintah? Karena umat Islam yang jumlah penduduknya terbesar. Konsekwensi logisnya ia juga yang harus paling bertanggung jawab. Sedangkan pemerintah adalah orang yang diberi amanah mengelola bangsa dan

negara ini oleh umat secara langsung. Persoalannya adalah pernahkan ormas Islam secara terencana dengan bahasa yang elok menawarkan solusi? Atau sebaliknya pemerintah ngajak pimpinan ormas berdiskusi dari hati ke hati?

Tidak semua memang. Sebagian kecil persoalan kebangsaan itulah yang hendak dinukilkan dalam buku ini. Sebagai persembahan Al-Ittihadiyah untuk nusa dan bangsa tercinta. Kita memiliki pesantren terbanyak dan terbesar di dunia, punya sekolah dan madrasah yang juga luar biasa banyaknya. Tetapi akhlak bangsa kita yang umat Islamnya terbesar di dunia ini kupak dan rusak. Manajemen pendidikan kita berkiblat ke barat. Padahal manajemen pesantren yang membentuk karakter dan akhlak terpuji terabaikan. Lebih baik yang manakah pengelolaan pesantren yang memiliki pemimpin kharismatik yang dihormati dan melahirkan santri santri dengan prilaku terpuji, tetapi disebut otoriter oleh sebagian kalangan. Atau pendidikan umum yang katanya demokratis tetapi memproduksi manusia manusia berakhlak buruk. Kita tidak hendak mempertentangkan itu. Tetapi mengabaikan peran pesantren dan ormas Islam dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan kesalahan.

### Umat Tengah (*Ummatan Washatan*)

Bagaimana cara elegan yang bisa ditempuh dalam upaya perbaikan umat ke depan? Umat Islam merupakan bagian dari sejarah kemanusiaan. Sebagai penganut agama samawi. Tentu saja umat Islam dalam realitas sosial berpedoman kepada keyakinan Islam sesuai dengan wahyu Allah. Menurut Kuntowijoyo (1991:337) Islam sangat berkepentingan pada



realitas sosialnya bukan hanya untuk dipahami tetapi juga untuk diubah dan dikendalikan. Tidaklah Islami, jika umat Islam bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi struktural masyarakatnya. Sementara kondisi yang ada bersifat munkar (penuh kejahatan). Transformasi Islam terletak pada konsep amar ma'ruf dan nahi munkar.

Umat Islam disebutkan al-qur'an sebagai *ummatan washatan* atau moderasi dalam proses pencapaian kebenaran. Dalam surat al-Baqarah ayat 143 dijelaskan: "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...* (QS.2:143).

Dari ayat tersebut dipahami bahwa cara terbaik adalah dengan menegakkan keadilan. Keadilan untuk semuanya. Kesadaran akan perbedaan perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan umat melalui sikap tenggang rasa, saling menghargai, penuh pengertian, dan bersikap adil (moderat) dalam menyikapi perbedaan dan perselisihan, agar perbedaan dan perselisihan tidak menimbulkan perpecahan tapi justru akan memperkuat persaudaraan, persatuan dan kebersamaan sebagai umat yang satu (*wahidah*) (QS.21:92)".

Pada mulanya, kata *wasath* menurut Shihab (328) berarti segala yang baik sesuai dengan obyeknya. Sesuatu yang baik biasanya berada pada posisi di antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan sikap ceroboh, dan takut, kedermawanan adalah pertengahan antara sikap boros dan kikir. Kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan karena dorongan nafsu yang menggebu dan impotensi. Dari sini, kata *wasath* berkembang maknanya menjadi tengah. Menghadapi

dua pihak yang berseteru dituntut untuk menjadi washit (dan orang yang berada pada posisi tengah diharapkan agar berlaku adil. Dari sini lahirlah makna ketiga *washat* yaitu adil. Ummatan washatan adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dari segenap penjuru".

Deklarasi Makkah mencerminkan pernyataan tentang kepercayaan kaum muslimin tentang dasar-dasar abadi kemerdekaan, kemuliaan diri, persaudaraan, toleransi, kasih sayang dan perjuangan terus menerus melawan ketidakadilan dan agresi. Umat Islam harus melahirkan budaya madani yang religius Islami dengan penuh gairah dan optimis menyongsong modernisasi dengan penuh ketekunan menyerap perkembangan ilmu dan teknologi (Simuh, 2000:136). Cita umat tengah dan terbaik mengupayakan agar umat Islam menjadi pelopor bagi perubahan, tidak hanya terkonsentrasi pada dakwah amar ma'ruf semata, tetapi juga melaksanakan nahi munkar dengan aksi yang bersifat kultural. Jadi keadilan, kejujuran, saling menghargai perbedaan, dan keberagaman mewarnai perilaku masyarakat madani dalam membangun bangsa di Indonesia.

## Idul Fitri

Ajakan untuk sadar dan kembali kepada fithrah kemanusiaan sungguh sangat indah digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Abasa. Dikisahkan pada saat nabi besar Muhammad SAW menerima tamu dari masyarakat Quraisy. Suku terhormat pada masa itu, tiba tiba datang Ummu Maktum merupakan suatu ajaran yang sangat fundamental



sekali dalam hubungan seorang budak buta yang hendaknya menyampaikan masalahnya kepada Rasulullah. Lalu nabi berpaling dan bermacam muka. Langsung turun peringatan melalui wahyu Allah. Abasa watawalla.

Alangkah manusiawinya seorang Muhammad yang kalau bukanlah karena bimbingan Allah secara langsung ia juga hampir dan cenderung berbuat salah. Sama halnya dengan manusia lainnya. Tetapi alangkah naifnya kita sebagai manusia biasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa cenderung berbuat salah itu adalah manusiawi. Kadang dalam keseharian kita dalam hidup berbangsa dan bernegara cenderung menempatkan seorang pemimpin ormas atau pemimpin negara melebihi kapasitasnya sebagai manusia biasa. Kesadaran akan alasan itulah yang harus mendasari permintaan maaf dan kemaafan yang diberikan kepada orang. Bahwa manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ia miliki ia cenderung berbuat salah. Hal ini disebabkan kelengkapan instrumen yang ia miliki.

Idul afitri adalah momentum penting untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Seluruh kesalahan yang dilakukan terhadap sesama manusia, kemudian dilebur di dalam napas lebaran ini. Ungkapan "*minal 'aidin wal faizin*" dimaknai maaf lahir dan bathin.

Hak Allah adalah tempat kita meminta ampun atas dosa dan kesalahan kita kepadaNya. Sedangkan hak makhluk manusia adalah meminta maaf kepada yang lain atas kekhilafan yang mungkin terjadi di antara sesama".

Padalah secara kontekstual, kalimat tersebut sebenarnya merupakan rangkaian "*Ja'alnakum waiyyakum minal 'aidin wal faizin*" (semoga Allah berkenan memperbaiki diri kita

semua kepada fitrah kesucian kita sehingga kita meraih atau menjadi orang-orang yang menang". Sedangkan Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian". Kembali kepada fitrah sebagaimana keadaan kita saat baru lahir. Idul fitri adalah menjadi penyangga kekuatan emosi kebersamaan dan kemanusiaan universal. Terutama setelah berbulan, bertahun-tahun tidak berjumpa, maka momentum idul fitri dapat saling bercerita tanpa beban, tukar pikiran, memaafkan dan memperkuat silaturahmi".

Zakat fitrah- amalan puasa tergantung di awang-awang, sebelum dibayarkan zakat fitrahNya. Kedamaian hati untuk sesama dan berkelanjutan harus ditumbuhkan dalam memberdayakan kaum *mustadh'afin*. Zakat sebagai pembersihan jiwa dan harta, memberikan dampak sosial bagi kohesivitas masyarakat yang penuh keragaman. Islam menawarkan sikap lemah lembut dan kelembutannya yang menyejukkan hati serta menjadi rahmat bagi sekalian alam (QS.3;159; QS.3; 3;134)

Memaafkan kesalahan orang lain adalah bahagian dari perbuatan baik yang disukai oleh Allah, karena perbuatan demikian akan menumbuhkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Bahkan masyarakat merasa tidak dididik dalam suasana dendam dan permusuhan, melainkan rasa saling memaafkan, saling menolong dan mendukung untuk kebaikan (Hidayat, et al, 2001:265).

## Agenda Umat Islam

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Karena itu, tanggung jawab terbesar dalam memper-



tahankan kemerdekaan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada kiprah umat Islam. Menurut Kuntowijoyo (2001:137), umat Islam adalah mereka yang lebih dari segalanya merasa menjadi bagian dari komunitas Islam". Dalam perspektif transiofmasi sosial, seperti halnya gagasan membangun menjalankan tanggung jawab sosial, sejarah, kerisalahan dan keumatan. Patut dicermati gagasan Kuntowijoyo, mengenai agenda umat Islam ke depan, yaitu:

- 1) perubahan sistem pengetahuan, supaya Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin*, . Mengubah cara berpikir gerakan Islam (hakikat pergerakan) dari etika idealistik kepada etika profetik. Sama konsepnya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu; liberalisasi, humanisasi dan transendensi). Aktualisasi Islam dari egosentrisme kepada objektivikasi.
- 2) Mobilitas sosial, supaya umat Islam selalau menjadi pelopor, dan
- 3) Mobilitas budaya, supaya umat islam menampilkan Islam sebagai agama masa depan" (Kuntowijoyo, 2001:137).

Pendapat di atas sejalan dengan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti perwujudan umat terbaik (*khaira ummah*), dan umat pertengahan/egaliter dan berkeadilan) atau *ummatan washatan*. Perilaku umat Islam idealnya mencerminkan akhlakul karimah sebagai buah dari keyakinan tauhid. Menurut Kuntowijoyo (2001:293), akhlakul karimah dapat berarti moralitas personal, moralitas publik atau moralitas politik.

Al-Ittihadiyah mencoba dalam momentum Takbir Akbar Nasional, meluncurkan buku ini sehingga memberikan

pencerahan psikologis dan spiritual dalam mempercepat pembangunan yang cerdas dan mensejahterakan rakyat. Setidaknya, kehadiran Ormas Islam dalam berbagai kiprah pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi merupakan bukti betapa tanggung jawab umat mewujudkan masyarakat madani yang religius membingkai seluruh corak aktivitasnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal usaha kita . Amin ya Robbal 'alamin. []

#### Daftar Pustaka :

- Hidayat, Komaruddin, et al, *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.

## **SAMBUTAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

Oleh: H. Bachtiar Chamsah, SE

**S**embari merendahkan diri dihadapan kebesaran dan keagungan Allah SWT. rasanya tidak ada cara yang lebih pantas dan tepat untuk melukiskan rasa suka cita dan bangga atas penyelenggaraan Takbir Akbar Nasional dan penerbitan buku "Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa", selain memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Besar harapan umat terhadap suksesnya pelaksanaan Takbir Akbar dan Sillaturahim tahun ini. Karena suasana prikehidupan berbangsa dan bernegara kita tengah mengalami cobaan dan ujian. Doa dan harapan kita untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara yang dikumandangkan pada malam takbir mudah-mudahan didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin.

Kami menyambut baik prakarsa DPP Al-Ittihadiyah yang pada pelaksanaan takbir akbar nasional kali ini meluncurkan buku sebagaimana judul di atas. Karena tradisi peluncuran buku pada acara takbiran merupakan suatu langkah maju yang harus kita dukung terutama berkaitan dengan peningkatan minat baca bangsa sebagai proses menuju pencerdayaan kehidupan bangsa. Karena itu adalah amanah pendiri republik tercinta. Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan



terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Ormas Islam Tingkat Pusat yang telah mendukung pelaksanaan takbir akbar dan sillaturrahim nasional kali ini yang diprakarsai oleh DPP Al-Ittihadiyah.

Izinkan saya pada kesempatan ini menghimbau kaum muslimin dan muslimat diseluruh penjuru tanah air. Mari kita kembali kepada citra diri kita sebagai bangsa yang teligius agar kita mampu saling memaafkan dengan tulus. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran dan menyampaikannya dengan cara yang baik. Silih bergantinya peringatan dan cobaan yang kita alami sebagai bangsa, kita jadikan pelajaran untuk meniti kehidupan yang lebih baik menuju cita bersama kita negara dan bangsa yang aman, sejahtera dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Jakarta, 9 Oktober 2006

H. Bachtiar Chamsah, SE  
Menteri Sosial R.I.

## **SAMBUtan KETUA UMUM DPP AL-ITTIHADiyAH PADA TAKBIR AKBAR NASIONAL 2006**

Oleh: Drs. H. A. Nazri Adlani

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

*Allahu akbar, allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.*

Hadirin yang berbahagia.

Pada malam ini, kita kembali kepada fitrah kedirian dan jati diri kita sebagai hamba Allah yang lemah di hadapan keagungan dan kebesaran Penciptanya.

Hari ini silih berganti hampir di seluruh wilayah bumi pertiwi, asma Allah kita agungkan. Dengan takbir, tahmid dan tasbih, mari kita bangkitkan rasa kebersamaan, persaudaraan sebangsa dan se tanah air. Kita semai kembali rasa cinta kepada negeri. Keindahan ukhuwah yang pernah terjalin kuat di antara sesama kita rajut kembali dalam simpul sillaturahmi.

Allahu akbar, pada hari ini tidak ada lagi perbedaan antara yang dipimpin dengan yang memimpin, semua sama dihadapan Allah. Kita semua hamba Allah yang tidak maksum dari dosa dan kesalahan. Kami yakin hanya dengan landasan keimanan yang kuatlah kita dapat membangun bangsa yang besar ini.



Cukuplah sudah berbagai bencana, ujian dan cobaan yang kita lalui menjadi iktibar dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam menempuh dan meraih masa depan bangsa.

*Allahu akbar walillahil hamd*

Sudah seharusnya kita persembahkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT. Atas izin dan ridha-Nya pada hari ini kita bersama-sama mengagungkan asma Allah. Secara bersama sama kita bertakbir di tempat ini yang insyaallah juga diikuti oleh jutaan saudara saudara kita di seluruh penjuru tanah air.

Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT selaku pemrakarsa takbir akbar yang diamanahkan umat melalui MUI dan ormas ormas Islam pada tempatnyalah mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah ikut serta mensukseskan pelaksanaan berbagai kegiatan mensyiarkan nilai-nilai ke islamian melalui takbir akbar nasional yang malam ini kita rayakan sebagai kemenangan kita melawan hawa nafsu.

Sebulan lamanya pelatihan jasmaniah dan rohaniah telah kita lalui yang pada malam ini bermuara pada sillaturrahmi nasional, tentu sama sama kita harapkan takbir akbar nasional ini meninggalkan kesan yang mendalam kita semua.

Malam ini memiliki arti yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi. Setelah sekian lama kita merangkai hubungan sillaturahmi di antara berbagai lembaga ormasd Islam dan yang berada di bawah naungan Al-Ittihadiyah. Namun, baru pada peringatan inilah ikatan kebersamaan yang kita miliki, rasa persaudaraan dan persatuan yang kita damba

terwujud. Semua itu semata-mata karena karunia Allah SWT dan keikhlasan serta niat baik kita masing-masing yang diridhai-Nya. Sekali-kali jangan pernah kita lalai dan terlena bahwa tantangan dan tanggung jawab keumatan semakin hari semakin besar. Hampir seluruh aspek kehidupan bangsa saat ini tengah dirasuki oleh budaya asing yang sekuler. Umat dan calon calon penerus generasi bangsa ini sedang dihadapkan kepada tantangan yang luar biasa.

Firman Allah SWT Surat Maryam 59 yang artinya: Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

Diantara ragam persoalan itu antara lain; semakin intensifnya tayangan tayangan pornografi dan porno aksi di berbagai stasiun televisi. Kuatnya perlawanan terhadap akan disahkannya rancangan undang-undang (RUU) anti pornografi dan pornoaksi. Penerbitan buku-buku yang mengaburkan nilai nilai aqidah Islam. Bangkitnya semangat mendirikan lembaga-lembaga keagamaan yang mengabaikan nilai nilai ke islamian. Semua itu tantangan dan PR ormas Islam ke depan.

Disamping itu, pemakaian symbol-simbol keislaman oleh pemeluk agama lain. Bahkan ada usulan Rancangan Undang Undang penghapusan diskriminasi yang seolah olah menegaskan adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas di negeri ini. Sepanjang kenyataan sejarah dimanapun Islam tumbuh dan berkembang tidak pernah merasa lebih unggul, menyisihkan dan bersikap diskriminatif terhadap kelompok lain. Islam datang membawa rahmatan lil alamin.



Allah SWT berfirman Al-Baqarah 120, yang artinya: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah; "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Semua itu memiliki dampak buruk jangka pendek dan panjang terhadap umat. Bila tidak ada kebersamaan di kalangan umat, dan belum juga muncul kesadaran akan persatuan maka gelinding roda kemaksiatan akan melindas umat. Banyak RUU yang jika disahkan akan membelenggu. Al-Ittihadiyah sebagai organisasi massa Islam perjuangan kita tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri. Fungsi Al-Ittihadiyah sebagai pemersatu, penggalang persatuan dan kesatuan yang sekaligus menjadi jati diri Al-Ittihadiyah harus mampu memelopori kebersamaan antar ormas Islam khususnya di wilayah Sumatera Utara dan di seluruh wilayah tanah air.

Allah SWT berfirman Al-Anfal 73 yang artinya: "Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Beberapa langkah berikut dapat dijadikan dasar acuan untuk melangkah ke depan, yaitu:

### Perteguh Jati Diri

Sejarah perkembangan sains ke depan. Dimana ilmu

pengetahuan semakin terspesialisasi secara spesifik. Disisi lain pintu-pintu perolehan keilmuan itu sendiri semakin banyak terbuka melalui kemajuan teknologi informasi cibernetik baik melalui *net working* maupun media massa. Maka Al-Ittihadiyah harus semakin memperteguh karakter dan cirinya sebagai lembaga yang ikut serta memproduksi manusia-manusia unggul yang berakhlak mulia. Kita harus mampu menggali ruh, hakikat keberadaan kita yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga keinginan untuk memelihara ruh eksistensi itu melekat pada kedirian organisasi atau lembaga kita sendiri.

Patut dicermati bahwa kelemahan organisasi massa Islam maupun institusi ke agamaan pada umumnya adalah; mereka tidak pernah tahu dan tidak mau tahu apa yang menjadi hakikat kediriannya yang membedakannya dari yang lain. Dalam pendekatan bisnis disebut "*positioning*". Dalam hubungan ini yang terpenting adalah apa wujud nyata dan komitmen baru yang dapat kita aplikasikan dalam waktu dekat berangkat dari visi dan misi yang kita tetapkan.

Firman Allah SWT Al-Ahzab 23 yang artinya: "Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka diantara mereka ada yang gugur. Dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merobah (janjinya).

### Pengenalan berkelanjutan

Ada kesalahan fatal dalam memahami iklan atau promosi di lingkungan institusi agama baik yayasan, organisasi massa Islam maupun lembaga pendidikan. Bahwa, iklan itu untuk



perusahaan yang *profite oriented*, saja dan bertujuan mengejar keuntungan finansial semata mata. Jika ada yang memahami iklan itu penting, baru sekedar wacana yang patut diperbincangkan. Pada hal sebenarnya ditilik dari sudut manapun baik ajaran Al-qur'an yang senantiasa kita agungkan dan menjadi pegangan dasar dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Ittihadiyah. Bahkan dari sudut manajemen pendidikan, apalagi dari pengalaman yang telah kita lalui. Bahwa promosi atau iklan keberadaan organisasi kita di tengah tengah masyarakat baik lapisan pemerintah maupun legislatifnya harus secara terus menerus dilakukan. Masyarakat harus tahu kita ada dan mereka mendambakan keberadaan kita. Bila tidak, kita akan sampai pada satu saat dimana masyarakat lingkungan kita sendiri tidak lagi butuh eksistensi organisasi kita. Ironisnya, itu semua semata-mata karena mereka tidak tahu bahwa kita ada, berfungsi, berguna dan bermanfaat bagi mereka.

Allah SWT berfirman surat Fussilat 33 yang artinya: "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

### Berani Mengungkap Kebenaran

Ada gejala yang memprihatinkan yang sedang tumbuh di bagian besar umat Islam dewasa ini. Yaitu; adanya sikap ragu-ragu, tak percaya diri bahkan pesimis dalam melihat persoalan-persoalan keumatan. Bila dulu semangat juang umat sangat kuat dan rasa ketersinggungan kita sangat peka bila

ada orang atau kelompok yang mengutak-atik harga diri umat atau yang coba-coba menyungkit yang menyangkut aqidah Islam. Namun, dewasa ini rasa bangga itu tidak lagi kelihatan, melemah. Bahkan, sebagian umat terperosok ikut-ikutan dalam membela paham sekuler dan liberal.

Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 30: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu".

Disinilah dituntut Al-Ittihadiyah sebagai organisasi yang meletakkan garis perjuangannya sebagai sebuah gerakan sosial, pendidikan, ekonomi dan politik hendaklah selalu ada dan berada di barisan terdepan guna memelopori timbulnya kembali keberanian umat, harga diri umat, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar menuju *baladun thayyibatun warabbun ghafur*.

Drs. H. A. Nazri Adlani  
Ketua Umum



## UMAT MUSLIM DAN KEPENTINGAN BANGSA

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Achdari, SIP  
Ketua Pelaksana Takbir Akbar & Silaturahmi Nasional 2006

*Assalamu alaikum WR WB*

Yang saya hormati teman temanku seiman di Al Ittihadiyah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan, atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam buku "Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa" diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan Takbir Akbar & Silaturahmi Nasional 2006 yang pelaksanaannya kali ini diprakarsai dan diamanahkan kepada DPP Al-Ittihadiyah.

Dengan rasa bahagia pula saya tuliskan sambutan dalam buku ini, karena masih terkesan pada saya keakraban dan ketulusan saudara-saudaraku seiman dari Al-Ittihadiyah saat bekerjasama dalam panitia acara Takbir Akbar dan Silaturahmi Nasional Tahun 1427 H atau 2006.

Hal yang patut kita lakukan bila kita mencermati atau mengurai kembali sejarah kehidupan kita di masa lalu, maka hikmahnya akan tergantung pada apakah kita mampu

mengadakan evaluasi dan memetik manfaat positif dari napak tilas sejarah itu?

Seorang yang sudah lanjut usianya, yang sarat dengan pengalaman hidupnya, sekitar 32 tahun yang lalu pernah bercerita kepada saya, yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa di masa lalu, khususnya peranan umat muslim Indonesia dalam bersikap demi kepentingan bangsanya. Meskipun masa 32 tahun itu sudah lama berlalu, namun ceritanya tidak pernah saya lupakan. Karena ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yang menurut saya itulah jawaban bagaimana kita, seluruh bangsa Indonesia terutama umat muslimnya yang jumlahnya mayoritas, menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan bangsa dan negara kita yang terasa semakin kompleks dan berat yang banyak peluang atau tantangannya serta banyak pula ancaman, hambatan dan gangguannya.

Adapun cerita orang tua itu adalah sebagai berikut: Sahdan di tahun 1928, di era itu belum terbentuk negara Republik Indonesia dan wilayah Indonesia saat itu masih terbagi-bagi yang dikuasai oleh para raja, para sultan dan penjajahan Belanda.

Ada sebuah warung sederhana dipinggiran sebuah kota yang mayoritas penduduknya penduduknya adalah kamum muslim. Warung itu, katakanlah semacam "Warteg" atau Warung Tegal yang selalu ramai dikunjungi para pelanggannya rakyat jelata yang ada disekitar tempat itu. Termasuk pelanggannya adalah sekumpulan pemuda, yang tiap hari pada pagi atau siang hari, selalu berada di warung itu untuk makan-minum bersama sambil bercengkrama dalam mengisi waktu mereka di saat itu. Di salah satu pojok ruang



makannya, ada satu meja makan dengan beberapa kursi mengitarinya, yang selalu mereka tempati bila sedang berada di warung itu, dan seperti sudah ada kesepakatan antara pemilik warung dengan kumpulan pemuda itu, padahal tidak, kursi-kursi dan meja itu di tempat itu seperti khusus disediakan pemilik warung untuk mereka. Bila sebelum mereka datang, ada tamu-tamu lain masuk ke warung itu dan ingin duduk di kursi sekeliling meja itu, pemilik warung dengan halus dan sopan selalu mengatakan: "Maaf, tempat itu sudah ada orangnya dan sebentar lagi mereka datang". Sang tamu pun paham untuk mencari kursi dan meja lainnya. Dan bila kumpulan pemuda itu sedang berada di sana, pasti sudut ruang warung itu menjadi ramai oleh pembicaraan mereka yang kadang-kadang sambil bergurau namun sering pula nampak serius berdiskusi. Tingkah mereka bebas dalam bersikap dan berbicara saling menyatakan pendapatnya, namun tak pernah ada pertengkaran bahkan nampak selalu saling menghargai. Juga meskipun ramai pembicaraannya, mereka selalu berupaya untuk tidak mengganggu kenyamanan tamu-tamu yang lain yang kebetulan bersamaan berada di warung itu. Itulah mereka, yang menurut orang tua itu si pembicara kisah ini, adalah kumpulan orang-orang yang cukup terpelajar dewasa itu.

Kisah lanjutannya adalah: Di suatu hari, di pagi hari, sebagaimana biasanya mereka mendatangi warung itu, yang selalu hampir bersamaan tibanya, kemudian duduk berbincang di "kursi dan meja mereka". Dalam suasana yang hangat pembicaraannya, tiba-tiba seorang pemuda di antara mereka berdiri dan dengan bersemangat berkata: "Saudara-saudara, memang enak kita punya negara sendiri, sehingga

kita bisa atur negara sesuai yang kita mau. Tidak ada lagi penjajahan yang merampok kekayaan kita, dan tidak ada lagi para raja dan para Sultan yang menindas kehidupan kita. Dan mari .....".

Belum selesai dia dengan bicaranya, seorang temannya yang duduk di hadapannya langsung menukasnya dengan ucapan: "Bung, sudahlah jangan kita menjadi pemimpi dan pembual. Apa modal kita untuk berbuat ke arah itu. Janganlah muluk-muluk kalau bercita-cita, sesuaikan saja dengan keadaan nyata kita saat ini. Mari kita bahas yang kongkrit saja, bagaimana upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan kita sehari-hari dan syukur-syukur bila kita dapat membantu pula meningkatkan kehidupan masyarakat di desa ini. Itulah sekelumit pembicaraan mereka, tentang ingin bebas dari penjajahan dan membangun negara yang berdaulat, yang dikemukakan oleh seorang pemuda "pemimpi dan pembual" di masa itu.

Namun apa yang terjadi kemudian? Orang tua dihadapan saya itu terdiam sejenak, yang kemudian dengan ekspresi wajah yang lebih serius mengatakan: Ternyata apa yang dikatakan pemuda "pemimpi dan pembual" itu benar-benar menjadi kenyataan, karena hanya dalam tempo 17 tahun kemudian dengan melalui gaung "Sumpah Pemuda" yang telah kita kenal, negara yang diinginkannya terwujud yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata dia bukan seorang pemimpi dan pembual.

Sayang, pertemuan saya dengan orang tua itu berlangsung singkat, tidak sempat bertanya lebih dalam tentang ceritanya, sehingga belum jelas bagi saya, apa



hubungan pemuda “pemimpi dan pembual” itu dan teman-temannya dengan peristiwa “Sumpah Pemuda” yang tahun kejadiannya sama. Apakah dia atau mereka yang kemudian menjadi pelaku-pelaku Sumpah Pemuda itu? Atau apah justru orang itu pula yang merupakan salah satu dari kumpulan pemuda itu?

Senyatanya, sejarah mencatat pada tahun 1928 di wilayah Nusantara bergema “Sumpah Pemuda” yang digaungkan oleh sekumpulan pemuda, dan setelah itu bergejolak dan bergeloralah perjuangan segenap bangsa untuk merebut kemerdekaannya dari kaum penjajah Belanda, dan hanya dalam tempo 17 tahun saja mereka berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini kitalah yang mengenyam hasil perjuangan mereka itu.

Kita patut menghormati dan menghargai perjuangan mereka selama hidup kita, dan mencoba memaknai pertanyaan yang diucapkan oleh “pemuda pesimis” dalam cerita “di warung Tegal” itu, yakni “apa modal mereka” dan apa yang dilakukan para pejuang di masa lalu sehingga berhasil mempersatukan segenap bangsa yang ada di berbagai pelosok tanah air dan kemudian berjuang bersama berhasil mengusir kaum penjajah yang di masa itu bercokol sangat kuat.

Meskipun kita tidak hidup di masa itu, tapi pasti kita bisa memperkirakan “apa modal mereka itu”, yaitu yang utamanya adalah mereka memiliki moral keyakinan agama yang kuat, kemauan berbuat secara maksimal untuk melakukan yang terbaik, berani menanggung risiko sebesar apapun, serta merekapun siap, ikhlas dan rela berkorban segalanya termasuk nyawanya, demi bangsanya, bukan demi dirinya sendiri atau demi sekelompok orang tertentu saja. Luar

biasa integritas pribadi mereka, yang mau berjuang, berbakti dan mengabdikan demi bangsanya, dan rela berkorban tanpa pamrih apapun karena ratusan ribu atau bahkan jutaan dari para pejuang itu gugur di masa perjuangannya, sehingga tidak sampai mengenyam hasilnya di saat kemerdekaan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dikumandangkan, karena mereka sudah tiada. Risiko itu sudah mereka perhitungkan namun mereka rela/ikhlas menerimanya.

Yang perlu kita sadari adalah, para pelaku sejarah yang berintegritas pribadi mulia itu mayoritas adalah kaum muslim Indonesia, yang diantaranya terdapat para Ulama dan Kyai, para Santri dan jamaah muslim lainnya. Saya tertegun, ketika membaca buku “Visi Baru Al-Ittihadiyah” yang diberikan oleh saudara seiman saya, yaitu bapak Drs.H.A. Nazri Adlani, yang buku itu belum pernah saya baca sebelumnya, di halaman 164 tertera bahwa Al-Ittihadiyah didirikan pada tahun 1935, atau tepatnya adalah pada tanggal 27 Januari tahun 1935 oleh K.H. Ahmad Dahlan seorang ulama terkenal di Medan, sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

Subhaanallaah, jelas dan pasti Al-Ittihadiyah memiliki andil yang tidak kecil dalam perjuangan memerdekakan bangsa serta mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperankan oleh para ulama atau Kyai dan santri Al-Ittihadiyah di masa itu. Berbanggalah saudara-saudaraku seiman di Al-Ittihadiyah kini, namun kebanggaan itu cukup disimpan dalam hati dan dimaknai, bahwa jamaah Al-Ittihadiyah memiliki “orang tua” yang bermoral mulia seperti yang saya uraikan di atas, atau dengan kata lain, anda para saudaraku seiman di Al-Ittihadiyah kini, adalah “keturunan”



dari para ulama yang bermoral mulia dalam menyikapi kepentingan bangsanya.

Itulah kisah nyata, bagaimana umat muslim Indonesia menyikapi kepentingan bangsanya. Dan bangsa yang mengenyam hasil perjuangan mereka itu adalah multi etnis/ras, multi suku dan multi agama atau keyakinan kepercayaan, yang tidak terkait hubungan darah kekeluargaan atau persaudaraan dengan mereka. Mereka menyadarinya dan ikhlas/rela berjuang dan tidak pernah memikirkan akan adanya perbedaan, semua dianggap sama dan satu yaitu bangsa, bangsa Indonesia. Itulah wujud umat muslim Indonesia, leluhur kita, dalam bersikap dan berbuat demi bangsanya.

Saudara-saudaraku se iman di Al-Ittihadiyah.

Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah di antara kita yang umat muslim mau bersikap seperti umat muslim masa lalu, yaitu rela berkorban tanpa pamrih demi kepentingan bangsa yang bangsa itu berbeda suku atau tidak seiman dengan kita?

Keadaan bangsa dan negara sekarang ini sudah jauh berubah, lebih maju dan lebih mundur.

Lebih maju dalam artian wujud fisiknya, namun lebih mundur dalam wujud non fisiknya yaitu moral dan nilai-nilai luhur yang dimiliki. Modal bangsa sudah lama tergradasi menjadi lebih rendah atau lebih rusak, yaitu sejak paska kemerdekaan dan tegaknya NKRI. Pejuang tanpa pamrih sudah langka dan sulit ditemukan. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang cenderung tidak mengenal lagi istilah itu atau ditabukannya. Semua kegiatan yang untuk

bersama atau demi bangsa dan negara, sudah ada harga tawarnya yaitu "UUD" (Ujung-Ujungnya Duit). Bagi kelompok ini "berjuang demi kepentingan bangsa dan negara" adalah semu, kongkritnya adalah berjuang demi diri sendiri atau kelompok sendiri tanpa peduli walaupun toh mengakibatkan orang lain menderita. Sering terjadi, dan bahkan kita alami sendiri, dalam bekerjasama berbuat dengan tujuan mulia, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, ternyata ada sekelompok orang yang menjadikan tujuan itu hanya sebagai "mantel" nya (baju luarnya) saja sedang dalamnya atau aslinya adalah berjuang mengejar "UUD" demi kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri. Sangat menyedihkan dan memprihatinkan keadaan ini bisa terjadi dikalangan umat muslim.

Melalui sambutan ini, saya mengajak Keluarga Besar Al-Ittihadiyah untuk mari membangun moral bangsa kita seperti yang pernah ada di bumi persada ini, yang dimiliki oleh para leluhur pejuang bangsa di masa lalu, yaitu mampu berbuat dan bekerja keras serta bertanggung jawab, jujur dan terbuka dalam pertanggung jawaban, serta rela mengabdikan dan berkorban demi kepentingan kemajuan kehidupan bangsa dan negara.

Kita pelihara dan tingkatkan kesatuan dan persatuan serta kebersamaan dan kerukunan bangsa yang multi etnis/ras, suku dan agama atau keyakinan kepercayaan. Kita hindari segala urusan menjadi "UUD" (Ujung-Ujungnya adalah Duit) atau hanya untuk "UUD" atau menjadi proyek "UUD".

Sebaliknya kita mampu menampilkan pribadi "muslim sejati" yang tepat dalam menyikapi segala persoalan yang kita hadapi. Mungkinkah itu?



Sadarilah dan renungilah, sesuai dengan pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa jumlah umat muslim terbesar di dunia saat ini berada di Indonesia atau adalah penduduk Indonesia. Dapatkah kita sebagai umat muslim di Indonesia, memahami apa maksud Allah SWT menjadikan keadaan seperti ini? Adakah amanah khusus untuk umat muslim Indonesia?

Cukup sekian sambutan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah akrabnya tali silaturahmi kita atau ukhuwah Islamiyah pada umumnya.

Selamat melaksanakan amalan iman dan takwa kepada Allah SWT.

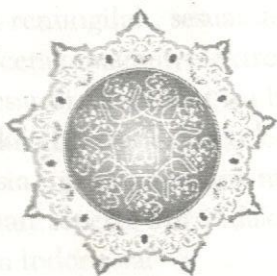
Sehubungan dengan tibanya Idul Fitri 1427 H yang akan datang, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang ada.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan Taufik, Hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

*Wassalamu alaikum WR.WB.*

## SELAYANG PANDANG KIPRAH AL-ITTIHADIYAH





## SELAYANG PANDANG KIPRAH AL-ITTIHADIAH

Oleh: Prof.Dr.Hj.Djanius Djamin. SH, MS

### Pendahuluan

Kehadiran Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara tahun 1935 pada dasarnya merupakan respon umat Islam di wilayah ini terhadap situasi politik dan sosial keagamaan yang berkembang di Indonesia, khususnya Sumatera Timur. Ketika itu, sebagaimana dikemukakan salah seorang mantan ketua umum Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, H. Mahmud Abu Bakar dalam Azhar, et al (1960:66) bahwa Belanda melancarkan politik pecah-belah yang melemahkan kekuatan umat Islam dan menghancurkan potensi alim ulama dikarenakan hendak memperkuat kukunya untuk menjajah Indonesia buat selamanya. Politik adu domba tersebut termakan oleh umat Islam, sehingga muncullah kubu atau kelompok-kelompok

yang saling bermusuhan. Pada satu sisi, muncul kaum intelek yang kebarat-baratan yang melontarkan kata-kata yang merendahkan ulama dan umat Islam dengan mengatakan bahwa kaum agama dan alim ulamanya adalah ortodok.

Bakar dalam Azhar, et al (1960:15) menjelaskan sebahagian ulama dan penganut agama Islam menuduh orang intelek sebagai kaki tangan Belanda. Pertengkar antara kedua kelompok ini makin lama kian meruncing. Dalam konteks inilah, Al-Ittihadiyah hadir untuk menjembatani dan mempersatukan umat serta sebagai salah satu barisan jihad bagi kekuatan kaum Muslimin (Arsyad, et al, 1968:19).

Al-Ittihadiyah didirikan pada tanggal 27 Januari 1935 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1352 M di Medan oleh Syekh K.H Ahmad Dahlan, ulama besar pada zamannya yang berasal dari Tanjung Pura Langkat (Anzizhan dan Syafaruddin, 2004:68). Organisasi ini dideklarasikan di gedung Zelfstanding Yong Islamiten Bond Jalan Sisingamangaraja, di belakang masjid Raya Medan. Bersama dengan para ulama, cerdik pandai dan murid-muridnya yang berjumlah 200 orang Syekh Haji Ahmad Dahlan mendirikan Al-Ittihadiyah (CVO Conferentie, 1941: 27).

Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatari oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan Islam yang belum tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam pasal 2 *stauten* Al-Ittihadiyah, dimana pada b dan c disebutkan bahwa maksud didirikannya Al-Ittihadiyah adalah untuk:



- b) Mengoesahkan berdirinja roemah2 pergoeroean Islam
- c) Mengatoer dan mensesoeaikan daftar peladjaran dalam roemah2 pergoeroean AI dan roemah2 pergoeroean yang tergaboeng dengan AI (CVO Conferentie Al-Ittihadiyah, 1941, 16).

Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat beragam. Di samping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karena itu, dalam CVO Conferentie I-Ittihadiyah (1941:51) dijelskan bahwa Al-Ittihadiyah didirikan untuk berusaha : (a) *mempersatoekan daftar peladjaran, dan, (b) mempersoeaikan faham diantara goeroe2 terhadap soal2 jang berhoeboeng dengan agama Islam soemoenja.*

Fakta lain yang dilihat Al-Ittihadiyah adalah kenyataan bahwa dalam pandangan masyarakat sekolah-sekolah modern yang dibangun dan dikembangkan oleh Belanda merupakan jalur terbaik bagi mobilitas sosial secara vertikal. Perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintahan hanya akan menerima dan mempekerjakan para pegawai tamatan dari sekolah-sekolah modern ini. Sementara di sisi lain, madrasah dan perguruan-perguruan Islam masih terlalu terpaku pada praktik-praktik tradisionalnya dan berorientasi murni keagamaan. Karena itu, satu-satunya lapangan pengabdian yang memungkinkan ditekuni para alumninya hanyalah sebagai *ustadz, guru agama, malim kampung, dan guru-guru ngaji.* Ketika Muhammadiyah, organisasi massa Islam terlebih

dahulu eksis di Sumatera Timur, membangun sekolah-sekolah modern seperti yang dikembangkan Belanda, maka minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sana demikian besar. Disinilah tokoh-tokoh Al-Ittihadiyah melihat perlunya mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Al-Ittihadiyah sebagai organisasi massa Islam memprogramkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi dengan membangun dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern, panti asuhan dan majlis simpanan dan pertolongan.

### Kiprah Al-Ittihadiyah: Refleksi Masa Lalu

Al-Ittihadiyah bermakna persatuan. Nama ini sengaja dipilih pendiri Al-Ittihadiyah untuk merepresentasikan maksud utama yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi ini, yaitu berupaya membangun satu perhimpunan umat Islam yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat Indonesia, seperti kaum bangsawan, orang kebanyakan, ulama dan pelajar, kaum intelektual dan kelas menengah (*intellectueelen* dan *middenstanders*). Persatuan itu dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan dan perseteruan antara kaum muda dengan kaum tua, antara ulama dan kelompok intelektual, serta antara kaum bangsawan dan masyarakat awam. Inilah identitas yang merupakan ciri khas Al-Ittihadiyah ketika pertama sekali organisasi Islam ini didirikan.

Dalam perkembangannya, Al-Ittihadiyah mengembangkan lembaga pendidikan, dakwah dan panti asuhan. Terutama



pada masa pembentukan peraturan dan kelembagaan organisasi. Setelah masa pengembangan awal berlalu, ditandai dengan perlawanan yang gigih terhadap penjajahan Belanda dengan mendirikan sekolah-sekolah, pengajian pengajian maka muncul era kemerdekaan dan pembangunan, maka pada dewasa itu kecemerlangan nama Al-Ittihadiyah bersinar di Sumatera Timur. Nama besar Syeikh KH Ahmad Dahlan, K.H, Sayuti Noor, KH. Fuad Said dan tokoh besar lainnya menjadi buah bibir dan disebut dimana-mana. Sebagaimana halnya kincir kehidupan yang senantiasa berputar ada masa perputaran orientasi perjuangan di Al-Ittihadiyah.

Ketika Dewan pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah pindah ke Jakarta, dan H Ali. Imran Kadir, SH naik menjadi pemimpin puncak. Beliau adalah seorang politikus 3 jaman yang sepak terjangnya di dunia politik disegani oleh pihak kawan maupun lawan. Pada saat itu terjadilah pergeseran orientasi perjuangan Al-Ittihadiyah yang lebih cenderung ke dunia politik. Pada era beliau nama Al-Ittihadiyah naik di pusat karena beliau dengan gaya kepemimpinan yang setengah otoriter lantang berbicara di berbagai forum di MUI, ormas-ormas Islam tingkat pusat bahkan paling berani mengkritik penguasa masa itu. Pada saat yang sama Sumatera Utara sebagai wilayah basis kekuatan Al-Ittihadiyah juga dipimpin oleh seorang politikus yang garis perjuangannya tidak jauh berbeda. Pada era ini dinamika dan perjuangan bidang pendidikan, sosial, dakwah sedikit terabaikan.

Maka pada saat ini kepemimpinan era baru harus dapat menawarkan strategi baru perjuangan Al-Ittihadiyah mengisi kiprah dalam era reformasi. Di sinilah diperlukan DPP Al-

Attihadiyah yang responsif terhadap keperluan umat dan perubahan zaman.

## Era Baru: Merespon Perubahan

Dalam Mukhtar ke-17 Al-Ittihadiyah yang berlangsung tanggal 2 s/d 3 Juli 2004 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, terpilih Brigjen (Purn) Drs.H.A.Nazri Adlani sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah periode 2004-2009. Pada saat itu Nazri Adlani sebagai ketua MUI, dan Wakil Ketua MPR RI utusan Golongan.

Periode kepengurusan 2004-2009, Drs.H.A.Nazri Adlani selaku Ketua Umum, dibantu oleh beberapa staf ketua, dan Sekretaris umum H. Martin Roestamy, SH, dan Bendahara Drs. Fikri Boreno, MBA. Kemudian setelah berjalan dua tahun masa bakti, terjadi Resufle kepengurusan pada awal 2005 disebabkan H.Martin Roestamy, SH, MH, terpilih sebagai Rektor Universitas Djuanda Bogor, maka Sekretaris Jenderal dipercayakan kembali kepada Drs. Anzizhan, MM, yang pada era Ali Imran Kadir mengemban amanah selaku Sekretaris Jenderal tahun 2002 s/d pelaksanaan Mukhtar Al-Ittihadiyah 2004 dan H.Martin Roestamy, SH, MH menjadi salah seorang ketua hingga kini.

Sejatinya semangat perubahan di DPP Al-Ittihadiyah merupakan jasa tak terlupakan almarhum H. Ali Imran Kadir, SH. Ketika beliau mengamanahkan Sekretaris Jenderal DPP Al-Ittihadiyah kepada Drs. Anzizhan, MM tahun 2000, dan pada 2001 datang Drs.Syafaruddin, M.Pd, seorang penulis muda berbakat melanjutkan studi S3-nya di Jakarta. Mereka aktif membantu kegiatan kegiatan DPP yang memang lebih



banyak kepada taushiah-taushiah kepada pemerintah dan kecaman terhadap dunia barat. Pemikiran mereka terhadap Al-Ittihadiyah ke depan dituangkan dalam buku "Visi Baru Al-Ittihadiyah" yang dengan bangga diluncurkan oleh Ketua MPR RI (Prof. Dr. H. Amien Rais) pada pembukaan Muktamar ke 17 Tahun 2004. Wujud dari keinginan untuk memajukan Al-Ittihadiyah ke depan maka masuklah ke jajaran pengurus kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang.

Bergabungnya para pakar di susunan pengurus, ditandai dengan masuknya kalangan profesional (Bankir berpengalaman H. Hisyam Sulaiman dan pakar ekonomi Islam Prof. Dr. M. Sofyan Syafri Harahap, M.Ec.) yang masing-masing duduk selaku wakil Ketua diharapkan akan mempercepat perubahan dan percepatan aktivitas organisasi. Kenyataannya tidak mudah untuk menyamakan persepsi organisasi. Karena berbedanya latar belakang antar pengurus. Butuh waktu yang cukup lama untuk menyamakan pandangan. Tanpa disadari rupanya kondisi itu membawa berkah karena kehadiran para wakil DPP Al-Ittihadiyah pada pertemuan tingkat pusat Ormas Islam maupun rapat rapat MUI membawa warna tersendiri. Tampil profesional, disiplin dan tertib.

Adalah suatu langkah maju bagi Al-Ittihadiyah dalam mensosialisasikan organisasinya. Aktivitas organisasi dalam berbagai forum di tingkat pusat, akhirnya mengantarkan DPP Al-Ittihadiyah dipercaya oleh MUI Pusat dan Pemerintah R.I. selaku pelaksana Takbir Akbar & Silaturahmi Nasional 2006 M/1427 H. Acara yang dihadiri oleh Presiden dan wakil Presiden merupakan amanah bangsa yang bersejarah. Pada kesempatan takbir akbar dan Silaturahmi Nasional ini DPP

Al-Ittihadiyah mengumpulkan pokok pokok pemikiran para pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang fokus membahas tentang bagaimana langkah langkah yang bisa ditempuh agar peran ormas Islam (umat Islam) aktif memikul beban bersama-sama untuk kesejahteraan bangsa ke depan. Baik melalui pintu dunia pendidikan, sosial, budaya dan agama. Pemerintah tidak mungkin dibiarkan sendirian tertatih tati membangun negeri indah zamrut kaulistiwa ini. Kita jait hubungan erat dalam jalinan silaturahmi berbangsa ke depan. Kita pelopori merajut indahnya kebersamaan dalam kesatuan. Buku itu diberi judul "Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa".

### Kembali Kepada Prinsip Qur'ani

Untuk mewujudkan keinginan peran ormas Islam dalam membangun bangsa, tidak ada jalan lain yang paling efektif kecuali Pemimpin Ormas Islam harus mengemban visi Islam. Kiprah para pimpinan Ormas Islam dalam menjalankan aktivitas pendidikan, dakwah, sosial dan politik harus tetap konsisten dalam kerangka nilai Islam.

Tugas manusia sebagai pemimpin dan manajer di muka bumi ini ialah memakmurkan alam sebagai manifestasi dari rasa syukur manusia kepada Allah dan pengabdian kepada-Nya. Tugas para pimpinan (khalifah) diberikan kepada setiap manusia, maka dalam pelaksanaannya terkandung sikap kebersamaan atau pertanggungjawaban bersama kepada Allah akan kemakmuran alam ini. Konsep ini melahirkan nilai yang sangat penting tentang "pemimpin", kepemimpinan, dan



anggota atau yang dipimpin, serta situasi di mana kepemimpinan itu berlangsung.

Dalam surat Al-Anbiya' ayat 73 Allah menegaskan yang artinya : *"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (QS.21:73).*

Bagi setiap umat ada pemimpin yang dipercayai (*credible*) sehingga mereka dapat mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan dengan keteladanannya. Pemimpin harus menjadi penolong, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing anggota organisasi untuk mematuhi kehendak Allah. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya (QS.9:71)".*

Perlu dicermati apa yang dikemukakan Kuntowijoyo (1991:25) bahwa perlu ada kesadaran sejarah baru, umat Islam sebagai komunitas keagamaan par-exellence sebagaimana komunitas lain, perlu memahami latar belakang historisnya, di dalamnya ada cita-cita kolektif yang menjadi tujuan hidupnya. Untuk itu pimpinan Ormas Islam perlu menghayati nilai keislaman dalam mewujudkan pengaruhnya terhadap sumberdaya organisasi sehingga tujuan yang diinginkan terwujud. Semua anggota, pengurus, dan perangkat struktural organisasi Al-Ittihadiyah merupakan asset keumatan yang perlu dioptimalkan fungsi dan perannya dalam mencapai

pemberdayaan umat. Dengan begitu, kepemimpinan Al-Ittihadiyah saat ini juga perlu menata ulang berbagai pedoman dan aturan organisasi, tidak hanya terkait dengan administrasi, tetapi juga pedoman perkaderan, dan nilai-nilai perjuangan yang melandasi kiprah Al-Ittihadiyah untuk merespon perkembangan dan perubahan zaman.

## Penutup

Al-Ittihadiyah sebagai salah satu Ormas Islam memiliki peran strategis dalam pembinaan umat dan pembangunan bangsa. Kontribusi Al-Ittihadiyah melalui pengembangan lembaga pendidikan, panti asuhan, dakwah dan politik perlu dikemas ulang dalam merespon berbagai perubahan setelah era reformasi. Setidaknya, ada reorientasi nilai, visi dan strategi perjuangan dengan melakukan kaderisasi intensif untuk memajukan umat Islam. Karena dengan memajukan umat Islam melalui kiprah Ormas Islam, berarti turut memajukan bangsa. Betatapun problematika kebangsaan terus mendera, baik dari dalam maupun luar, hanya kemampuan antisipatif bangsa ini yang mampu menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan.

Untuk tindakan selanjutnya, kepemimpinan Al-Ittihadiyah harus diperkuat baik pada tingkat cabang, daerah, dan maupun pusat. Setidaknya, program kaderisasi menjadi pilihan utama. Sejalan itu, perluasan komunikasi eksternal dan kerjasama antar lembaga perlu mendapat perhatian serius Al-Ittihadiyah. Majulah Al-Ittihadiyah, majulah bangsaku!

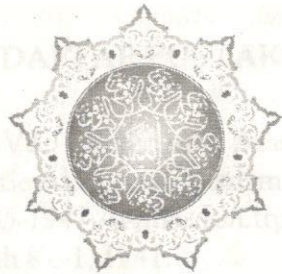


## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ittihadiyah, C.V.O Conferentie, Azas, Toejoean, Oesaha dan Organisatie Al Ittihadiah dalam *Conferentie Jubileum 6 Tahun 1935-1941 Al-Ittihadiyah*. ttp: CVO Conferentie Al-Ittihadiyah Ke-1, 1941.
- Anzizhan dan Syafaruddin, *Visi Baru Al-Ittihadiyah*. Bandung: Citapustaka Media, 2004.
- Azhar, Bachroem, et al, *Al-Ittihadiyah 1/4 Abad*. Medan: Panitia Besar Kongres ke X Al-Ittihadiyah, 1960.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1986.
- Bakar, Mahmud Abu, Mukhtar XII Al-Ittihadiyah dalam Muchlis Arsyad, et al, *Buku Mukhtar Al-Ittihadiyah XII*. Bandung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtar, 1968.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.

## REVITALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LORONG GLOBAL DAN ERA OTONOMI





## REVITALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LORONG GLOBAL DAN ERA OTONOMI

Oleh : Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA

Salah satu prinsip dasar yang perlu disadari dan dipahami dengan baik ketika kita membicarakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ialah bahwa bentuk negara yang kita miliki sekarang ini bukanlah sesuatu yang telah ada sejak dahulu kala dan sempurna tanpa perubahan. Sebab kenyataannya, bentuk negara tersebut lahir dari proses sejarah perjuangan sejumlah daerah yang didiami ratusan suku bangsa/etnis yang satu sama lain memiliki beberapa perbedaan dan persamaan, baik dari segi bentuk pemerintahan lokal, adat istiadat, bahasa, agama, kulit, potensi sumber daya dan kekayaan daerah dan lain-lain untuk memerdekakan diri dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya mereka bertekad untuk

bersatu membentuk suatu bangsa dalam suatu wadah yang bernama Indonesia.

Dengan demikian, dari sekian banyak unsur persamaan pembentuk negara yang dimiliki, kelihatannya persamaan nasib sebagai anak jajahan, titik temu budaya dan adat istiadat, serta titik temu agama-agamalah yang menjadi unsur terkuat, yang mendorong bangsa ini membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketika menyebut “negara kesatuan”, maka secara implisit kita sedang membicarakan unsur terpenting yang melahirkan kesatuan tersebut, yaitu unsur daerah dengan segala potensi kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Republik Indonesia yang besar ini bereksistensi karena adanya tekad yang kuat dari seluruh daerah untuk menyatukan dirinya menjadi satu negara kesatuan. Dengan kata lain, tanpa adanya tekad dan kesadaran dari seluruh daerah untuk bersatu dengan satu negara RI, kita tidak akan pernah mengenal wujud negara yang bernama Negara Kesatuan RI.

Pada sisi lain, setelah para pendiri (*The Founding Fathers*) bangsa ini, memproklamirkannya dengan penuh ke’arifan dalam bentuk negara kesatuan, sejarah membuktikan bahwa bentuk negara tersebut telah beberapa kali mengalami ujian berat. Sementara dalam lima tahun terakhir ini, negara dan ketatanegaraan kita kembali menghadapi ujian berat dengan munculnya isu disintegrasi bangsa, yang dipicu oleh krisis kesatuan antara lain di Aceh dan Irian Jaya, dan dalam tingkat tertentu terlihat pula riak-riaknya (yang kurang signifikan) di daerah-daerah lain.

Pada saat yang sama suatu fenomena yang patut dicermati adalah terjadinya erosi nasionalisme dan patriotisme di



kalangan sebagian anak bangsa. Fenomena ini akan berimplikasi pada disintegrasi yang lebih serius, dan dengan demikian akan menjadi ancaman bagi negara yang kita sebut Indonesia.

## Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Erosi Nasionalisme

Secara garis besar ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya erosi nasionalisme : *Faktor Pertama*, berbagai problema kebangsaan yang cenderung menghilangkan kecintaan sebagian warga negara terhadap bangsanya yaitu: *Pertama*, krisis multi dimensional yang belum berakhir. Banyak diagnosa yang dikedepankan mengenai penyebabnya. Di antaranya (1) upaya reformasi belum dipandu oleh visi yang jelas karena tidak terfokus dalam menentukan misi, sasaran, dan strategi, *log frame*, dan *action plan* sebagai perangkat dasar dalam merumuskan manajemen pembangunan. Ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih menejerial antar departemen, politisasi birokrasi, dan stagnasi perjalanan reformasi. (2) *Leadership* pemandu jalannya reformasi belum maksimal. (3). Lambannya *recovery* ekonomi. (4) Arus kemiskinan rakyat masih berlangsung. Usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, meskipun sudah dilakukan, namun belum bisa menjadi *infus* bagi tercapainya pemerataan berusaha dan keadilan ekonomi. (5). Kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM sampai saat ini masih menjadi penghambat pemulihan ekonomi.<sup>1</sup> Sementara itu faktor global dan internal berupa dilema demokrasi di Indonesia juga turut membuat krisis lebih akut.

Bertitik tolak dari semuanya itu maka stigma yang terjadi di masyarakat adalah bahwa kepemimpinan nasional masih terus memberikan kepada rakyat suatu ketidakpastian.

*Kedua*, berbagai wacana yang berkembang di tengah bangsa ini mengenai berbagai problema yang dihadapinya seringkali telah mengalami kecenderungan disorientasi, yang seharusnya jika ditemukan masalah, kita harus sama-sama bekerja keras mencari upaya untuk menemukan jalan keluarnya. Namun kenyataannya wacana seringkali mengalami disorientasi, menjadi saling menyalahkan dan menyudutkan, akibat rasa sakit hati dan primordialisme radikal, ataupun kepentingan individu dan kelompok lainnya.

Disorientasi wacana yang berkembang di tengah bangsa kita menampakkan ketegangan antar kelompok, kendati masih dilakukan tindakan *cover-up* dengan berbagai mozaik dan simbol-simbol kesatuan. Sementara idealisme yang didengungkan atas nama reformasi seringkali tersapu gairah primordialisme yang cenderung radikal.

Tampaknya yang perlu diwaspadai dari kecenderungan disorientasi ini adalah, di satu sisi jangan sampai mengkristal suatu keyakinan di tengah masyarakat bahwa akar tunggal dari fenomena disintegrasi adalah ketidakmampuan pemimpin untuk menciptakan visi bersama sebagai bangsa. Pada sisi lain jangan sampai mozaik dan simbol kesatuan di atas fakta disintegrasi dan konflik memicu proses pembodohan rakyat.

*Ketiga*, Fenomena penyelewengan makna reformasi juga sering terjadi. Sebab semua orang, baik mereka yang melakukan perbaikan dan berjuang untuk kejayaannya bangsa, maupun mereka yang melakukan kegiatan kontra produktif atau bahkan yang destruktif, dan berjuang hanya untuk diri



sendiri dan kelompoknya (*vested intrest* dan *conflict of intrest*), semuanya sama-sama menggunakan lebel dan atas nama reformasi.

Kondisi semacam ini bukan hanya seringkali akan membingungkan generasi muda bangsa saat ini, akan tetapi generasi muda yang sedang mengalami pancaroba pun dikhawatirkan tidak lagi dapat membedakan yang benar dan sesuai hati nurani (*ma'rûf*) dengan yang salah, tak sesuai hati urani (*munkar*), jika bukannya mereka akan kehilangan arah masa depannya. Terang saja generasi mendatang akan meminta pertanggungjawaban (*accountability*) generasi kini atas penyelewengan makna reformasi itu.

*Keempat*, salah satu problema bangsa kita yang sangat krusial adalah persoalan moralitas. Artinya, keberhasilan bangsa ini melakukan gerakan reformasi antara lain dikarenakan adanya gerakan moral (*moral force*) sehingga kata ini menjadi idola sepanjang bergemanya reformasi bangsa. Akan tetapi sekaligus bangsa Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius di bidang moral menyangkut hampir seluruh aspek kehidupannya.

Kita mengalami kemerosotan moral dalam aspek ekonomi, jika perilaku ekonomi berubah menjadi sistem Machiavellis (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan); kita mengalami kemerosotan moral dalam bidang keilmuan jika sebagian ilmuwan melakukan penghianatan intelektual (melacurkan ilmu pengetahuannya untuk tujuan-tujuan rendah); kita mengalami kemerosotan moral dalam bidang keagamaan, jika sebagian pemimpin dan tokoh-tokohnya cenderung bertindak tidak moralis, jika bukannya *mutathaffilin*, pendapat dan fatwanya dapat dipesan untuk

kepentingan rendah para penguasa; Kita mengalami kemerosotan moral di bidang sosial dan generasi muda ketika telah terjadi perilaku anarkis, perjudian, kecanduan narkoba. Kita mengalami kemerosotan moral dalam bidang kepemimpinan jika sebagian pemimpin telah mengabaikan amanah kepemimpinan, saat bisikan setan, iblis, dan sekularis, jauh lebih efektif dan dipertimbangkan daripada bisikan hati nurani dan keimanan.

*Kelima*, pudarnya nasionalisme. Tampaknya kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan saat ini bahwa tengah terjadi krisis rasa kebangsaan di kalangan sebagian anak bangsa. Kebanggaan untuk mengaku sebagai Indonesia telah mengalami banyak reduksi.<sup>2</sup> Memang, nasionalisme yang kita anut kini sedang berpapasan dengan kondisi dunia dan terbentuknya budaya global.

*Keenam*, Sempitnya pemahaman masyarakat terhadap makan pemilu dan keberadaan partai-partai politik juga menjadi salah satu problem yang sangat penting. Sebab perbedaan partai yang sesungguhnya merupakan sarana untuk memperkuat persatuan, jika tidak dapat dipahami secara benar, akan menjadi penyebab keretakan di antara komponen masyarakat.

*Faktor Kedua*, faktor eksternal, yaitu adanya konfigurasi global mengenai setting politik dan ekonomi dunia, yang dapat memunculkan adanya pihak yang tidak menginginkan negara Indonesia maju dan berkembang.

Konflik kemanusiaan yang terjadi di negeri kita sungguh amat rumit dan sama sekali tidak paralel dengan semangat solidaritas yang dimilikinya sejak perjuangan kemerdekaan. Konflik kemanusiaan terjadi secara dramatis yang melibatkan



antar agama, antar etnis, antar suku.<sup>3</sup> Jadi kita telah mengalami pudarnya kasih sayang yang tulus kepada sesama warga bangsa diganti oleh kebanggaan dan pemujaan terhadap diri sendiri (*self narcissism*). Sedemikian dramatisnya hingga di luar negeri kita sering kali dicitrakan sebagai bangsa biadab.<sup>4</sup>

Fenomena keretakan ini justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan Indonesia betul-betul lemah di pentas internasional.

Dalam bentuk yang lebih mutakhir bangsa kita juga pernah dilanda rentetan aksi teroris, yang pada satu sisi melahirkan citra buruk bagi negara kita dan penderitaan yang sungguh memilukan, dan pada sisi lain telah memperburuk citra negeri ini. Bahkan aksi-aksi teror yang terjadi telah cenderung pada pencitraan yang lebih buruk bagi bangsa ini di dunia internasional. Sehingga anak bangsa ini, ketika keluar negeri atau berpapasan dengan warga negara lain, sering merasa malu, jika bukannya malu menyebut dirinya sebagai anak negeri ini, karena citra buruk tersebut.

Adalah suatu kenyataan bahwa sehubungan dengan isu terorisme, umat Islam seringkali berada dalam posisi tersudutkan. Hal ini terjadi, selain disebabkan kekacauan dalam melihat Islam—dalam arti normatif ajaran dengan Islam dalam arti sosiologis, perilaku orang yang menganut Islam—juga karena nama Islam sering dijual untuk tindakan-tindakan teror. Hal ini umpamanya terlihat pada bagaimana Islam dijual dalam tindakan biadab membom WTC, 11 September 2001 yang lalu, seperti terungkap dalam dialog Nehad Awad, Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika dengan Mofid Deak, penulis Washington file berikut :

Deak : Apa pesan yang dikirimkan oleh kelompok anda dan kelompok-kelompok muslim Amerika setelah serangan tersebut.

Awad : Pesan yang kami kirimkan ialah bahwa kami adalah bagian dari proses penyembuhan nasional, dan bahwa komunitas kami sudah menderita ganda. Banyak anggota komunitas muslim Amerika tewas atau luka dalam serangan tersebut, dan komunitas muslim Amerika sudah dituduh atas tindakan-tindakan oleh oknum-oknum yang tidak kami kenal...Orang-orang tersebut bukan anggota komunitas kami di sini. Satu-satunya hal yang mereka ambil dari kami adalah nama agama kami, Mereka mencurinya dari kami, seperti halnya mereka mencuri nama dan identitas. Dan mereka secara keji menyamar nama-nama Islam, dan mereka melakukan kekejian. Itu saja yang mereka lakukan.

Para teroris itu adalah oknum-oknum yang sakit dan mereka tidak punya pengetahuan agama. Tidak ada hak bagi mereka atau siapapun untuk mengaitkan apa yang mereka lakukan dengan agama Islam. Pengetahuan mereka tentang agama dan praktek ajaran Islam sangatlah dangkal.<sup>5</sup>

Selain karena para teroris mengambil nama Islam, gambaran citra buruk mengenai Islam, khususnya umat Islam di Timur Tengah terus dihubungkan dengan terorisme. Bahkan Juliet Lodge secara eksplisit mengemukakan tanggapan Capitanchik yang menggunakan kata "Islamic Terrorism", yang meskipun menggunakan tanda petik tetapi nuansa menyudutkan Islam tetap terlihat kentara.



Pada sisi lain Richard Norton menulis:

“Lebih dari bagian manapun dari umat Islam, Timur Tengah, sejak Perang Dunia Kedua, memiliki reputasi buruk sebagai ajang terorisme kendati banyak pelakunya tidak mengaku bertindak atas nama Islam”.<sup>6</sup>

Namun perlu disadari bahwa Islam, terutama di negeri ini, sama sekali menolak tindakan-tindakan teror, apalagi terorisme. Dari makna generiknya saja kedua istilah itu bertolak belakang. Kalau terorisme memiliki muatan ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, pembunuhan, dan bahkan kebencian, maka Islam bermakna keselamatan, penyerahan diri kepada Tuhan, kecintaan kepada Tuhan berarti kecintaan pada sesama, dan dambaan terhadap situasi masyarakat yang tanpa kekacauan.

Dalam perspektif ini memang sangat tidak layak jika Islam disudutkan dengan alasan perilaku kekerasan, termasuk image kekerasan dalam penyebarannya, sehingga Islam diimagekan sebagai “agama pedang”. Dalam hal ini menarik sekali komentar Osman Bakar:

Tidak bisa dipungkiri di beberapa wilayah, kekuatan pedang memiliki peran dalam ekspansi teritorial Islam. Tetapi jika ini saja dianggap cukup untuk mencirikan Islam sebagai “agama pedang” maka karakteristik serupa bisa diberlakukan terhadap agama Kristen atau Budhisme, karena kedua agama tersebut sesungguhnya melakukan peperangan baik dalam upaya mempertahankan atau ekspansi teritorial.

Namun jika yang dimaksud dengan “agama pedang” itu berarti bahwa agama pada dasarnya disebarluaskan melalui konvensi yang dipaksakan, maka hal ini lebih tepat bila

dilekatkan pada agama Kristen daripada Islam.<sup>7</sup>

Suatu kajian yang sederhana sekalipun terhadap Islam akan menemukan informasi yang melimpah ruah mengenai penolakan terhadap tindakan-tindakan teror. Islam memiliki pendapat mengenai *Al-baghi*, pemberontakan bersenjata menentang pemerintahan yang sah dan adil, intimidasi kepada rakyat, penyelidikan politik dengan tujuan memecah belah, dan membahayakan keutuhan nasional. Islam juga memiliki pendapat mengenai penggunaan senjata untuk mengintimidasi rakyat (Q.S. 5:33). Terdapat juga teks-teks yang menetapkan penghormatan yang tinggi terhadap perjanjian, dan lain-lain.

Tampaknya inilah yang melatarbelakangi tokoh-tokoh Islam menegaskan kembali sikap Islam itu, segera setelah peristiwa peledakan WTC. Yusuf al-Qardawi, misalnya dalam *Islam On line & News Agencies* menyebutkan: “Islam adalah agama yang toleran yang menempatkan jiwa manusia dalam rasa hormat yang tinggi dan menganggap serangan terhadap orang yang tidak bersalah sebagai dosa yang sangat besar.”<sup>8</sup>

Dengan begitu Islam membuktikan sendiri penolakannya terhadap tindakan-tindakan terror. Sehingga tidak adil kalau Islam sebagai agama dan umatnya disudutkan dalam isu global terorisme.

Pada saat yang sama Islam juga menegaskan kejujuran, sehingga kedustaan merupakan dosa. Sikap anti kekerasan dalam menimbulkan ketakutan tersebut telah didaratkan nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang ‘arif bijaksana dalam kehidupan mereka, yang menjadi suri tauladan bagi segenap umat Islam.



Dalam memberikan komentar terhadap Surat 3/Alī “Imrān ayat 159, Abdullah Yusuf Ali mengatakan:

Karena sifat Muhammad yang begitu lemah lembut, menyebabkan semua orang sayang kepadanya, dan inilah salah satu rahmat Allah. Salah satu gelar Rasulullah ialah “rahmat untuk alam semesta”. Sesudah peristiwa Uhud tak pernah ada yang lebih berharga baginya daripada sifatnya yang begitu lemah lembut, penuh kasih sayang dan kesabaran yang begitu besar menghadapi kelemahan manusia. Ini adalah sifat yang sungguh agung, yang kemudian dan selalu demikian menyebabkan banyak sekali orang yang tertarik kepadanya.<sup>9</sup>

Para ahli, baik muslim maupun non muslim (akan muslim) sangat mengerti bahwa Islam menentang terorisme. Dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* disebutkan bahwa: “Jelas tindakan terorisme tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam atau agama besar manapun”.<sup>10</sup>

Kita menyadari bahwa dunia memang sedang dilanda arus perubahan yang cepat dan tidak terelakkan, sehingga berakibat pada *social and cultural change*. Implikasinya dapat di lihat antara lain pada kenyataan bahwa dengan terjadinya “ribut-ribut” reformasi dan aksi-aksi teror yang sesungguhnya merupakan persoalan global, akhirnya dapat dimanfaatkan oleh konspirasi pihak tertentu yang bertujuan membuat Indonesia semakin lemah. Jika digunakan bahasa yang sedikit vulgar, sebetulnya ada pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki Indonesia berhasil mengatasi perubahan zaman dan tampil sebagai “kekuatan baru” yang berhasil secara mandiri membangun dirinya.

Pada sisi lain perlu pula disadari bahwa komunisme yang telah redup sekian lama, kini sedang menggeliat untuk bangkit kembali, sebab tidak mustahil gerakannya akan menumpangi kendaraan demokrasi dan HAM, yang muncul dalam bentuk tindakan-tindakan makar semacam peristiwa “Madiun Affair” 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965.

*Faktor Ketiga*, kesalahpahaman terhadap makan otonomi daerah, yang akibatnya menumbuhkan ego sektoral yang berlebihan. Hal ini telah menjadi salah satu ancaman bagi integrasi bangsa.

Pada hal seperti dikatakan David A. Lake & Donald Rothchild, bila otonomi daerah ini dijalankan secara ikhlas dan jujur serta bertujuan menambah porsi pendapatan sebagian dari bangsa sendiri, maka ia termasuk upaya paling manjur dalam meredakan ketegangan dan mencegah separatisme.<sup>11</sup>

## Pemberdayaan Wawasan Kebangsaan Guna Mewujudkan Persatuan

Melihat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya erosi nasionalisme yang selanjutnya mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, maka sangat diperlukan adanya upaya revitalisasi wawasan kebangsaan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, di antaranya:

*Pertama*, menghidupkan rasa persatuan dan menepis kecenderungan disintegratif. Fenomena disintegrasi yang muncul di celah kesatuan bangsa saat ini adalah fenomena yang amat serius yang harus segera diatasi. Sebab keseriusan



persoalan ini telah menyentuh sendi-sendi substansial dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana disadari bahwa negara kesatuan ini dibentuk berdasarkan perasaan senasib sepenanggungan, titik temu budaya dan adapt istiadat (*the unity of several cultures*), titik temu agama-agam (*the unity of religions*) serta kesatuan hati nurani segenap rakyat.

Kita juga dapat melihat kebelakang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan ini yang ditandai dengan tetesan darah para pahlawan, perjuangan, dan pengorbanan harta dan jiwa dari masyarakat, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Untuk itu perlu ditumbuhkan beberapa sikap yang dapat mempertahankan semangat kesatuan antara lain rasa senasib sepenanggungan: (1) adanya kesadaran bahwa bangsa ini dibentuk dari persatuan beberapa budaya, beberapa agama, dan kesadaran hati nurani dalam merasakan sebangsa dan setanah air. (2) perlu adanya reformulasi atau perluasan koridor faktor perekat kesatuan nasional; di samping sekedar rasa senasib sepenanggungan, kesatuan budaya dan agama, kesadaran bahwa kita satu tujuan, satu cita-cita yang akan kita capai secara bersama-sama dan bahu membahu, merupakan unsure penting dari nasionalisme itu.

*Kedua*, mencari dan mengangkat pemimpin bangsa yang kuat dan berwibawa, sehingga dapat mengemban cita-cita rakyat dan negara Indonesia.

Kuat dan berwibawa (*power and authority*) dalam *Oxford Advanced Learner's*, diartikan sebagai kekuatan atau daya tarik yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menempatkannya

patut untuk memberi perintah dan ditaati oleh orang lain<sup>12</sup>.

Sementara itu Max Weber, membedakan tiga bentuk pemerintahan yaitu : *Pertama*, bentuk kekuasaan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno. *Kedua*, kekuasaan yang rasional atau berdasar hukum (*legal*) yang didasarkan pada kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa mengeluarkan perintah-perintah. *Ketiga*, Kekuasaan kharismatik atau pribadi, kepahlawanan tertentu, atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang, dan dari corak tata-tertib yang diperlihatkan olehnya<sup>13</sup>.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai teori kepemimpinan dan berbagai problema kebangsaan yang kita hadapi sekarang ini, maka kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, yang dapat memulihkan kehidupan bangsa di masa depan adalah '**Kepemimpinan Indonesia**', dengan karakter yang kurang lebih merupakan akronim dari kata Indonesia itu, yaitu:

**I** *Iman & Inisiatif*; artinya, seorang pemimpin yang memiliki keimanan yang kuat. Dengan keimanannya ia akan memiliki inisiatif yang dapat menyelamatkan dan memakmurkan rakyatnya.

**N** *Nasionalis*. Seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa adalah pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat

**D** *Dinamis dan dicintai*. Seorang pemimpin Indonesia yang kuat dan berwibawa adalah pemimpin yang dinamis. Dinamisme mengindikasikan kreatifitas dan



kekayaan. Sementara pemimpin yang memiliki komitmen pada kekayaan akan dicintai oleh rakyatnya.

**O** *Organisatoris*, artinya pemimpin Indonesia yang kuat dan berwibawa itu adalah pemimpin yang memahami pengelolaan organisasi pemerintahan dan kebangsaan yang baik. Dengan begitu ia akan memiliki visi dan misi yang jelas mengenai kehidupan berbangsa yang hendak dibangunnya.

**N** *Negarawan*. Seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa adalah seorang negarawan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menyingkirkan kepentingan-kepentingan primordial yang sempit. Dengan begitu ia memiliki ketangguhan dalam menghadapi badai cobaan.

**E** *Empati*, artinya, mampu melihat segala persoalan dan sejarah bangsa secara jernih. Dia tidak bersifat emosional. Dengan demikian ia memiliki komitmen yang kuat terhadap terciptanya rekonsiliasi.

**S** *Strategik dan Simpatik*, artinya seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa itu mampu berpikir strategik, memiliki jangkauan jauh ke depan (futuristik), tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah parsial<sup>14</sup>. Dengan begitu ia akan memperoleh simpati dari seluruh rakyat.

**I** *Ilmu & Intelektual*, artinya seorang pemimpin yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu dan wawasan.

Kedalaman dan keluasan ilmu dan wawasan akan menjadikan seorang pemimpin menjadi orang yang berkepribadian terbuka (*opensif*), sehingga ia mampu melihat secara bijak setiap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya dan yang lebih penting memiliki kemampuan untuk berkomunikasi (*communication ability*) dengan setiap lapisan masyarakat. Sebab ia bukan saja pengatur bagi rakyat tetapi juga sebagai pembimbing yang harus komunikatif.

**A** *Akhlaq & Amanah*, artinya seorang pemimpin yang kuat dan berwibawa adalah pemimpin yang memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian dia akan bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan kebijakannya, baik terhadap rakyat maupun kepada Tuhan.

Ketiga, Pemberdayaan pemilu sebagai upaya untuk mencari pemimpin bangsa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi, pemilu juga dilaksanakan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*state and social formation*) menuju tatanan yang lebih baik, dan juga merupakan filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan rakyat<sup>15</sup>.

Dengan demikian maka pemilu merupakan salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat demokrasi yang dijiwai dengan semangat senasib sepenanggungan, kesatuan budaya, agama, keinginan nurani (*Bhinneka tunggal ika*), bahkan



kesatuan tujuan dan cita-cita yaitu untuk kemajuan Negara Kesatuan Indonesia.

*Keempat*, Memahami dan memanfaatkan otonomi daerah sebagai sarana menuju persatuan. Otonomi daerah adalah satu upaya yang dilakukan menuju Indonesia yang bersatu dan lebih maju, dengan mengurangi sentralisasi pengaturan pemerintahan yang selama ini berfokus di pusat. Namun otonomi daerah, jika tidak dipahami dan dilaksanakan dengan benar, bisa juga menjadi pemicu perpecahan akibat tumbuhnya ego sektoral pada masing-masing daerah yang telah memiliki kekuasaan otonom.

Oleh sebab itu, otonomi daerah harus dipahami dan dilaksanakan secara ikhlas dan jujur yang hal ini membutuhkan kesadaran dari semua pihak. Upaya ke arah implementasi otonomi daerah yang hakiki mestilah memperhatikan beberap aspek berikut :

*Pertama*, Menanamkan kesadaran secara sistematis dikalangan masyarakat, bahwa kita adalah bangsa yang direkat oleh rasa senasib, titik temu budaya, titik temu agama, dan kesamaan cita-cita masa depan. Sementara fenomena disintegrasi muncul karena kesalahan oknum-oknum penyelenggara Negara, yang mulai saat ini harus direkonstruksi sesuai dengan cita-cita reformasi bangsa secara konstitusional.

*Kedua*, Mengimplementasikan otonomi daerah secara adil, jujur dan transparan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam aspek administrasi Negara dan pembangunan, perimbangan keuangan, pembinaan budaya daerah, termasuk ciri khas budaya Islam yang telah menyatu dengan budaya daerah, serta peningkatan kualitas budaya pendidikan di daerah setara dengan di pusat. Sehingga masyarakat daerah

benar-benar menyadari benar-benar bahwa otonomisasi daerahnya merupakan bagian dari penguatan kesatuan dan persatuan bangsa yang berdasarkan panca sila dan undang-undang dasar 1945.

*Ketiga*, daerah-daerah yang kebetulan memiliki hasil bumi yang istimewa kiranya perlu menumbuhkan "kesadaran kolektif" sebagai bangsa yang berpr kemanusiaan (humanis) bahwa bumi dan segala keberkatan yang diberikan Tuhan di dalamnya, tidaklah mesti dimonopoli oleh penduduk di daerah itu, tetapi hendaklah ia merelakan sebagiannya digunakan untuk kesejahteraan di daerah yang lain. Kesadaran kolektif dan otonomi yang hakiki ini amat diperlukan terutama bagi pembangunan daerah yang memiliki keistimewaan dari sudut hasil-hasilnya. Sebab seperti pernah disebut Malik ben Nabi, Persoalan manusia sekarang adalah perlunya pengembangan orientasi kebudayaan, orientasi waktu, dan orientasi capital (modal)<sup>16</sup>.

## Penutup

Dari analisis di atas dapat dilihat betapa revitalisasi wawasan kebangsaan menjadi suatu hal yang amat krusial dalam percepatan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Sementara otonomi daerah sebagai konkretisasi kebersamaan dan pemerataan pembangunan, dapat didayagunakan sebagai upaya revitalisasi wawasan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun pemberdayaannya haruslah merupakan upaya kolektif dari seluruh anak bangsa. *Wa Allahu A'lamu bi al-Shawab.*



Catatan :

<sup>1</sup> Bandingkan "Was-Was Politik" pada *Harian Republika*.

<sup>2</sup> Banyak kutipaan yang dapat dikemukakan mengenai hal ini di antaranya, banyaknya rakyat dan daerah-daerah yang menyatakan "perang" terhadap "Jakarta" sebab dipandang telah memanipulasi solidaritas kebangsaan hanya untuk memperkaya Jakarta dan mengawetkan penderitaan mereka.

<sup>3</sup> *Harian Republika*, 12 Juli 2000.

<sup>4</sup> Lihat *Harian Republika*, 15 Juli 2000.

<sup>5</sup> <http://unsembassy.state.gov/jakarta/wwwhcir.html>.13/07/2003, hlm.3-4

<sup>6</sup> Richard Norton, *op.cit.*

<sup>7</sup> Osaman Bakar, *Islam and Civilizational Dialogue*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya Press, 1977), hlm. 38.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam on line & News Agencies*, 13 September 2001. Dimuat dalam, Departemen luar negeri Amerika serikat, *Jaringan Teroris*, 2001.

<sup>9</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary*, (USA: Amana Corporation, 1989), komentar 471.

<sup>10</sup> John L. Esposito, *op.cit.*

<sup>11</sup> David A et.al. (ed), *The International Spread of Ethnic Conflrik: Fear, Diffusion and Escalation* (Princeton : Princeton University Press, 1998)

<sup>12</sup> Lihat, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University Press : 2000), hal. 68.

<sup>13</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Organization*, ed. by Talcott Parsons (New York : Oxford University Press, 1947), hal. 328.

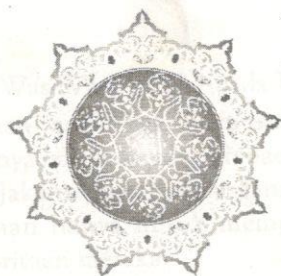
<sup>14</sup> Lord, R.G. dan Maher, K. L. (1991), *Leadership and Information Processing* , Boston, MA.

<sup>15</sup> H. Matori Abdul Jalil, *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Pelaksanaan Pemilu 1999* .Peny. Juri Ardiantoro F, (Jakarta : KIPP 1999), hal. 34-35.

<sup>16</sup> Malik ben Nabi, *Syurût al-Nahdhah*, (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1987)

## POLA PELAKSANAAN TAKBIR HARI RAYA BAGI UMAT ISLAM





## **POLA PELAKSANAAN TAKBIR HARI RAYA BAGI UMAT ISLAM**

Oleh: Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

### **A. Dasar Pemikiran**

Pelaksanaan doktrin, tuntunan dan anjuran-anjuran agama merupakan hak semua penganut agama di dunia ini, dan dilindungi oleh aturan hak azasi manusia sebagai hak universal dengan tidak membedakan latar belakang ras, warna kulit dan etnik serta kebangsaan. Umat Islam, pengikut ajaran kristus, Hindu, Budha dan bahkan penganut Konghucu memiliki hak untuk melaksanakan ritus serta berbagai upacara keagamaan tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun.

Umat Islam memiliki paket ritus dan upacara keagamaan yang spesifik dan berbeda dengan agama lainnya, bahkan relatif lebih banyak dibanding berbagai upacara dari agama lain yang ada di Indonesia ini. Ritual Islam tidak sebatas hanya

perbuatan-perbuatan ibadah wajib tapi juga berbagai anjuran yang diikuti secara konsisten oleh para penganutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan akumulasi pahala mereka dari Allah sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Mereka memiliki semangat tidak saja dalam dimensi pelaksanaan ibadah, namun juga menjadi peristiwanya itu sebagai momentum untuk menunjukkan kebesaran agama Allah, sebagai salah satu sarana penyampaian informasi Islam kepada publik. Oleh sebab itulah, pelaksanaan upacara-upacara keagamaan tersebut, diatur oleh Allah serta Rasul-Nya yang disimpulkan kemudian oleh para ulama dan cendikiawan muslim, agar artikulasinya itu menunjukkan sikap-sikap keadaban, tidak memancing dan bahkan menimbulkan kekerasan di tempat-tempat umum, sehingga Islam dan para umatnya itu tampil dengan simbol rahmat pembawa kasih sayang pada umat manusia, bukan sebaliknya artikulasi kultur yang membuat orang lain selalu merasa takut dan ketakutan karena sikap dan prilakunya yang berindikasikan kekerasan.

Membaca takbir, tahmid dan tahlil di malam hari raya ied al-fithri, ied al-adlha serta hari-hari tasyriq, merupakan bagian dari ritus keagamaan bagi umat Islam, namun secara historis, momentum ibadah tersebut juga biasa dijadikan sarana untuk mengem-bangkan syiar agama, sehingga Sunan Gunung Jati di Cirebon biasa melaksanakannya dalam bentuk perayaan agung, dengan anjuran agar semua penduduk kota melakukan pawai obor sambil mengumandangkan lafal takbir. Kebiasaan baik tersebut terus terwariskan dari satu generasi ke genarsi berikutnya, sehingga kebiasaan takbir keliling masih menjadi bagian dari ciri budaya ritual masyarakat muslim kita, bahkan diinstitutionalisasi oleh pemerintah



dengan membuat perayaan akbar nasional yang dipusatkan di tempat tertentu dan dipancarluaskan secara nasional ke seluruh pelosok negeri.

Sustainabilitas dan bahkan progresifitas kultur tersebut, dilihat dari aspek pengembangan syiar keagamaan merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi *esteem* umat Islam sendiri, sejauh dilaksanakan dengan penuh keadaban tidak menimbulkan kekerasan dan kerawanan sosial, bahkan suasana ubudiahnya lebih menonjol daripada unsur hura-hura dan *euphoria* kemenangan yang diekspresikan secara emosional. Akan tetapi jika sebaliknya, maka tidak saja kehilangan nilai agama dan ritualnya, tapi *Islamic dignity* dari umat Islam secara keseluruhan juga rusak, dan masyarakat secara umum dirugikan. Oleh sebab itulah, pelaksanaan takbir dalam kedua momentum hari raya tersebut perlu diatur dengan mengembalikan pada pola-pola yang disesuaikan dengan aturan agama yang telah dirumuskan para ulama sebagai hasil studi mereka terhadap pesan-pesan al-Qur'an dan al-Sunah, serta mengkombinasikan aturan-aturan normatif tersebut dengan aturan-aturan perundangan yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat.

## B. Pola Pelaksanaan Takbir di *Mushalla* dan *Masjid*

Secara fragmatis masyarakat muslim Jakarta membedakan *mushalla* dengan *masjid*, yakni bahwa *mushalla* adalah tempat melaksanakan ibadah *shalat fardlu*, baik *munfarid* (sendiri) maupun *jama'ah* (bersama-sama) untuk warga muslim yang tinggal di sekitarnya, atau muslim yang sedang melakukan perjalanan. Demikian pula dengan *masjid*, hanya saja

*mushalla* tidak digunakan untuk melaksanakan *shalat jum'at* serta dua hari raya, karena kapasitasnya yang tidak memadai untuk menampung jumlah minimal *jama'ah* untuk ketiga macam shalat tersebut. Sebaliknya ketiga ibadah shalat yang harus dilakukan berjama'ah tersebut dengan minimal *jama'ah* sebanyak 40 orang, hanya biasa dilakukan di tempat shalat yang lebih besar, lapang serta menampung *jama'ah* dalam jumlah yang lebih besar, dan masyarakat menamainya *masjid*. Bahkan untuk dua hari raya, karena jumlah *jama'ah*nya jauh lebih besar, dengan menyatukan *jama'ah* laki-laki dan perempuan dalam satu tempat berjama'ah yang sama, dan hanya dibatasi oleh tirai atau garis-garis pembatas tempat, Rasulullah menganjurkan untuk melakukannya di lapangan. Hanya saja lapangan tidak diubah definisinya menjadi *masjid*, karena *masjid* diartikan sebagai bangunan yang diranacang dan didirikan untuk melakukan ibadah shalat. Bagian dalam dari ruangan yang dibatasi oleh dinding-dinding itulah yang dinamai *masjid*, yang hanya dapat dimasuki dan diduduki oleh mereka yang suci dari hadats besar.

Pada umumnya, penyambutan hari raya *ied al-afithri* dan *ied al-adlha* dengan pembacaan takbir dilakukan di *masjid-masjid*, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan di *mushalla*, dan bahkan banyak pula masyarakat yang melakukannya di *mushalla* mereka masing-masing. Dilihat dari segi peribadatannya, tidak ada perbedaan antara bertakbir di *mushalla* dengan di *masjid*, hanya saja dilihat dari kemungkinan syiarnya bisa berbeda, jika peserta takbir di *masjid* lebih banyak dibandingkan dengan peserta di *mushalla*. Meramaikan *mushalla* dan *masjid* secara bersama-sama akan lebih baik dilihat dari aspek pengembangan syiar keagamaan, serta



berbagai kemudahan bagi para jama'ah untuk menjangkau tempat ibadah mereka.

Membaca Takbir menyambut datangnya hari raya *i'ed al-fithri* dan *i'ed al-adlha* hukumnya *sunah muakkadah*, yakni perbuatan *sunah* yang amat penting sehingga menjadi perbuatan ibadah ritual yang sangat dianjurkan. Waktu membaca takbir untuk *ied al-fithri* adalah sejak terbenam matahari di hari terakhir bulan ramadhan sampai dimulainya pelaksanaan shalat *ied*. Sedangkan waktu pembacaan takbir untuk hari raya *ied al-adlha* adalah sama dengan waktu pembacaan takbir untuk *ied al-fithri*, yakni sejak terbenam matahari hari sampai shalat *ied* di mulai. Hanya saja untuk hari raya *ied al-adlha* pembacaan takbir terus dianjurkan pada setiap sesudah pelaksanaan shalat *fardlu* sampai hari ketiga dari hari-hari *tasyriq*. Kendati termasuk ibadah makhdlah atau ibadah semata, namun pelaksanaan takbir bisa dilakukan di mana saja dan tidak dibatasi hanya di mesjid, dan di mushalla, dan sejauh ini tidak ada fatwa ulama fiqh yang menegaskan bahwa untuk ibadah takbir ini disyaratkan suci dari hadtas besar dan hadats kecil, serta didahului dengan niat. Akan tetapi sebagai sebuah ibadah makhdlah, perbuatan takbir harus didahului dengan bacaan *basmallah* serta berniat dalam hati untuk mengagungkan nama Allah serta memuji kebesarannya. Akan tetapi, kendati termasuk dalam kategori ibadah makhdlah dan termasuk ibadah nafsiyah, melihat pada sifatnya sebagai ibadah publik yang cenderung terbuka pada tempat, waktu dan sifat pelaksanaannya yang juga bermaksud mengembangkan syiar keagamaan, maka melakukan takbir tidak menuntut persyaratan suci dari hadats besar dan hadats kecil, kecuali yang dilakukan di mejid sesudah ibadah shalat

yang menuntut persyaratan suci hadats besar dan hadats kecil dalam pelaksanaannya. Dengan demikian suci dari hadats bukan dalam konteks pelaksa-naan takbirnya tapi dalam pelaksanaan shalatnya.

Membaca takbir dianjurkan untuk dilaksanakan dengan suara keras sesuai pan-dangan jumhur ulama, dan dianjurkan untuk dilaksanakan di mushalla atau mesjid secara bersama-sama, dan bahkan dianjurkan untuk memulai membaca takbir sejak dari rumah ketika akan berangkat menuju mesjid atau mushalla, serta di jalan saat menuju mushalla atau mesjid tersebut. Adapun bacaan Takbir sebagaimana dirumuskan Imam al-Syafi'i dan jumhur ulama lainnya adalah takbir tiga kali dilengkapi dengan tahmid dan tahlil, sehingga rumusan akhirnya adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ ,  
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Bersamaan dengan itu, Rasulullah saw. juga memperkenalkan model bacaan yang lebih sempurna yang beliau bacakan di bukit Shafa, dan dikutip oleh para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Bacaan tersebut adalah sebagai berikut.

اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا  
وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ  
وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ  
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.



Pelaksanaan pembacaan takbir di mushalla atau mesjid, sebaiknya dilakukan bersama-sama dan dipimpin seorang Imam, atau pemimpin ibadah pembacaan takbir tersebut. Kualifikasi imam dalam pembacaan takbir, sebagaimana imam dalam shalat, dengan tujuan terselenggara upacara ibadah dengan baik, khudmat dan khusyu, adalah mereka yang paling baik bacaannya dengan dua kategori yakni kuat hafalannya, serta baik pengucapan huruf-hurufnya sesuai dengan aturan bacaan mujawwad, yakni makharij al-huruf, shifat al-huruf, mad dan qashar, serta hukum-hukum bacaan lainnya. Selain itu, diutamakan yang paling senior di antara jama'ah yang ada, dan paling kuat pengalaman spiritual keagamaannya, sehingga tujuan pencapaian kekhusyuan bisa terwujud.

Sejalan dengan narasi dan uraian di atas, maka berbagai aturan pelaksanaan ibadah takbir di *mushalla* dan atau di *masjid* adalah sebagai berikut.

1. Dimulai setelah shalat Maghrib dan dilakukan bersama-sama oleh semua jama'ah, diselingi shalat Isya' berjama'ah, dan diteruskan kembali sampai pagi, diselingi shalat Shubuh, dan diteruskan lagi sampai shalat i'ed di mulai. Waktu untuk pembacaan takbir ied al-fithri berakhir saat imam keluar meninggalkan masjid. Sementara untuk kesempatan ied al-adlha diteruskan sampai hari-hari tasyriq setiap setelah pelaksanaan shalat fardhu, sampai shalat 'ashar di hari yang ketiga.
2. Takbir dipimpin oleh seorang imam takbir dengan kualifikasi kemampuan sebagaimana imam shalat, dan boleh bergantian memimpin takbir di antara para jama'ah yang memiliki kualifikasi untuk menjadi imam takbir,

yakni memiliki hafalan bacaan yang baik, kemampuan melafalkan bacaan dengan baik dan benar, serta memiliki legitimasi keagamaan di kalangan masyarakat, baik karena reputasi keberagamaannya maupun karena pengalaman dan senioritasnya dalam kegiatan keagamaan.

3. Bacaan takbir yang dianjurkan sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw., dan dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut.

لله أكبر , الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله الله أكبر ,  
الله أكبر ولله الحمد.

Sesekali Imam membacaca lafal takbir yang lebih lengkap dan sempurna sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw., dan dikutip oleh Imam al-Syafi'i, yakni:

الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر كبيرا والحمد لله  
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا , لا إله إلا الله ولا نعبد إلا  
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون , لا إله إلا الله  
وحدَهُ صدق وعده وتصر عبده وأعز جندَهُ وهزم الأحزاب  
وحدَهُ , لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد.

4. Membaca takbir adalah ibadah makhdlah, yakni perbuatan ibadah semata dan termasuk dalam kategori ibadah nafsiyah, yakni ibadah dengan perbuatan pengucapan lafal-lafal takbir, tahmid dan tahlil. Dengan demikian perbuatan tersebut harus dimulai dengan membaca basmallah sambil berniyat membaca takbir



sebagai perbutan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Niyat inilah yang membedakan antara perbuatan sebagai kesenangan dunia belaka dengan perbuatan ibadah sebagai wujud penghambaan manusia kepada Tuhannya. Hanya saja, perintah takbir ini adalah perintah terbuka dan cukup longgar dalam persyaratan dan tidak persyaratan suci dari hadats besar dan hadats kecil dalam pembacaan takbir ini. Kendati demikian, dalam pelaksanaan pembacaan takbir di mushalla dan masjid, harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadats besar, sebagai kewajiban untuk duduk dan berada dalam masjid, dan dianjurkan untuk suci dari hadats kecil.

5. Ketika takbir ini usai dilaksanakan, sebagai penutup dianjurkan untuk dibacakan shalawat kepada Nabi Muhammad saw., yang berbunyi:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى  
اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

6. Dalam rangka meningkatkan ta'mir mesjid serta syiar keagamaan bagi masya-rakat sekitarnya, ibadah pembacaan takbir yang dilakukan sebagai ibadah semata, sebaiknya juga untuk pengembangan syiar agama. Untuk itu, takbir di mushalla dan masjid dianjurkan untuk menggunakan loudspeaker (pengeras suara), hanya saja harus diupayakan untuk memelihara hak asasi masyarakat lain, baik sesama muslim maupun dari kalangan non-muslim, sehingga gema takbir di mushalla atau masjid tersebut tidak mengganggu kesempatan istirahat mereka. Namun demikian, sebaiknya penggunaan pengeras suara

untuk *external effect* dibatasi hanya sampai jam 22.00 malam, dan dibuka kembali jam 04.00 subuh. Kegiatan takbir selama rentang waktu antara jam 22.00 sampai jam 04.00 menggunakan loud speaker dengan internal effect, sehingga tidak mengganggu orang lain yang sedang istirahat.

7. Kegiatan pembacaan takbir adalah perbuatan ibadah ritual. Lakukanlah dengan penuh kekhusyuan, seraya menundukkan kepala bertawadlu di hadapan keagungan dan kebesaran Allah.

### C. Pola Pelaksanaan Takbir Keliling

Sebagaimana dikemukakan di atas, takbir adalah ibadah ritual bagi umat islam dalam menyempurnakan ibadah puasa serta menutupnya dengan memuji kebesaran dan keagungan Allah. Oleh sebab itu, perbuatan ibadah ini sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak mengganggu nilai ubudiahnya.

Akan tetapi, sebagaimana Abu Hanifah katakan, bahwa takbir itu bisa dilakukan di mana-mana, di rumah, di jalan, bahkan dalam praktek sejarah takbir dijadikan sebagai sarana penyaiaran Islam, dengan melakukan takbir keliling, sebagai arena penyampaian informasi tentang kultur dan kekuatan Islam. Merujuk pada fatwa fiqh dari ulama ternama itulah, serta didukung pula oleh pengalaman sejarah, maka umat Islam saat ini, khususnya mereka yang berada di kota-kota besar memiliki kebiasaan melakukan takbir keliling, khususnya saat menyambut kehadiran *ied al-fithri*. Hanya saja, dalam pelaksanaan takbir keliling dengan peserta rombongan



yang besar, berlaku hukum keramaian dan kerumunan besar, yakni semakin besar kerumunan massa, maka semakin kendor pengendalian dan semakin besar peluang melakukan pelanggaran norma hukum, susial dan bahkan norma etik keagamaan sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan takbir keliling seringkali berhadapan dengan aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengertian kamtibmas yang dikembangkan kepolisian RI sebagaimana dijabarkan dalam buku Dasar-Dasar Konseptual Pemantapan Profesionalisme POLRI (1990), adalah suatu kondisi di mana terdapat jaminan adanya rasa aman, damai lahir dan batin, perasaan bebas dari kekhawatiran dan bebas dari resiko serta terbebasnya gangguan fisik maupun psikis serta terciptanya keteraturan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku sebagai jaminan adanya kepastian, sehingga secara keseluruhan akan menimbulkan kegairahan kerja untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

Tugas POLRI untuk menjaga kamtibmas tidak terbatas hanya untuk WNI muslim, tapi seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang asal etnik, maupun agama, dan bahkan semua orang yang sedang melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia. Kompetensi pembinaan kamtibmas meliputi penegakkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, memberikan perlindungan terhadap semua warga Indonesia atau orang asing yang ada di Indonesia dari berbagai ancaman keselamatan jiwa, serta pengayoman yang dapat memberikan rasa aman, bebas dari kekhawatiran sehingga semua orang bisa melakukan aktifitas sosial, ekonomi

dan politiknya di Indonesia ini dengan penuh rasa aman, tentram dan jauh dari kekhawatiran akan adanya gangguan fisik maupun psikis.

Dimensi-dimensi kamtibmas yang menjadi tugas pengawasan POLRI antara adalah perilaku-perilaku disasosiatif yang dapat menimbulkan konflik-konflik sosial, kerusuhan dan berbagai bentuk kerawanan sosial, serta perilaku-perilaku yang bersifat patologis yang dapat menimbulkan berbagai bentuk ancaman keamanan dan ketertiban, baik berupa kriminalitas, encana atau kecelakaan. Inilah berbagai pertimbangan perpsektif keamanan dan ketertiban yang terkait dengan kultur keagamaan masyarakat muslim Jakarta, karena takbir keliling mengasosiasikan banyak orang dengan berbagai perilaku yang beragam, dan membawa potensi disasosiatif karena semakin besar kerumunan, maka akan semakin lemah pengendalian, dan semakin hilang identitas personal, sehingga setiap orang akan dengan mudah melakukan berbagai tindakan destruktif dan berbagai pelanggaran aturan hukum, etika, dan bahkan aturan-aturan susila.

Terkait dengan itu semua, kegiatan takbir keliling selayaknya dilakukan dalam koridor kegiatan keagamaan, serta mentaati berbagai aturan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai aturan normatif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Takbir keliling adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah takbir yang tetap merupakan kegiatan ibadah makhdlah dengan mengambil berbagai keuntungan dalam pengembangan syiar keagamaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan takbir keliling harus mengikuti aturan-aturan



pelaksanaan takbir sebagai sebuah ibadah nafsiyah, yakni ibadah dengan ucapan. Takbir harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan bacaan takbir baik pelafalan maupun pelantunannya serta menjaga kekhusyuan selayaknya sebuah perbuatan ibadah.

2. Bila takbir keliling itu menggunakan kendaraan bermotor maka harus dipimpin oleh seorang imam yang dapat memimpin kelompoknya membaca takbir dengan baik, benar dan tertib, serta menjaga kekhusyuan pelaksanaan ibadah sehingga citra takbir keliling sebagai sebuah perbuatan ibadah tetap terpelihara.
3. Bila takbir keliling itu tidak menggunakan kendaraan bermotor dan mereka berpawai berjalan kaki, sebaiknya diorganisir dengan baik, dipimpin oleh seorang imam kelompok yang dapat memimpin mereka membaca takbir, sehingga image kegiatan pawai tetap dalam citra kegiatan ibadah dan bukan pawai kemenangan semata.
4. Sebaiknya kegiatan takbir keliling tersebut bisa dijadikan sebagai arena festival adu kreatifitas dan keadaban. Diharapkan masing-masing pemerintah di tingkat paling bawah mampu mengorganisasikan kegiatan ini, yang tidak semata sebagai pengembangan syiar keagamaan, tapi juga ajang adu kreatifitas di antara remaja dan pemuda serta pemuda Islam.
5. Takbir keliling sebagai kegiatan keramaian yang melibatkan kerumunan masa harus ditata dan diorganisir dengan tidak melanggar aturan-aturan keamanan dan ketertiban umum.
6. Bila menggunakan kendaraan bermotor hendaknya

mengikuti aturan keselamatan berlalu lintas. Pengendara motor roda dua hendaknya memakai helm, tidak menyalib di tikungan, tidak menyalib dari sebelah kiri, dan aturan-aturan kesela-matan berlalu lintas lainnya (UULAJ No. 14/1992)

7. Bila menggunakan kendaraan bermotor roda empat, hendaknya tidak menggunakan kendaraan barang untuk penumpang, tidak berhenti di tempat larangan berhenti, tidak menyalib di tikungan, tidak menyalakan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain, serta aturan-aturan sejenis lainnya (UULAJ No.14/1992).
8. Peserta pawai atau takbir keliling tidak dibenarkan membawa bahan peledak (UU No. 12/1951), karena ledakan-ledakan kecil atau besar bisa mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain. Jika ada peserta yang dengan sengaja membawa bahan peledak harus ditertibkan terlebih dahulu oleh penanggung jawab yang memberangkatkan rombongan takbir keliling, agar tidak menimbulkan keributan serta berbagai kerawanan sosial akibat ledakan-ledakan tersebut.

#### D. Pola Pelaksanaan Takbir Akbar

Takbir akbar adalah pelaksanaan ibadah takbir yang diselenggarakan dengan bentuk acara yang meriah, dihadiri jama'ah yang sangat besar jumlahnya, serta prosesi upacara yang sarat dengan berbagai pesan keagamaan.

Takbir akbar ini menjadi bagian dari kultur keagamaan umat Islam di Jakarta, dengan menjadikan taman monumen nasional sebagai tempat pelaksanaan takbir dengan prosesi



yang amat kuat nuasan keagamaan, kekhusyuan dan kreatifitas seninya, serta dihadiri oleh para pejabat negeri, tidak saja Gubernur, tapi juga para menteri, kepala negara bahkan perwakilan beberapa negara sahabat.

Secara hukum, pelaksanaan takbir akbar ini, kendati termasuk sesuatu yang baru, namun substansi peribadatannya tidak berubah, yang berkembang hanya pada model pelaksanaannya, yakni dimensi *ta'aquly* dari perbuatan ibadah tersebut. Dengan demikian secara hukum, pelaksanaan seperti itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dan bahkan posisi hukumnya bergerak menjadi nadb atau sunah, karena ada ilat hukum yang kuat urgensi pelaksanaan takbir akbar, yakni penguatan ukhuwah islamiyah, memperbesar syiar Islam, serta memberi peluang pada umat Islam untuk merayakan kemenangannya dengan cara-cara yang terjangkau, bermanfaat dan terkendali.

Untuk menjaga ketertiban di jalan raya dalam pelaksanaan takbir ini, mengingat ribuan umat islam akan beramai-ramai menuju tempat tersebut, aparat kepolisian diberi wewenang untuk mengatur dalam koridor bahwa aturannya memberi kemudahan bagi umat islam untuk sampai menjangkau tempat upacara, aman dan terjamin keselamatannya, dan tidak ada indikasi-indikasi penghambatan.

Pelaksanaan takbir akbar cukup dikonsentrasikan di satu tempat, baik diselenggarakan oleh daerah atau pusat, karena mendiversifikasi pelaksanaan takbir akbar akan mengeliminasi kebesarannya sendiri. Padahal, penyelenggaraan takbir akbar itu diselenggarakan selain untuk pelaksanaan ibadah ritual yang dilaksanakan bersama-sama dalam kelompok yang amat

besar, juga dalam upaya membangun syiar ke-Islaman, sehingga dapat merefleksikan kebesaran Islam dan umatnya.

Kemudian panggung-panggung kreatif yang biasa menjadi bagian asesoris dari pelaksanaan takbir akbar itu sendiri, harus mampu mendukung suasana ritual, baik tampilan artikulasi seni, busana maupun etika pelaksanaan panggungnya, sehingga tidak ada sesuatu perbiuatan mafsadah yang dapat menurunkan kualitas ritual dari rangkaian perbuatan takbir tersebut yang dapat mendatangkan berbagai keuntungan mashlahah.

Sebagaimana dalam takbir keliling, para peserta takbir akbar harus mampu menjaga citra pelaksanaan takbir sebagai sebuah perbuatan ibadah, lantunan bacaan takbir harus dominan, demikian pula dengan pujian-pujian pada Allah serta ucapan-ucapan tahlil dalam berbagai variasinya. Penampilan seni Islami yang biasanya menjadi bagian integral dari prosesi takbir akbar, hendaknya tetap menjadi asesori yang tidak menggeser kegiatan utama. []



## BACAAN LANJUT

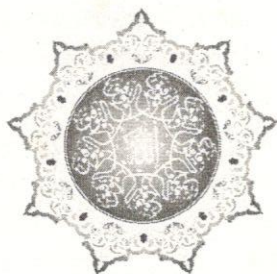
- Alusy, al, Syihabuddin Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-Adhim Wa Sabi al-Matsani*, dar al-Ihya al-Turats al-Araby, Beirut, t.th..
- Ashfahani, al, al-Raghib, *Mu'jam al-Mufahrats li al-Alfadz al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th..
- Baghdadi, al, Alauddin Ali ibn Muhammad al-Kadhim, *Tafsir al-Kadhim Kitab al-ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Dar al-Fikr, Beirut, 1974.
- Bukhari, al, Muhammad ibnu Ismail, *Matnu al-Bukhari*, Sulaiman Mar'i, Singapura, t.th..
- Jauhari, al, Thanthawi, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th..
- Kurdi, al, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalati al-'alam al-Ghuryub*, al-Haramain, Jedah, t.th..
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas POLRI di Lapangan*, Diklat POLRI, Jakarta, 1998.
- Muslim, Abu Husein, *Shahih Muslim*, Maktabah Ahmad nabhan wa aauladuhu, Surabaya, t.th..
- Munawi, al, Muhammad Abdurrauf, *Faidlul Qadir Syarh al-jami al-Shaghir*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1972.
- Naisaburi, al, Nidhamudin al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Husein al-Qumi, *Tafsir Gharaib al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1972.

- Nawawi, al, Abu Zakarya Yahya Abu al-Syaraf, *Riyadh al-Shalihin*, Dar al-Qiblah, li al-tsaqafah al-Islamiyah, Jedah, 1990.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th..
- Sanoesi, Moch., *Dasar-Dasar Konseptual Pemantapan Profesionalisme POLRI*, Jakarta, 1990.
- Thabathabai, al, Muhammad Husein, *al-Mizan fi tafsir al-Qur'an*, Muasasah al-Alami li al-mathbu'at, Beirut, 1983.
- Thabari, al, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1972.
- Zuhaili, al, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.



# REFORMULASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA





## **REFORMULASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**

Oleh: Prof. Dr. Armai Arief, MA

Pendidikan di Indonesia secara umum belum menunjukkan mutu yang memuaskan. Bila dibandingkan dengan Negara-negara lain di tingkat Asia. Berdasarkan laporan Political Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hongkong, sebagaimana dimuat dalam The Jakarta Post (Vol. 19, NO. 127: 2001), bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa mutu pendidikan nasional di Indonesia hanya berada pada peringkat ke-12 di bawah Vietnam, sedangkan peringkat pertama diraih Korea Selatan. (Syafaruddin, 2002:11).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan nasional pada umumnya. Kuatnya gejala degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini misalnya, di satu pihak merupakan problem besar yang menjadi keprihatinan segenap elemen bangsa. Akan tetapi di pihak lain, kondisi demikian juga merupakan cambuk bagi dunia pendidikan kita, khususnya pendidikan agama.

Dalam konteks ini, pendidikan agama dikatakan gagal dalam mengemban misi pelestarian nilai-nilai luhur yang bersumber dari semangat kebudayaan dan ruh keagamaan yang selama ini terpelihara. Oleh karena itu, reformulasi pendidikan agama nampaknya menjadi kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi. Sebab kalau tidak, bukan sandungan bagi laju pembangunan bangsa ke depan.

Ada banyak faktor yang menjadi catatan penting terhadap perlunya dilakukan reformulasi pendidikan agama:

- (1) Keanekaragaman bangsa Indonesia dalam berbagai aspeknya, seperti dalam hal suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (2) Krisis moral yang melanda masyarakat Indonesia yang ditandai dengan maraknya tayangan pornografi (pornoaksi), konsumsi miras (minuman keras) dan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya) di kalangan generasi muda, di samping merebaknya gaya hidup dan busana yang minimalis, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan norma-norma agama.
- (3) Globalisasi menyebabkan interaksi masyarakat dunia



secara masif, sehingga secara otomatis membutuhkan SDM yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

- (4) Kemajuan sains dan teknologi (transportasi dan informasi) telah membawa persoalan sosial yang membutuhkan penanganan yang profesional.
- (5) Pembangunan bangsa secara bersamaan membutuhkan penguatan moral dan akhlakul karimah generasi muda, sehingga pembangunan fisik dibarengi dengan pembangunan mental dan spiritual.

## Reformulasi Paradigmatik

### Pendidikan Agama Berbasis Pluralisme dan Multikulturalisme

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (nation state) yang pluralis mulai dari suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan kata lain, bangsa ini secara taken for granted menjadi bangsa yang polietnis, multiagama, multikultur; dan plural dalam berbagai aspeknya. Dalam konteks pendidikan agama, kenyataan keragaman agama seringkali tidak diperhatikan secara bijaksana. Hal ini terlihat dari pola pengajaran agama, terutama di sekolah yang lebih bersifat ideologis, ketimbang dialogis-partisipatif. Akibatnya, tidak sedikit kita jumpai sikap keberagamaan di tengah masyarakat, justru tidak berbanding lurus dengan esensi atau semangat ajaran agama yang dipelajari. Sehingga pada gilirannya, kasus pengkafiran (takfir) atau sikap antiagama lain telah begitu kuat memengaruhi paradigma beragama di tengah masyarakat. Padahal, materi pendidikan agama seharusnya ditempatkan secara seimbang antara dimensi tauhid (akidah) yang

berorientasi ke-Tuhanan, dengan dimensi muamalah yang berorientasi sosial. Sehingga, kedua dimensi tersebut dapat bermuara pada pembentukan akhlakul karimah peserta didik.

Paradigma inilah yang mesti diperhatikan dalam merumuskan materi pendidikan agama. Atau dengan kata lain, pendidikan agama sudah waktunya untuk mempertimbangkan pluralisme dan multi-kulturalisme yang sejak awal sudah menjadi identitas bangsa.

Dalam kerangka pluralisme, pendidikan agama seharusnya mampu melihat kenyataan objektif di tengah masyarakat. Hal ini untuk memungkinkan munculnya inisiatif peserta didik untuk memahami keyakinan agama secara lebih kontekstual. Kalau agama selalu menjanjikan keselamatan pemeluknya, maka dengan demikian penganut agama tentunya harus mampu menjadikan agamanya sebagai jalan keselamatan yang bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, dan keadilan di tengah komunitasnya. Dengan demikian, agama menjadi pendorong utama bagi tersosialisasikannya kebajikan yang berorientasi kemanusiaan di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya, agama sangat potensial untuk dijadikan sebagai alat legitimasi kekerasan, kepentingan politik atau konflik antar agama. Sebab, pemahaman agama yang seperti inilah yang seringkali menjadi embrio munculnya sikap fundamentalisme dan radikalisme agama di tengah masyarakat.

Oleh karena itu dalam praktiknya, pendidikan agama harus mampu membekas kesadaran peserta didik untuk melihat kenyataan akan keanekaragaman dan problem kemanusiaan yang tidak melulu dipandang dari sisi akidahnya, melainkan lebih dilihat dari cakrawala keragaman dan sisi



kemanusiaannya. Dalam konteks ini pendidikan agama memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik agar bisa menjalin kerja sama dengan orang yang beragama atau berkeyakinan lain. Sehingga, pendidikan agama menstimulasi tumbuhnya benih persaudaraan antar sesama manusia yang tidak terbatas hanya dengan satu agama saja, melainkan dengan pemeluk agama-agama lain.

Sementara di pihak lain, konteks multikulturalisme merupakan gejala umum yang tidak bisa dihindari, terlebih dengan terbukanya mobilitas penduduk yang bisa terjadi dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, bahkan dari suatu negara ke negara lain dalam bingkai globalisasi. Kesadaran multikultural dengan demikian amat penting ditanamkan kepada peserta didik semenjak dini. Sebab, beberapa kasus seperti gelombang kerusuhan anti-Cina di Jakarta, Solo, Medan, konflik antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku dan seterusnya (Will Kymlica 2003, 13) merupakan indikasi dari tidak adanya kesadaran multikultural di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama sebagai instrumen pena naman nilai-nilai dan moralitas, seharusnya mampu mendorong munculnya kesadaran multikultural bagi anak didik. Hal ini didasar karena sampai saat ini, integritas bangsa dan pilar utama pembangunan moral bangsa masih bertumpu pada ajaran agama (Zamakhshari Dhofier: 2000, 217).

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi, disinyalir karena merebaknya eksklusivisme keagamaan. Lebih parah lagi, kekerasan itu dikatakan sebagai manifestasi dari radikalisme beragama dan pada taraf tertentu merupakan tantangan bagi pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh

karena itu, amat wajar jika muncul tuduhan di tengah masyarakat bahwa krisis ekonomi, politik, serta konflik sosial yang berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, disebabkan karena kondisi moral masyarakat yang semakin rapuh. Parahnya lagi, rapuhnya moral bangsa disebabkan karena pendidikan yang diberikan para pemimpin agama kepada masyarakat bukan berupa ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan dan sekaligus kemanusiaan, melainkan lebih menekankan pada formalitas dalam menjalankan kewajiban agama. Maka, dalam keyakinan seperti ini pendidikan agama dikatakan gagal dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam membangun karakter dan moralitas bangsa.

Dengan demikian, tidak terlalu berlebihan jika pendidikan agama, terutama di sekolah-sekolah didasarkan bukan sekadar mengajarkan bagaimana mencapai tingkat ketakwaan kepada Tuhan dalam kerangka ritualitas dan kesalehan vertikal (ubudiyah), melainkan (seharusnya) bagaimana pendidikan agama juga memberikan porsi yang besar dalam memberikan pemahaman kepada anak didik untuk mencapai kesalehan sosial (horizontal). Hal inilah yang pada gilirannya memberikan kesadaran kepada anak didik, bahwa mereka hidup di tengah keragaman (pluralitas dan multikulturalitas) dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk soal keyakinan agama, etnik, suku, ras, bahasa, budaya dan seterusnya. Dengan demikian, sikap inklusif, toleran, menghargai perbedaan merupakan bagian penting dalam menjalankan perintah agama, sebagai bentuk, manifestasi dari kesalehan sosial dan sekaligus ketaatan terhadap ajaran agama.

Sementara itu, memasukkan paradigma pluralisme dan



multikulturalisme dalam pendidikan agama memang bukanlah persoalan mudah. Ini terutama karena pendidikan agama selama ini dipraktikkan tidak didasarkan pada kesadaran keberagamaan (plurality) di tengah masyarakat, melainkan pada posisioning agama sebagai ranah yang melulu berbicara sakralitas yang terlampau berdimensi ke-Tuhanan, tetapi pada saat yang bersamaan melupakan peran-peran kemanusiaan. Akibatnya; agama seringkali hanya dipahami sebagai jalan keselamatan yang kelak membawa pemeluknya pada kompensasi ukhrawi an sich.

Anggapan demikian memang tidak bisa dikatakan salah. Justru menjadi komitmen keagamaan setiap pemeluk yang mesti dipertahankan secara konsisten. Hanya saja, yang tidak boleh dilupakan adalah, bagaimana kemudian agama mendapat tempat yang layak pada tataran kemanusiaan? Ibarat cahaya lampu, agama secara universal berfungsi menerangi kegelapan. Pada saat itulah, cahaya lampu tidak memandang apa atau siapa yang menyalakan lampu, cahayanya akan menerangi benda apapun di sekitarnya, dan membantu siapapun yang membutuhkan cahayanya.

Di sinilah agama diperankan secara manusiawi, sedikit pun meminimalkan sisi sakralitas yang secara given terdapat di dalamnya. Dalam konteks ini, agama betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, yang tidak hanya menimbulkan efek positif bagi pemeluknya, tetapi juga secara bersamaan berimbas positif secara sosial dan kemanusiaan pada umumnya. Dengan demikian agama kemudian bukan hanya ditempatkan di balik tembok-tembok tempat peribadatan, tetapi justru menjadi potensi modal sosial yang begitu besar akan memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan dan

terutama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama (common good) di tengah masyarakat yang majemuk.

Reformulasi pendidikan agama dalam kerangka demikian paling kurang didasarkan pada dua alasan, yaitu: Pertama, mengembalikan fungsi agama sebagaimana mestinya. Dalam pengertian, menempatkan agama pada ranah ke-Tuhanan dan sekaligus ranah sosial dan kemanusiaan. Sehingga, dari sini agama kemudian secara bersamaan mampu menyemai kesalehan religius secara personal dan kesalehan sosial sekaligus, utamanya utamanya dalam memperkuat persaudaraan antarsesama manusia, baik dalam bingkai ke Indonesiaan maupun kemanusiaan secara umum. Kedua, dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup dalam bingkai keragaman (plurality). Sebab, bagaimanapun juga keragaman dalam pelbagai dimensinya merupakan denyut nadi kehidupan berbangsa di negeri ini. Sehingga dengan pijakan demikian, hal itu pada gilirannya akan memunculkan sikap penghargaan yang proporsional terhadap keragaman lokalitas dalam bingkai kebangsaan.

Keragaman (termasuk agama) bukanlah alasan untuk tidak terjalinnya kerja sama dalam mengatasi problem kebangsaan, tentu saja termasuk yang paling mutakhir adalah krisis multidimensi. Untuk menuju tercapainya idealitas tersebut, maka paradigma pendidikan agama yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme dalam pengertian di atas, tentu saja tidak cukup berhenti pada level wacana. Tetapi perlu lebih dikonkretisasi menjadi sebuah cetak biru (blue print) yang secara bertahap dapat dilaksanakan. Maka, di sinilah reformulasi paradigmatis secara bersamaan harus diikuti dengan adanya reformulasi sistemik.



## Reformulasi Sistemik

Pendidikan bagaimanapun merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bertautan satu sama lain, di mana dari keseluruhan komponen tersebut berproses menuju pada pencapaian tujuan (the goals), yaitu secara umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembentukan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa (baca: Mukadimah UUD 1945). Pengertian sistem dalam konteks ini paling tidak dikemukakan oleh Shrode dan Voich (1974), bahwa sistem merupakan suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole composed of several parts). Sedangkan menurut Awad (1979: 4), sistem merupakan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (an organized, functioning relationship among units or components) (Drs. Tatang M. Amirin, 1996: 1).

Dalam konteks reformulasi pendidikan agama, sistem dipahami sebagai unsur-unsur atau unit-unit institusional bagi berlangsungnya pendidikan agama. Oleh karena itu, di sini sekurang-kurangnya ada empat unit institusional yang sangat berpengaruh secara determinan terhadap efektivitas pendidikan agama, yaitu: (1) unit keluarga, (2) unit sekolah, (3) unit masyarakat, dan (4) unit pemerintah.

*Pertama*, keluarga merupakan landasan pacu paling penting terhadap berlangsungnya pendidikan agama bagi setiap peserta didik, bahkan semua orang. Begitu utamanya peran keluarga, hingga karakter dan perilaku seseorang pun pada awalnya dibentuk oleh laboratorium yang bernama keluarga. Oleh karena itu, dengan menyadari pentingnya peran keluarga dalam pembentukan akhlak dan moralitas

anak didik, maka reformulasi di sini lebih menitikberatkan pada menguatnya kesadaran para orang tua untuk menciptakan iklim interaksi keluarga yang bersahabat, menyenangkan, dan nyaman. Lingkungan keluarga seperti ini, tentu saja tanpa sedikit pun memudahkan warna kesantunan dan akhlakul karimah yang tercipta di lingkungan keluarga. Sebab, meski dengan pola pendekatan yang egaliter dan demokratis, tetapi hal ini tidak merendahkan status orang tua sebagai orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Bahkan, justru hal itu tetap berpijak pada norma-norma agama dan kesalehan tradisi kultural yang berlaku bagi komunitasnya. Lebih dari itu, penerapan model pendidikan keluarga yang demokratis, sekaligus menempatkan keluarga sebagai tempat bermain yang paling menyenangkan bagi anak-anak, pada gilirannya menimbulkan kebebasan yang positif dan membangun, terutama dalam menentukan pilihan prinsip hidup, aktualisasi diri, dan berkembangnya kreativitas anak didik.

*Kedua*, dalam proses pendidikan agama, sekolah secara fungsional menempati urutan kedua setelah keluarga. Di sini sekolah bukan hanya dilihat dari sisi sistem yang terdiri dari manajemen, organisasi, anggota organisasi sekolah itu sendiri, seperti kepada sekolah, para guru, karyawan, pada siswa, melainkan yang tidak kalah penting lagi adalah sisi relationship (hubungan) dan pola komunikasi (mode of communication) di antara orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, seperti hubungan antar-sesama guru, hubungan antara guru dan murid, dan hubungan pergaulan antarsiswa. Di sinilah kemudian, reformulasi dimaksudkan untuk menonjolkan aspek keteladanan (uswatun hasanah),



terutama yang ditampilkan oleh kepala sekolah dan para pendidik.

Dalam konteks pendidikan agama, hal ini amat penting. Begitu pentingnya, sampai bisa jadi aspek keteledanan, terutama yang diperankan oleh guru agama, menjadi prioritas yang harus dikembangkan di sekolah-sekolah. Di atas keteladanan, tentu saja prasyarat kapabilitas keilmuan dan profesionalisme guru agama terlebih dahulu sudah terpenuhi. Untuk persoalan kapabilitas keilmuan atau penguasaan materi dan profesionalisme, barangkali bisa ditanggulangi dengan dilakukannya berbagai kegiatan pelatihan. Berbeda halnya dengan yang terakhir ini, aspek keteladanan tidak cukup hanya dengan diselenggarakannya pelatihan atau kegiatan-kegiatan. penguatan kapasitas yang sifatnya temporer lainnya. Sebab, keteladanan menyangkut latar belakang hidup, moralitas dan perilaku keseharian sang guru. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya kesadaran para guru, terutama guru agama untuk memosisikan dirinya sebagai figur yang dituntut memberikan contoh-contoh positif bagi anak didiknya, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan interaksinya di tengah masyarakat.

*Ketiga*, masyarakat. Berbeda halnya dengan keluarga dan sekolah yang ruang lingkungannya relatif kecil, masyarakat merupakan faktor institusional yang paling sulit untuk dikontrol, apalagi dikendalikan. Perkembangan dan dinamikanya seringkali melampaui apa yang kita pikirkan sebelumnya. Maka wajar, dalam perdebatan sosiologi terdapat tarik menarik yang begitu kuat antara dua teori besar yang bertentangan satu sama lain, yaitu antara penganut Weberian dan Durkheimian. Satu teori berasumsi, bahwa

masyarakat dibentuk dan dipengaruhi oleh individu. Sementara teori lain beranggapan, justru individu yang dipengaruhi oleh masyarakat (baca: George Ritzer dan Douglas J. Goodman/2004).

Terlebih dari perbedaan sosiologi tersebut, dalam tulisan ini berasumsi, bahwa di samping individu itu dipengaruhi oleh masyarakat, ia juga memengaruhi masyarakat. Di samping itu, individu secara karakter dan perilaku dibentuk oleh masyarakat, secara bersamaan ia juga membentuk iklim dan bangunan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, peran-peran sentral dan edukatif yang dimainkan misalnya oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, atau kepala suku menjadi *entry point* bagi terciptanya konsensus-konsensus atau konvensi sosial yang berlaku di tengah masyarakat tersebut, baik menyangkut pembentukan watak individu sebagai anggota masyarakat, maupun perilaku sosial.

Nilai atau norma-norma yang berlaku tersebut bisa jadi bersumber dari kearifan tradisi-kultural atau ajaran agama, bahkan dimungkinkan sebagai kombinasi antara keduanya. Sehingga reformulasi pendidikan agama mengandaikan adanya penguatan terhadap diberlakukannya konsensus-konsensus atau konvensi sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut.

*Keeempat*, pemerintah. Secara umum, peran pemerintah (pusat/propinsi/kabupaten kota) terhadap berlangsungnya pendidikan agama bertumpu pada aspek perundang-undangan dan kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu diwujudkan melalui pemberlakuan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Kurikulum 2004 yang berorientasi pada pembekalan *life skill* bagi peserta didik, dan sederetan



kebijakan lainnya. Terlebih, berbagai kebijakan tersebut bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional, termasuk tentu saja menyangkut pendidikan agama.

Dalam konteks reformulasi pendidikan agama, paling tidak ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (1). Debirokratisasi pendidikan yang dilakukan secara nasional, mulai dari level makro (nasional), meso (regional) yang terdiri dari tingkatan provinsi, sampai kabupaten/kota, serta pada level makro (sekolah). Hal ini dimaksudkan agar rantai birokrasi tidak terlalu panjang. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara langsung menyentuh sasaran. Di samping, secara antisipatif mengurangi tingkat kebocoran atau mark up dana-dana pendidikan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan program.
- (2). Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendidikan (sekolah/madrasah). Dalam konteks MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), hal ini dilakukan dengan memaksimalkan peranan dan fungsi kontrol yang dimainkan oleh dewan sekolah (level institusional), dan komite pendidikan (provinsi/kabupaten/kota).
- (3). Meningkatkan kapabilitas keilmuan (penguasaan materi) dan profesionalitas kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi melalui program pengembangan dan pelatihan (training and development), baik yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat melalui dewan sekolah, lembaga pendidikan, komite pendidikan, maupun pejabat pendidikan, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten atau kota. Di sinilah, upaya meningkatkan mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

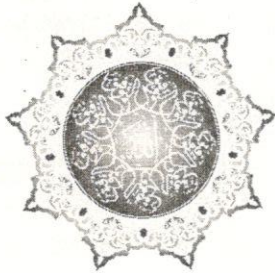
tetapi seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pendidikan menjadi agenda yang dipikul bersama.

Pendidikan dengan demikian adalah upaya pencerdasan bangsa yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat (educational for all), hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas lokal (potensi daerah, termasuk pemenuhan dana pendidikan) dan pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, melalui kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan (policy maker), pemerintah seharusnya melihat potensi ini secara jeli. Sehingga, kebijakan pendidikan yang dirancang adalah kebijakan yang mampu menstimulasi tumbuhnya partisipasi dan peran-peran strategis yang secara langsung dilakukan komunitas. Bukan sebaliknya, dengan meminimalkan peran langsung masyarakat atau birokrasi pendidikan yang terlalu panjang.[]



# NILAI ETIK DALAM MASYARAKAT MADANI





## **NILAI ETIK DALAM MASYARAKAT MADANI (Tauhid Sebagai Prinsip Etik)**

Oleh : H. M. Ali Umri, SH, MKn.

### **Pendahuluan**

**L**iberalisme dan sosialisme ternyata telah gagal dalam mempertahankan keimanan bangsa yang merupakan asas eksistensinya di muka bumi. Yaitu keimanan kepada Allah, kepada risalah-risalah-Nya dan kepada hisab (perhitungan)-Nya di akhirat. Sehingga nilai-nilai agama di dalam jiwa kebanyakan manusia menjadi goyah dan di dalam jiwanya mengalir sikap keraguan dan ketidakpercayaan yang kemudian melahirkan kesesatan, kefasikan dan kedurhakaan” (Al-Qardhawi, 1985:9).

Fenomena di atas mungkin saja semakin menyebar dalam perilaku bermasyarakat dan berbangsa. Diakui bahwa bentuk

penyembahan manusia terhadap berhala, batu-batu dan patung-patung sebagai Tuhan hampir tidak ada lagi, karena kecerdasan manusia yang semakin meningkat. Namun pergeseran nilai-nilai sedang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Banyak manusia yang menempatkan paham materialisme, dan paganisme menjadi sesuatu yang diutamakan hampir dalam setiap perilaku. Ukuran kebahagiaan terletak pada materi kekayaan yang banyak. Kecendrungan pada konsumerisme, kehidupan bermewah-mewah tanpa peduli pada masyarakat lemah di sekitar. Banyak pula yang terjun ke dunia berpolitik, hanya sekedar mencari kekuasaan sesaat dengan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit pula yang mencari limpahan kekayaan dengan mengubur prinsip perbedaan halal dan haram. Bahkan banyak pula yang mungkin mengabaikan nilai keagamaan pada perilaku sosial dan kehidupan sehari-hari.

Fenomena manusia dewasa ini cenderung menghambakan diri pada materi dan memperturutkan hawa nafsu. Perilaku serakah seakan menjadi barang berharga yang dipelihara banyak orang. Timbul soal, benarkah pengamalan religius kita masih berakar pada tauhid yang diajarkan Islam? Benarkah kesalehan kita masih mengakar pada akhlak Islam. Ataupun kita sudah sampai kepada kegersangan spiritual yang lepas dari pilar tauhid yang membebaskan dari ketakutan duniawi. Tentu saja hanya dengan etik tauhid, manusia akan bebas dari ketakutan pada makhluk. Berbasis pada nilai tauhid membuat manusia hanya takut dan berharap kepada Allah SWT? Ketakutan yang menuntun kepada kebenaran dan kebahagiaan.



## Tauhid dan Humanisme

*Tauhid* menegaskan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dengan tujuan untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Kepatuhan kepada Tuhan dan ketaatan pada perintah-Nya itulah yang menjadi *raison d'être* manusia. *Tauhid* juga menegaskan bahwa tujuan ini mencakup tugas manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (Al-Faruqi, 1988:61). Mengacu kepada Al-Qur'an, Tuhan telah memberikan amanat-Nya kepada manusia, suatu amanat yang mereka hindari dengan penuh ketakutan. Amanat atau kepercayaan Ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak Ilahi, yang sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus direalisasikan dengan kemerdekaan memilih, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya.

Manakala kehendak Ilahi direalisasikan melalui hukum alam, realisasi tersebut tidaklah bersifat moral, melainkan elemental atau utiliter. Atau dalam bahasa Al-qur'an ia bersifat *karhan*. Hanya manusia yang mampu merealisasikannya dengan kemungkinan dia melaksanakan atau tidak melaksanakannya sama sekali yang dalam literatur penciptaan ia bersifat *thau'an*. Itu perilaku bernilai moral. Justru ada pula yang melakukan sebaliknya. Tidak jarang yang melakukannya setengah-setengah. Karena manusia memiliki kemerdekaan dalam mematuhi perintah Tuhan, maka kebebasan memilih ini pula lah yang menjadikan pemenuhan perintah Allah oleh manusia bersifat moral.

Tauhid mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan, dengan sifat-Nya yang belas-kasih dan sangat terencana, tidaklah menciptakan manusia untuk main-main, atau dengan sia-sia.

Dia telah menganugerahkan panca-inderanya, akal dan pemahaman, yang membuatnya sempurna. Bahkan meniupkan ke dalam diri manusia ruh-Nya dengan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas besar manusia (QS,32:9). Tauhid adalah ajaran akidah yang paling fundamental dalam sistem ajaran Islam. Di sisi lain, setiap anak yang lahir dengan kemurnian fitrahnya, harus dibimbing, diarahkan dan dikembangkan kemampuan pendidikan keimanannya sejak dari usia dini.

Anshari (1984:24), berpendapat bahwa akidah secara etimologi berarti *ikatan*, *sangkutan*, secara teknis berarti dalam arkanul Islam (rukun Islam yang enam) yaitu *kepercayaan*, *keyakinan*, *iman*, *creed*, *credo*. Pembahasan akidah Islam tercakup: (1) iman kepada Allah, (2) iman kepada malaikat-malaikat-Nya, (3) iman kepada kitab-kitab-Nya, (4) iman kepada rasul-rasul-Nya, (5) iman kepada hari akhirat, dan (6) iman kepada qadha dan qadar.

Mengesakan Allah dalam ibadah, ketundukan, tawakkal dan memohon pertolongan-Nya adalah hakikat tauhid. Ada dua macam tauhid, yaitu: tauhid *Rububiyah*, dan tauhid *Uluhiyah*. Pengakuan dan keyakinan tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada Khaliq, tidak ada pemberi rezeki melainkan Allah semata. Dialah Yang menciptakan langit dan bumi serta yang menguasainya. Adapun tauhid *Uluhiyah* ialah menyembah Allah, tidak memohon pertolongan, tidak berdo'a, tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah semata. Karena tauhid inilah Allah menurunkan kitab-kitab-Nya, mengutus rasul-rasul-Nya, agar para rasul mengajak kaumnya kepada tauhid ini (Qardhawi, 1999:262).

Menghayati penciptaan diri manusia, sisi utama



pengajaran tauhid kepada dirinya. Tugas besar tersebut adalah alasan diciptakannya manusia. Ia adalah tujuan akhir eksistensi manusia, definisi manusia dan makna hidup dan eksistensinya di bumi. Karena itu, manusia memiliki fungsi kosmik yang sangat penting. Kosmos tidak akan menjadi kosmos tanpa adanya bagian yang lebih tinggi dari kehendak Ilahi, yang merupakan obyek usaha moral manusia. Dan tidak ada makhluk lain di kosmos yang diketahui dapat menggantikan manusia dalam fungsi ini. Jika manusia dikatakan sebagai "puncak penciptaan", itu dikarenakan alasan berikut, yakni bahwa melalui usaha dan tindakan etisnya, manusia menjadi satu-satunya jembatan kosmik melalui unsur moral yang merupakan unsur yang lebih tinggi, memasuki dunia ruang waktu dan menjadi sejarah.

Tanggung jawab atau kewajiban (*taklif*) yang dibebankan pada manusia ini sama sekali tidak mengenal batas, sepanjang menyangkut jangkauan dan ruang tindakannya yang mungkin. Ia mencakup seluruh alam semesta. Seluruh umat manusia merupakan obyek tindakan moral manusia. Seluruh bumi dan langit adalah panggunanya, bahan yang harus diolahnya. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di alam raya. Bahkan dalam setiap sudut alam yang paling jauh pun. Karena *taklif* atau kewajiban manusia bersifat universal dan kosmik. Ia hanya berakhir pada Hari Kiamat.

*Taklif* adalah landasan bagi kemanusiaan untuk mewujudkan nilai manusia, makna kemanusiaannya. Penerimaan manusia atas beban ini menempatkan manusia pada derajat yang lebih tinggi terbanding kepada semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Bahkan lebih tinggi dari malaikat. Karena manusia memiliki kemampuan melakukan-

nya. Taklif adalah makna kosmik manusia. Suatu perbedaan yang sangat signifikan yang memisahkan humanisme Islam dari humanisme-humanisme lainnya.

Meminjam pendapat Al-Faruqi (1988), dalam tinjauan historis ternyata peradaban Yunani mengembangkan ajaran humanisme yang kuat yang kemudian diambil oleh dunia Barat sebagai model sejak masa Renaisans. Sedangkan peradaban Yunani tersebut dibangun di atas dasar landasan naturalisme yang berlebihan, humanisme yang mendewakan manusia dengan segala perilaku kejinya sekaligus. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yunani tidak merasa hina menampilkan dewa-dewa mereka dalam keadaan menipu dan berkomplot melawan satu sama lainnya, atau berbuat zina, mencuri, mengawini saudara sendiri, melakukan agresi, cemburu dan membalas dendam, dan tindak-tanduk kekerasan lainnya.

Karena itu dianggap merupakan bagian dari bahan yang sama yang membentuk kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan dan nafsu-nafsu semacam itu dianggap alamiah, wajar, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dan kebajikan-kebajikan. Sebagai unsur alam, tindakan-tindakan tersebut dianggap sama sucinya, patut direnungkan dalam bentuk estetikanya, patut dikagumi dan diteladani oleh manusia yang menganggap mereka sebagai idola yang sempurna.

Sementara agama Kristen, dalam masa-masa pembentukannya memberikan reaksi keras terhadap humanisme Yunani-Romawi. Ia melangkah ke arah yang sebaliknya dengan merendahkan manusia melalui doktrin *dosa warisan* dan menyatakannya sebagai *makhluk yang terjatuh*, suatu *masa peccata*. Tindakan merendahkan manusia ke tingkat berdosa



yang mutlak, universal dan terbawa sejak lahir dari mana manusia tidak bisa bangkit dengan usahanya sendiri, merupakan prasyarat logis jika Tuhan yang Maha Tinggi harus berinkarnasi, menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Dengan kata lain, jika penebusan harus dilakukan oleh Tuhan sendiri, maka harus ada nestapa yang demikian mutlak sifatnya hingga hanya Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan manusia daripadanya. *Dus*, dosa manusia dimutlakkan untuk membuatnya “layak” ditebus oleh Penyaliban Tuhan.

Sementara agama Hindu menggolongkan umat manusia ke dalam kasta-kasta dan menempatkan manusia dalam sekat sekat tingkat kehormatan. Ada yang tak boleh disentuh dan sebagainya. Bagi golongan yang paling rendah dan juga bagi golongan-golongan yang lain, tidak ada kemungkinan untuk naik ke kasta yang lebih tinggi. Brahma terjadi sesudah kematian melalui perpindahan jiwa. Dalam hidup ini, manusia dengan sendirinya termasuk dalam kasta di mana dia dilahirkan. Perjuangan etis tidak akan mendatangkan hasil sama sekali bagi pelakunya selama dia masih hidup di dunia ini. Akhirnya, agama Hindu Budha memandang seluruh kehidupan manusia dan kehidupan makhluk di alam semesta ini sebagai penderitaan dan kesengsaraan yang tak ada habisnya. Eksistensi itu sendiri, menurut ajarannya, adalah jahat dan satu-satunya tugas manusia yang berarti adalah membebaskan dirinya melalui disiplin dan upaya mental.

Berbeda halnya dengan *humanisme tauhid* yang murni. Hanya dengan kekokohan ajaran tauhid maka manusia menghormati manusia lainnya sebagai manusia dan makhluk Allah sekaligus. Tidak ada unsur pendewaan manusia atau

menghinakannya. Ajaran tauhid sejalan dengan definisi bahwa kelebihan manusia ada dalam batasan kebajikan-kebajikannya, dan memulai penilaiannya atas manusia dengan nilai positif berdasarkan anugerah bawaan lahir yang telah diberikan Tuhan kepada semua manusia sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas mulia.

Dalam Islam, etika tak dapat dipisahkan dari agama dan dibangun sepenuhnya di atas ajaran agamanya. Islam tidak mengenal pasangan kata yang bertentangan seperti “religius-sekuler”, dan bahasa Arab, bahasa Islam, tidak punya padanan bagi istilah-istilah tersebut. Prinsip pertama pengetahuan Islam adalah kesatuan kebenaran, sebagaimana hanya prinsip pertama kehidupan manusia adalah kesatuan *persona*, dan prinsip pertama realitas adalah keesaan Tuhan. Ketiga kesatuan ini merupakan aspek-aspek, dan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Kesatuan ini adalah prinsip tertinggi. Eksistensi Tuhan bukanlah masalah dalam Islam. Islam dengan benar telah menyatakan bahwa manusia sesungguhnya adalah *homo religious*, makhluk yang kesadarannya berfokus kepada kehadiran Tuhan yang bersifat sentral.

## Tujuan Penciptaan Manusia

Manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, atau penciptaan tanpa tujuan. Karena itu, etika Islam diawali dengan penentuan tujuan Ilahi dalam proses penciptaan manusia. Apakah *raison d’etre*nya? Apakah tujuan penciptaannya, tujuan hidup dan tujuan kesejarahannya?

Dengan menggunakan terminologi keagamaan dan juga terminologi Semit kuno, Islam menyatakan bahwan manusia



diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an; "Dan tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku (QS.51:56). Dalam pengertian filosofis, ini berarti bahwa tujuan eksistensi manusia adalah realisasi kehendak Ilahi yang bersifat teologis dengan melengkapinya dengan perangkat lengkap dan nilai-nilai. Apakah makna hidup manusia adalah heroisme, kesucian ataukah mengejar kesenangan belaka, adalah soal lain.

Sesungguhnya, pertanyaan itu sendiri tidak bisa dikemukakan tanpa memberi jawaban yang positif terhadap pertanyaan yang pertama, yaitu bahwa hidup ini mempunyai makna atau kebaikan (QS.3:191). Makna atau kebaikan itulah yang merupakan tujuan semua ciptaan. Menurut Islam disebut pemenuhan kehendak Ilahi. Sementara pemenuhan tersebut terjadi dengan sendirinya sejalan dengan keteraturan hukum alam. Maka ia terjadi dalam diri manusia dengan sendirinya seperti dalam fungsi-fungsi fisiologis dan psikis; dan juga secara bebas, seperti dalam fungsi etika.

Fungsi-fungsi etika merealisasi nilai-nilai moral dan nilai-nilai moral ini merupakan kandungan dunia yang lebih tinggi, ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dari kehendak Ilahi. Kehendak Ilahi mencakup ketentuan-ketentuan dari tatanan yang lebih rendah, misalnya makanan, pertumbuhan, perumahan, kenyamanan, seks, dan sebagainya. Karena segala sesuatu dalam ciptaan mengambil bagian dalam tujuan-tujuan Ilahi; dan untuk memenuhi tujuan-tujuan itu, dalam tatanan hirarkis yang sesuai dengannya, manusia merealisasikan kehendak Ilahi. Tetapi misinya dibidang moral di mana pemenuhan kehendak Ilahi dapat terjadi hanya dengan

kemerdekaan; yaitu adanya hak memilih bagi manusia untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah. Dalam pengertian inilah dia menjadi wakil Tuhan di bumi; karena hanya dia yang dapat merealisasi nilai-nilai etika, yang merupakan nilai-nilai yang lebih tinggi dari kehendak Ilahi, dan hanya dia yang dapat mengemban, dan merealisasikan seluruh bidang tersebut dalam totalitasnya. Dengan demikian dia menjadi semacam jembatan kosmik lewat mana kehendak Ilahi, dalam totalitasnya dan terutama unsur etikanya, dapat memasuki ruang dan waktu, dan menjadi aktual.

Dalam suatu penggalan Al-Qur'an yang sangat dramatis dan mengesankan, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia telah menawarkan amanat-Nya kepada langit dan bumi, tetapi mereka tidak berani menerimanya; bahwa hanya manusialah yang mau menerimanya. Al-Qur'an juga menceritakan kepada kita di bagian lain bahwa para malaikat berkeberatan atas rencana Tuhan untuk menciptakan manusia, karena tahu bahwa manusia suka dan mampu berbuat kejahatan, sedang mereka tidak (QS.2:30-31). Tetapi, Tuhan menolak keberatan mereka dan menetapkan bagi manusia derajat yang luhur. Dalam ekonomi kosmik, kemampuan manusia untuk melakukan kejahatan memang merupakan risiko. Tetapi risiko ini tidaklah seberapa besar dibandingkan dengan harapan besar yang mungkin bisa dipenuhinya jika dia diberi kemerdekaan untuk menciptakan kemakmuran dan budaya. Apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah bahwa hanya manusia yang dapat merealisasi nilai etis, sebab hanya dia yang memiliki kemerdekaan yang diperlukan untuk itu; bahwa hanya dia yang dapat mengupayakan totalitas nilai karena hanya dia yang memiliki pikiran dan



wawasan yang dibutuhkan oleh upaya tersebut. Ketika menciptakannya, Tuhan memberinya kebijaksanaan, membuktikan dirinya lebih unggul dibanding para malaikat dan memerintah yang disebut terakhir ini untuk bersujud menghormatinya. Maka tidaklah mengherankan bahwa dalam Islam manusia dianggap sebagai puncak ciptaan, lebih tinggi dibanding para malaikat, persis dikarenakan kedudukan etis dan martabatnya yang unik.

### Kesucian Manusia

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci, dan menyusun drama kehidupannya sesudah kelahirannya, dan bukan selamanya. Tak peduli di lingkungan keluarga dan masyarakat macam apa dia dilahirkan, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Islam menyangkal setiap gagasan mengenai dosa asal, dosa warisan, tanggung jawab penebusan, dan keterlibatan kesukuan, nasional atau internasional seseorang dalam peristiwa-peristiwa sebelum kelahirannya (QS.17:70). Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, demikian Islam menegaskan, dengan mendasarkan posisinya pada otonomi dan individualitas mutlak manusia. Tak seorang manusia pun, demikian dinyatakan oleh Al-Qur'an, yang akan menanggung beban kecuali bebannya sendiri. Baginya sendirilah segala sesuatu yang secara pribadi telah diusahakannya, baik kebaikan ataupun kejahatan. Tak seorang pun akan menerima penilaian atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dan tak seorang pun yang bisa menjadi perantara atas nama orang lain. Islam mendefinisikan tanggung jawab manusia semata-mata dalam batas-batas perbuatan-perbuatannya sendiri dan

mendefinisikan perbuatan (*'amal*) sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia dewasa yang waras, sehat jasmaninya, sabar dan atas kemauan, sendiri, dalam ruang dan waktu. Bahwa rasa bersalah dan tanggung jawab adalah kategori-kategori etika dan hanya diterapkan jika suatu perbuatan dilakukan secara bebas dan sadar merupakan suatu "data konkrit" (*hard datum*) dari kesadaran etis.

Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia tidak bertanggung jawab melebihi dari apa yang dapat dipikunya. Ketentuan alam adalah sesuai dengan kesucian manusia dan tidak bisa dijadikan landasan yang sah untuk menuduhkan kejahatan. Sebab, tanggung jawab etis setaraf dengan kemampuan untuk menggunakan secara terkontrol peralatan-peralatan alamiah seseorang dengan maksud mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kesadaran. Di mana tidak ada kemampuan, tidak ada pula kemerdekaan, dan dengan demikian tidak ada tanggung jawab dan kesalahan. Para pendukung modern dosa asal sering menggunakan anugerah alam sebagai pembenaran bagi teori mereka. Argumen mereka yang paling umum adalah: Perhatikanlah sifat berorientasi pada diri sendiri dari seorang bayi yang baru lahir, apa lagi pada orang dewasa.

### Manusia sebagai Citra Tuhan: Menuju Masyarakat Religius

Manusia, demikian dinyatakan oleh Al-Qur'an, diciptakan menurut citra Tuhan. Islam tidak mengakui asumsi-asumsi ini dan dengan demikian dapat menganggap setiap manusia di setiap waktu sebagai perwujudan citra Ilahi. Menyadari setiap manusia adalah makhluk Allah yang



dihormati. Dengan menghargai orang berarti menghargai diri sendiri, dan memuliakan Allah sebagai Maha Pencipta. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an, Surat Al-Isra' : 70."mengenai kemuliaan manusia di hadapan Allah: "Dan sungguh Kami telah memuliakan keturunan Adam, dan Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, serta Kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Menghargai manusia dari berbagai etnik, suku, golongan dan agama berarti menggambarkan ketaqwaan manusia. Karena pengakuan tegas tentang penciptaan manusia dari berbagai suku, kelompok dan bangsa adalah merupakan pernyataan tegas tentang penghormatan kemanusiaan. Sehubungan dengan menghormati hak azasi individu, firman Allah surat An-Nuur: 27-28, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah masuki rumah yang bukan rumahmu, sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, supaya kamu memperoleh pengajaran. Maka jika kamu tidak menemui seseorang pun didalamnya, maka janganlah kamu memasukinya, sehingga diizinkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu "kembalilah", hendaklah kamu kembali, yang demikian itu lebih baik bagi kamu".

Menyadari bahwa pembunuhan dan bunuh diri adalah terlarang dan berakibat besar sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah : 32 ;. "Karena itu Kami tetapkan kepada Bani Israil bahwa sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena hukuman pembunuhan, atau berbuat bencana di muka bumi, maka seakan dia membunuh

manusia sekalian. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan dia memelihara kehidupan manusia sekalian.

Untuk itu interaksi dan berintegrasi secara baik-baik merupakan etika religius bersumber dari al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 83 : "Bertuturlah menghadapi manusia dengan baik-baik".

Keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dapat ditandai dari terhindarnya seseorang dari segala yang mengancam, atau merusak kehidupan seperti; keaniayaan, ketidakadilan, musibah, siksaan Tuhan, huru-hara dan segala macam bencana lainnya. Kebahagiaan yang pertama diberikan Tuhan kepada manusia disebabkan seseorang beriman, bertaqwa, beribadah. Sementara keselamatan dan kebahagiaan kedua adalah di akhirat dengan terhindarnya manusia dari siksaan dan memperoleh ganjaran pahala dari Tuhan. Konsep kebahagiaan yang pertama dapat dinamakan kesehatan mental yang banyak diungkapkan dalam Al-qur'an dan hadis dalam terminologi kebahagiaan (*sa'adah*), keselamatan (*najat*), kejayaan (*fauz*), dan kemakmuran (*falah*) (Langgulung, 1986:288).

### Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Asas Kemaslahatan

Umat Islam di Indonesia adalah yang kuantitasnya paling banyak. Bahkan termasuk yang umat Islam terbesar di dunia. Haruskah kita terus menerus asyik dengan jumlah, lalu lupa menyiapkan diri sesuai cita ideal umat yang ditegaskan al-qur'an sebagai umat terbaik (QS.3:104)?



Pada abad ke-21 ini, kekuatan doktrin dan pesan Islam haruslah disertai oleh proses pemantapan jati diri umat hingga tidak lagi gamang dalam meramu dan menancapkan pilar-pilar peradaban Islam yang lebih segar dan lebih utuh pada masa-masa yang akan datang (Ma'arif, 1997:vii). Lebih jauh dijelaskan bahwa dosa-dosa sejarah berupa hancurnya persaudaraan umat di masa lampau, munculnya kepongahan suku/etnik tertentu harus dihapus selama-lamanya. Bangsa ini hanya maju jika dibangun bersama. Jika kita bersama, semua akan dapat diatasi.

Keragaman bangsa dan etnis adalah ciptaan Allah untuk saling menghormati dan memupuk pengenalan. Allah secara tegas menjelaskan fakta penciptaan manusia secara komunitas bangsa sesuai surat al-Hujarat ayat 13: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"*.

Untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, membangun secara baik dan beretika hendaklah dengan penuh kearifan dan sifat santun. Firman Allah dalam surat An Nahal ayat 125, yang artinya: *"Berkomunikasi dan berdialog secara baik-baik. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan dengan pengajaran yang baik. Dan hendaklah berdialog dengan cara-cara yang lebih baik."* Tidak menghina antar kepercayaan yang berbeda sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-An'am : 108 *"Dan janganlah kamu mencerca sesembahan yang mereka sembah bukan kepada Allah, maka mereka akan mencerca Allah dengan permusuhan tanpa didasari pengetahuan"*. Untuk itu kehidupan berbangsa harus menjauhi bujukan dan pemaksaan dalam beragama. Dalam Islam hal ini tegas

diungkapkan dalam surat - Al-baqarah ayat 256 : *"Tidak ada paksaan dalam agama, karena telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah"*.

Berlaku adil terhadap sesama manusia. Ajaran yang paling fundamental dalam Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perilaku adil anatar sesama. Indikator adil yang pertama itu adalah adanya kelompok yang lebih banyak melindungi dan menghagai yang kecil. Firman Allah alam surat Al-Maidah ayat 8 : *"Hai sekalian orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali karena kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa"*.

### Etika Kehidupan Bernegara

Berapakah atau pernahkah terpikir oleh manusia bahwa bumi tempat ia bernaung dan mencari nafkah diciptakan oleh Allah terhampar (dirasakan). Padahal sepanjang kenyataannya bumi itu bulat bagaikan telur. Berjalanlah ke arah ufuk barat atau timur sejauh yang kita mau. Tetap saja dirasakan bumi itu terhampar bagaikan tikar. Keajaiban tersebut semestinya menggoda kesadaran manusia untuk kerja keras membangun kesejahteraan. Karena Allah menyediakan bumi dan langit yang dibentangkan untuk manusia, agar manusia itu mudah menanggung rezeki yang diperlukan untuk kesejahteraan diri dan keluarganya. Firman Allah dalam surat Hud ayat 11: *"Allah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu untuk memakmurkannya..."*. Karena itu, bagi kita umat Islam, haruslah menciptakan negeri yang baik yang



berdasar azas ketuhanan. Firman Allah surat Saba' ayat 15: *"Makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhan-mu, dan bersyukurlah kepada-Nya. Inilah negeri yang baik dan Tuhan yang maha pengampun"*.

Terambil dari ayat diatas bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang memprioritaskan dan menempuh segala upaya menciptakan peluang terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terutama masalah pangannya. Lalu pemerintah yang baik itu kata Allah SWT sangat tau berterima kasih kepada Tuhannya dengan bersyukur. Bila yang pertama merupakan landasan jasmaniahnya sedangkan yang kedua landasan rohaniah. Keterpaduan kedua landasan itu akan melahirkan banyak sekali sifat sifat Allah SWT yang akan mengantarkan pemerintah itu ke negeri yang makmur dan sejahtera. Firman Allah dalam Al-A'raf : 58, *"Dan negeri yang baik (tatatannya), tumbuh tanaman-tanamannya yang baik dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik, tidak tumbuh (tanam tanamannya) melainkan dengan sangat payah. Demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat bagi kaum yang bersyukur."*

Untuk itu, setiap warga harus mematuhi pemegang kekuasaan yang baik sesuai firman Allah surah An Nisa' ayat 59 : *"Hai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan kepada pemangku kekuasaan diantara kamu"*.

Jika muncul berbagai masalah akibat perbedaan, maka carilah solusi memecahkan masalah dengan nilai nilai ketuhanan sesuai penegasan dalam surat An-Nisaa ayat 59: *"Maka jika kamu berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada (pesan) Allah dan (pesan) Rasul, jika kamu benar-benar*

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya"*.

Bermusyawarah untuk memperoleh mufakat. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 158: *"Dan bermusyawarahlah dengan sesama yang dalam suatu urusan. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal"*. Nilai-nilai qur'ani di atas harus dimanifestasikan dalam tataran perilaku pribadi dan masyarakat dalam melahirkan budaya berbangsa yang berbasis kepada tauhid. Sebuah pengakuan kepada keagungan Allah sebagai Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kaya yang berhak disembah, kemudian meletakkan realitas yang lainnya sebagai makhluk sebagai manifestasi keagungan eksistensi Allah untuk dihargai, dibina dan dikembangkan sesuai kehendak Allah.

## Penutup

Manusia adalah puncak ciptaan Allah Swt, karena itu unsur penciptaan dan kedudukannya lebih mulia dari makhluk lainnya. Dalam penciptaan manusia, Islam menekankan ajaran tauhid sebagai landasan bagi etika kehidupan yang dijalankan manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Sudah saatnya kita menciptakan kesadaran religius baru dalam kiprah kebudayaan manusia. Perilaku politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kemanusiaan haruslah beretika pada basis nilai tauhid. Hal ini yang akan menjamin kebersihan perilaku dan penerimaan amal usaha manusia di hadapan



Allah. Kemerdekaan manusia dalam perilaku, harus tetap terfokus dan berbasis pada dimensi tauhid. Kekuasaan bukan yang ditakuti, tapi juga bukan untuk menakut-nakuti. Kekuasaan harus dicari dengan jujur, tetapi juga harus dibagi dengan adil. Kehidupan berbangsa yang religius, hanya membentuk masyarakat madani yang mampu menegakkan kekuasaan di tangan rakyat, penuh keadilan, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Menghargai perbedaan etnik, budaya, dan agama serta peduli kepada yang lemah dan konsisten pada kelestarian lingkungan. Hanya dengan perilaku ini, kita akan dapat membangun bangsa yang berbudaya, religius, berkeadilan, sejahtera secara berkelanjutan.

Kemampuan mengolah sumber daya alam yang merupakan anugerah Allah harus diprioritaskan untuk dapat dinikmati oleh sebesar besarnya kepentingan kesejahteraan rakyat. Mensyukuri nikmat dan bersikap adil merupakan fondasi esensial bangunan masyarakat sejahtera yang diridhai Allah.[]

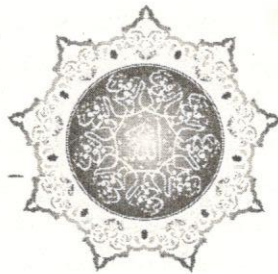
## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf *Kerangka Ideologi Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kumpulan Khutbah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Departemen Agama, RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1995.
- Langgulung, Hasan, *Teori-Teori Kesehatan Mental*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996.
- Ma'arif, Syaafi'i, *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.









## KONTRIBUSI PESANTREN DALAM KONSTRUKSI BUDAYA BANGSA

Oleh: DR. Bedjo Sujanto, M.Pd

### Latar Belakang

**M**aju-mundurnya suatu bangsa, bisa jadi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan menjadi ikon penting kemajuan sebuah bangsa, karena tingkat pendidikan masyarakat akan sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Itulah sebabnya maka berbagai bentuk lembaga pendidikan didirikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah kesadaran masyarakat adalah pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah berkiprah sejak Islam berkembang di negeri ini. Dengan segala bentuknya dari yang sangat sederhana dan tradisional, sampai dengan pesantren modern

yang terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pesantren yang dikendalikan oleh para Kiai, memiliki basis massa yang sangat mengakar kuat di masyarakat. Lembaga ini tumbuh kokoh dengan otonomi manajemen dengan gayanya yang khas. Kepemimpinan otokratik yang sangat kharismatik seorang Kiai dengan otoritas yang begitu besar jika tidak dapat dikatakan mutlak. Diikuti oleh kepatuhan dan ketaatan yang sangat tinggi oleh para santrinya, karena dipercayai bahwa figur Kiai sebagai imam adalah panutan yang nyaris tanpa salah. Kehidupan yang seratus persen bersandar kepada tuntunan syarak, membentuk wujud kepatuhan umat (para santri dan umat lainnya) yang begitu besar dan sangat dipercayai bahwa ajaran dan tuntunannya akan membahagi ke wilayah kebahagiaan lahir maupun batin, dunia sampai keakhirat. Kepercayaan seperti ini yang bersemai di basis massa sehingga melahirkan sebuah tradisi besar dengan berbagai ciri aktifitasnya.

Melihat kekuatan pesantren dengan massa yang sangat besar, muncullah keinginan dari berbagai pihak untuk mengendalikan dengan berbagai pendekatan. Melihat kiprah pesantren yang mengajarkan 'jalan lurus kehidupan', maka para tokoh masyarakat dan bahkan para pemimpin di pemerintahan mulai memberi perhatian dengan berbagai bentuknya, agar contoh 'jalan lurus kehidupan' itu juga memberikan warna perilaku masyarakat di luar pesantren. Kehidupan pesantren yang ditandai dengan bangunan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan, di samping bangunan lain seperti asrama atau pondok dan bangunan lainnya, maka dimasyarakatpun didirikan bangunan masjid dengan berbagai corak dan kekhususannya. Hal ini mencirikan bahwa keadaan



lingkungan pesantren telah terpotret di masyarakat, karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Bagi masyarakat yang beragama Islam, yang disela waktunya ingin belajar tentang Islam, mereka cukup hadir di pengajian yang ada di masjid terdekat. Kegiatan di masjid di tengah masyarakat seperti ini, adalah sebagian dari gambaran aktifitas dan tradisi pesantren, yakni mengaji. Memang mengaji di masjid masyarakat umum, tidak sefektif di masjid pesantren. Mengaji di masjid pesantren merupakan aktifitas wajib yang tertuang dalam kurikulum pesantren.

Di sini tampak bahwa pengaruh pesantren dalam membangun tradisi di luar pesantren juga sangat menonjol. Setidaknya melakukan ibadah sebagai umat beragama sudah menjadi tradisi kuat sebagian besar masyarakat kita, yang sebelumnya ini merupakan tradisi pesantren. Tradisi ini dibangun dari sebuah kesadaran menjalankan perintah Tuhan dan bukan karena diperintahkan oleh kekuatan birokrasi pemerintahan.

Sayangnya, kekuatan manajemen pesantren sebagaimana ilustrasi kecil di atas, masih sangat jarang ditulis dalam buku-buku, sehingga belum dapat dibaca dan dipelajari lebih dalam oleh masyarakat luas di luar pesantren.

Ketika sekolah (negeri/swasta) memilih MBS, mereka memilih mengadopsi jenis manajemen sekolah bangsa lain, yang belum tentu sesuai dengan kultur Indonesia yang multi-etnik. Mereka lupa bahwa ada manajemen pesantren yang tidak tertulis dan telah mengakar kuat di tradisinya, mungkin itu MBS model Indonesia.

Di berbagai diskusi tentang MBS sejak MBS belum menjadi kebijakan nasional, penulis sudah berkali-kali

mengingat, kenapa kita mesti mengadopsi MBS sekolah di luar negeri, pada hal kita punya 'manajemen pesantren' yang tidak banyak ditulis, namun secara kasat mata dan kasat hati dapat dilihat dan dirasa. Memang pengelolaan pesantren yang tampak konvensional dan tradisional, barang kali kurang menarik. Tetapi kalau disimak secara cermat, ada suatu keunggulan yang sangat kompetitif yang sulit ditandingi oleh manajemen sekolah manapun. Kekuatan pesantren yang mampu memobilisasi massa dengan ketaatan dan kepatuhan yang sangat tinggi merupakan bukti bahwa ini merupakan contoh dari manajemen pesantren yang luar biasa. Pesantren hidup dari kekuatan dasar massanya. Kekuatan-kekuatan kecil akar rumput, sedang dan besar menyatu dan membangun dan kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan besar, yang nyaris langgeng, tetap hidup dengan semangatnya, tanpa merengek meminta bantuan. Kalau toh bantuan datang, ia berangkat dari sebuah kesadaran hakiki, kesadaran untuk membangun dirinya. Kalau dalam MBS yang akan penulis pada bagian berikutnya, disarankan sekolah dapat memberdayakan masyarakat maka pesantren tumbuh dari keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat atas kesadarannya yang hakiki. Bagaimana sebenarnya menumbuhkan kesadaran hakiki tersebut? 'Kembalilah ke pesantren', tutur penulis pada sebuah seminar tentang MBS.

## Pendidikan di Indonesia: Pesantren vs Sekolah Mutu Iulusan

Sekolah disorot karena mutu lulusannya rendah. Padahal sekolah diurus oleh pemerintah dan masyarakat



secara bersamaan. Kurikulum sekolah konon disusun oleh para intelektual dan ahli yang handal. Sekolah diajar oleh tenaga terdidik dibidangnya. Biaya disediakan dari APBN dan dana masyarakat secara bersamaan pula. Buku-bukunya disiapkan dengan sangat terencana dengan biaya yang luar biasa besar, setidaknya kalau dibandingkan dengan biaya buku untuk pesantren. Tetap saja masyarakat masih merasakan adanya standar mutu yang tidak jelas di sekolah. Salah satu indikasi bahwa mutu pendidikan di sekolah kita tidak jelas atau masih rendah, yakni sangat kecilnya jumlah lulusan sekolah yang mampu menembus pasar kerja lokal, nasional ataupun global, dan berakibat menumpuknya angka pengangguran terdidik lulusan lembaga pendidikan formal yang disebut dengan sekolah.

Pesantren memang dianggap memiliki manajemen yang konvensional dan tradisional. Tetapi otoritas manajemennya mampu merasuk jauh sampai di luar pesantren. Para santri memang tidak disiapkan untuk berebut pasar kerja formal. Mereka dididik untuk menjadi seorang ahli di bidang pendidikan agama. Bukan untuk menjadi guru agama di sekolah, tetapi menjadi penyebar/penyiar agama di masyarakat luas. Lapangan kerjanya terbuka amat luas. Tak ada standar gaji untuk lulusan pesantren. Mereka dapat hidup di komunitas pesantren dan di luar pesantren sesuai dengan keahlian mereka. Mereka memiliki pasar kerja di rumah-rumah mewah sampai rumah biasa bahkan di lingkungan kumuh sekalipun sebagai 'guru ngaji'. Sebuah disiplin, dan keahlian yang hanya dikuasai oleh mereka yang pernah 'nyantri'. Lulusannya jelas, dengan jelas pula standarnya. Belajarnya tidak harus terikat tahun atau kelas formal, targetnya adalah ahli dalam bidang tertentu.

Jika mau, kembalilah ke pesantren, setidaknya cara menstandarisasi keahlian para santrinya, untuk ditiru di sekolah biasa.

## Relevansi

Keahlian pendidikan di pesantren jelas, dan relevansinya juga sangat jelas. Mereka memiliki pasar kerja amat luas di masyarakat. Mereka selalu hidup sederhana 'di jalan lurus' sesuai ajaran, tak pernah mentargetkan gajinya. Tetapi disisi lain ia juga siap hidup sangat berkecukupan asal koridor 'jalan lurus' yang mengawalinya.

Berbeda dengan sekolah biasa, kualitas lulusan dari berbagai jenjang dan jenis sekolah belum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, baik untuk kebutuhan sumberdaya manusia di pemerintah maupun dunia industri. Lembaga persekolahan terus dituntut agar dapat menyiapkan berbagai karakteristik keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Kenapa tidak melongok pesantren yang membentuk keahlian yang jelas dan terukur?

## Rentang kendali manajemen

Rentang kendali manajemen pendidikan di sekolah terlalu jauh dan panjang. Berbeda dengan rentang kendali manajemen pesantren yang singkat dan jelas, dari otoritas Kiai kepada para 'pembantunya'. Di luar itu tidak ada lagi rentang manajemen yang menghambat. Dan kedepan, pesantren tidak harus ikut-ikutan menambah rentang kendali manajemen bertingkat seperti sekolah.



Manajemen pendidikan di sekolah yang tetap sentralistik dari pusat ke kabupaten/kota, tetap rumit dan berbelit, membuat sekolah menjadi tidak berdaya dan tidak aspiratif, serta sangat mengungkung kreatifitas kepala sekolah dan para guru, ditambah lagi ketidak-cerdasan cara menterjemahkan kebijakan atasan di lapangan. Dalam konteks kewenangan sering tidak jelas, mana kewenangan pusat dan mana kewenangan daerah, dan mana pula kewenangan sekolah. Intervensi 'pusat' masih mendominasi kebijakan dan kegiatan di 'daerah otonom' dan sekolah.

Belum lagi keraguan terhadap kualitas para pimpinan pendidikan di lapis bawah (sekolah), yang kualitasnya masih rendah, karena kultur organisasi yang kurang memberikan ruang gerak bagi pengembangan kreatifitas para pengelola sekolah.

Hal seperti itu tidak terjadi di pesantren, karena rentang kendali manajemen di pesantren pendek dan sederhana. Otonomi kebijakan menjadi ciri pesantren. Kualitas pemimpin pesantren yang disebut Kiai sebagai imam, kualitasnya jelas, ia sosok yang berkemampuan tertinggi di komunitasnya.

### Eksklusivis dan Elitis Pendidikan

Pesantren adalah lembaga pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Ia lahir dari sebuah misi luhur, membuat mata masyarakat 'melek' terhadap 'jalan lurus kehidupan' berdasarkan syarak. Sasaran akhir dari pendidikan pesantren bukan hanya mendidik menjadi pintar dan ahli di bidangnya, tetapi yang lebih penting membuat setiap orang 'bener' dan

jujur' sebagaimana tuntunan syarak. Penyelenggaraan tergolong *exclusive* dilihat dari sisi konten dan cara pengelolaannya, tetapi rekrutmen sangat terbuka dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan.

Berbeda dengan sekolah, yang memiliki program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajib dikdas 9 tahun), yang tujuannya untuk memberi kesempatan bagi semua warga negara RI usia 6-15 tahun untuk bersekolah, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Secara kuantitas program wajib dikdas 9 tahun ini sudah mampu menjangkau sebagian besar anak usia sekolah di Indonesia. Bahkan secara statistik, lebih dari 95% anak usia 6-15 tahun sudah masuk sekolah. Tetapi ironisnya, kualitas SDM kita tak kunjung membaik, karena orientasi mutu pendidikan yang kurang jelas dengan standar yang juga tidak jelas.

Belum lagi alokasi pembiayaan pendidikan di sekolah ini justru banyak yang mengalir ke sekolah-sekolah 'unggulan' yang kualitasnya relatif sudah lebih baik, dimasuki kelompok masyarakat yang berduit besar, dan akhirnya sekolah-sekolah kecil tetap terpinggirkan, dan tak berdaya mendidik anak-anak sesuai kebutuhan. Akhirnya kita saksikan bahwa pembangunan pendidikan nasional itu justru lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu, dan akhirnya kelompok masyarakat kurang mampu tetap termarginalkan<sup>1</sup>. Pendidikan di sekolah cenderung elitis, karena sekolah yang berkualitas baik, hanya bisa dinikmati oleh kelompok mampu. Kelompok inipun cenderung eksklusif.

Tidak demikian halnya dengan pesantren, eksklusif



namun tidak elitis.

Menurut Prof. Dr. Indra Djati Sidi, mantan Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, mengatakan bahwa 'Otonomi pendidikan, suatu keharusan', sebagaimana yang dikatakannya pada Harian: Media Indonesia – Opini (19 Oktober 2000).

"Dengan undang<sup>2</sup> yang mengatur tentang otonomi daerah, kewenangan seluruh urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan berada di daerah kabupaten/kota. Pergeseran kewenangan sistem administrasi ini merupakan momentum tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan di sekolah yang panjang menjadi lebih pendek. Berbagai program perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu juga telah dilakukan, namun belum dapat nendongkrat hasil sebagaimana yang diharapkan. Apakah sesudah otonomi sekolah diterapkan, akan menjamin kualitas lulusan.

Coba lihat dengan otonomi di pesantren, seorang Kiai memiliki otoritas tinggi di setiap langkah, dan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para pembantu Kiai atau Ustadz. Di sini jelas kerjanya dan jelas pula targetnya.

Salah satu masalah yang membuat peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyak kendala dalam pembiayaan. Terlalu birokratis, berbelit, banyak penyimpangan, kaku dan kurang fleksibel. SPJ keuangan kadang menjadi hal utama, pada hal pengelolaan keuangan hanya bagian kecil dari pengelolaan sekolah. Saking sulitnya membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan, sekolah sering kehabisan energi, sehingga pembelajaran terabaikan.

Berbeda dengan administrasi keuangan di pesantren yang sangat sederhana, dan ini sebenarnya rawan korupsi, seandainya mental pengelola tidak kuat. Untungnya pesantren memiliki tradisi dan ajaran tentang kejujuran, taat pada imam atau Kiai, karena mereka yakin bahwa semua perilaku diawasi langsung oleh Sang Khaliq, Allah SWT.

### **MBS?: Kembalilah ke Pesantren!**

MBS diartikan sebagai model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi sangat besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat (stake holder) yang dilayani<sup>2</sup>.

Di sekolah formal ini baru wacana dan dilaksanakan dalam bentuk yang masih jauh dari konteks otonomi 'beneran'.

MBS bertujuan untuk membuat sekolah lebih mandiri, dengan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah, dan mendorong sekolah untuk memulai '*mengambil keputusan secara partisipatif*' yang melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat yang dilayaninya (stakeholder).

Kemandirian menjadi ciri pesantren sejak semula. Manajemen pesantren dalam praktek, sudah sangat otonom yang berbasis kepentingan masyarakat, sebagai kekuatan pesantren berkiprah. Pimpinan pesantren memiliki otonomi penuh dalam mengelola lembaganya. Figur pimpinan pesantren sangat menentukan kearah mana lembaga mau di bawa. Proses pengambilan keputusan dimusyawarahkan



dengan sejawat dan para pembantunya dengan rentang manajemen yang sederhana.

## Mengapa MBS?

### Lihat: tradisi manajemen pesantren.

- Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi sekolahnya, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
- Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
- Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi sekolahnya;
- Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
- Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;
- Sekolah bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan masing-masing sekolah kepada pemerintah, orangtua, dan masyarakat, sehingga sekolah akan berusaha keras untuk mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- Sekolah dapat bersaing secara sehat dengan sekolah-

sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemda setempat;

- Sekolah secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat.

Pola MBS ini sejak dulu sudah dilaksanakan di pesantren-pesantren kita. Oleh karena itu ratusan ribu sekolah kita, harus mau kembali belajar ke pesantren, karena dalam konteks ini, mereka lebih unggul.

Kiai merupakan sosok pemimpin kharismatik yang sangat disegani, karena keahliannya, karena penguasaan keilmuannya yang tinggi dan tidak diragukan lagi. Warga pesantren mengikuti gerak langkah sosok panutan dari sang Kiai. Tak ada satupun murid yang berani membantah, karena 'ilmunya' belum sampai. Si Murid mesti belajar keras dengan kepatuhan yang tinggi, jika suatu saat nanti akan 'menandingi' sang guru. Kompetisi yang sehat dan kelulusan yang bermutu dan obyektif, dengan standar kemampuan yang cukup, untuk melaksanakan misi syi'ar, itu adalah tradisi belajar pesantren. Seseorang yang lulus dari pesantren akan dengan mudah masuk di tengah masyarakat, untuk selanjutnya melaksanakan misi dakwah.

## Pesantren Mencetak Pemimpin Kharismatik

Pesantren menyiapkan para santrinya menjadi ahli dakwah, sebagai bagian penting dalam syi'ar Islam. Lama studi tidak dibatasi tahun, melainkan tingkat kemampuan minimal menjadi seorang pendakwah. Mereka harus pandai berpidato



di depan umum, untuk menyampaikan pesan syi'ar Islam. Oleh karena itu, pidato sebagai sarana dakwah menjadi kemampuan penting yang disiapkan di pesantren. Para da'i banyak lahir di pesantren. Pesantren tempat mendidik calon para da'i.

Mereka tidak belajar teori kepemimpinan, melainkan berlatih langsung menjadi pemimpin, dengan melihat langsung kiprah para Kiai di lapangan. Setiap ada Kiai berdakwah, para santri berbondong-bondong menyaksikan kehebatan pidato Sang Kiai. Perilaku dari sosok Kiai seperti ini kemudian diperankan oleh para santri secara berkala di pesantrennya. Secara bergantian mereka maju ke mimbar untuk berpidato, dengan meniru gaya Kiai yang mereka idolakan masing-masing. Pendidikan secara langsung calon pendakwah, berlatih di mimbar, dilakukan dengan sangat serius di bawah bimbingan Kiai atau para pembantunya. Pada saat latihan seperti ini tidak ada yang bergurau. Mereka sangat serius, karena ini latihan membentuk masa depan mereka. Masa depan sebagai seorang pemimpin masyarakat, khususnya dalam pendidikan agama, akhlaq dan pendidikan moral lainnya. Bahkan di pesantren pun mampu melahirkan para da'i 'cilik' sebagaimana kita saksikan di layar TV.

Bacaan mereka setiap hari selain Al Qur'an dan Hadist adalah sejarah para ulama dari pesantren-pesantren besar di tanah air maupun berbagai ulama dari luar negeri. Mereka selalu dihadapkan kepada contoh perjuangan para ulama besar dengan suka dan dukanya. Mereka dididik secara militan sebagai pemimpin yang rela berjihad kapanpun di situasi apapun. Mereka dididik cinta damai di dalam 'jalan lurus kehidupan', dan akan melawan keras semua bentuk kemungkaran. Ini sejenis doktrin yang harus dilakukan ketika

mereka berada di tengah masyarakat. Kebenaran menurut syari'ah menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan misi dakwahnya.

Sebagai seorang yang disiapkan menjadi para pemimpin masyarakat, para santri harus berlatih 'amanah', jangan sampai mereka terjebak oleh desakan praktik politik yang menyesatkan. Biasanya seorang da'i (yang telah besar sekalipun), jika sudah terkecoh oleh glamornya kehidupan politisi, mereduplah cahaya pendakwah yang pernah melekat pada dirinya. Pemimpin agama yang terlanjur terjun ke dunia politik praktis, maka wibawa ke-Kiai-annya memudar. Ini disebabkan antara Islam dan politik praktis sering tidak sejalan. Islam selalu menunjuk 'jalan lurus kehidupan' tak tergantung oleh orang, sedangkan politik sangat tergantung dari orangnya. Islam selalu dengan ajaran yang lurus, tidak pernah mengajarkan yang dapat merusak umat, sedangkan politik praktis bisa membelokkan yang lurus menuju kesesatan, kalau tidak dikawal secara ketat.

Melalui forum ini pula penulis menyarankan agar para da'i tetap pada 'jalan lurus kehidupan' sebagaimana dituntunkan agama Islam, dan jangan terjebak pada permainan politik yang dapat merusak reputasi ke-Kiai-an yang ditempuh dengan susah payah selama di pesantren.

Pesantren memang pencetak pemimpin yang kharismatik di bidang agama, cerdas karena tempaan zaman, unggul saat berdakwah, pembawa ajaran 'jalan lurus kehidupan' sesuai ajaran Islam. Tempat ini adalah wilayah berkiprah para Da'i, jangan mencari tempat lainnya. Jika ada Da'i yang sukses sebagai politisi, pasti tidak se-permanen sebagai pendakwah, karena sebagai politisi ia hanya membela umat yang se partai



saja. Sedang menjadi Da'i, ia membela umat se agama, seiman yang jumlahnya sangat besar, bahkan lintas negara dan benua. Makin banyak pesantren makin banyak calon pemimpin dilahirkan. Kiprah pesantren jangan berubah, tetap pada penyiapan calon da'i yang akan menjadi penyuluh di tengah masyarakat yang kadang di kegelapan kehidupan yang makin sulit.

Para pemimpin Islam yang lahir dari pesantren adalah penyemai budaya bangsa melalui ceramah agama yang terus dilakukan di tengah masyarakat. Berbagai event dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budaya bangsa oleh para pendakwah. Event besar seperti Maulid Nabi, Isra' dan Mi'raj, Nuzulul Qur'an, ceramah Ramadhan, ceramah sholat Jum'at, ceramah sholat berjama'ah, dan kesempatan lain seperti ceramah di pesta perkawinan, ceramah dipesta khitanan, ceramah di majlis ta'lim adalah tempat yang sangat subur untuk menumbuhkembangkan budaya bangsa.

Melihat kiprah yang dapat dimainkan oleh para alumni pesantren seperti telah dikisahkan sepintas di atas, model pendidikan pesantren perlu mendapat perhatian serius dari para tokoh masyarakat. Pesantren tumbuh dengan tradisi masyarakatnya dan berkembang dengan kesadarannya.

Semoga pesantren tetap berkiprah di wilayah yang telah membesarkannya.[]

#### Catatan :

<sup>1</sup> Masalah-masalah pendidikan ini diramu dari tulisan Prof. Tilaar pada buku *Manajemen Pendidikan Nasional* (1992) dan Makalah *Education In Indonesia: From Crisis to Recovery* (Bappenas)

<sup>2</sup> Diadaptasi dari buku MPMBS untuk SLTP, jilid 1.



## DAFTAR PUSTAKA

HAR. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Rosdakarya, (1992)

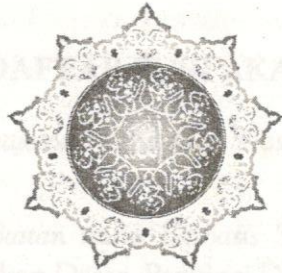
*Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*, Dinas Pendidikan Dasar, Provinsi DKI Jakarta, 2004

Umaedi, *Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*, Depdiknas, 2001

Unesco, *Education In Indonesia: From Crisis to Recovery*, (Bappenas), 2001.

## VISI AL-ITTIHADYAH MASA DEPAN





## **VISI AL-ITTIHADIAH MASA DEPAN (Mengubah wajah ormas Islam menjadi berkeunggulan)**

Oleh : Drs. Anzizhan, MM

### **Pendahuluan**

Percepatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Pengetahuan baru dan perubahan memasuki semua tempat. Saatnya manusia sebagai pencipta kebudayaan harus membangun kembali tidak hanya organisasi yang dijalankan tetapi juga diri setiap orang yang merasa dan ditempatkan sebagai pimpinan. Pergantian utama abad ini sudah memberikan tekanan terhadap pemimpin dalam setiap sektor kehidupan. Banyaknya perubahan sudah menimbulkan berbagai peningkatan kompetisi global dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya serta tuntutan kepemimpinan.

Bagaimanapun, perkembangan revolusioner sains dan teknologi begitu sempurna untuk mengubah berbagai sistem kehidupan. Hal ini merupakan tantangan bagi semua model dari cara berpikir manusia dan bertindak dalam organisasi. Masyarakat sedang menanti suatu transformasi mendasar dalam kepemimpinan apa dan elemen apa sajakah bagi kepemimpinan efektif yang dibutuhkan untuk abad ke-21, tak terkecuali dalam dunia organisasi massa Islam.

Sesungguhnya batang tubuh globalisasi demikian H.A.R. Tilaar (1999, 398) melahirkan beberapa tantangan, yakni:

- 1) Terjadinya polaritas (pertentangan) antara individu yang tangguh versus kerjasama regional/internasional, polaritas antara nasionalisme versus internasionalisme, penghargaan hak asasi manusia versus kepentingan masyarakat luas
- 2) Ancaman identitas dan integritas bangsa yang terjadi karena menyuburnya budaya global sebagai akibat dari *borderless world* (dunia tanpa batas). Untuk Indonesia, kondisi ini diperparah dengan semakin suburnya pluralisme, kesukuan yang dapat berakibat desintegrasi negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Adanya *cultural Shock* (goncangan budaya) akibat dari transformasi sosial yang sangat cepat, suatu kondisi di mana masyarakat, khususnya masyarakat dunia berkembang tergagap-gagap dalam pergaulan internasional.
- 4) Transformasi global yang sangat cepat pada kehidupan sosial memunculkan dunia yang semakin kompetitif dengan semakin terbukanya dunia (*open the world*).



Tantangan globalisasi dalam dunia organisasi massa Islam tidak hanya terhadap pemanfaatan kemajuan Iptek dari negara maju, akan tetapi termasuk berdampak terhadap nilai nilai budaya bangsa yang diwarisi. Bahkan bagaikan virus mematikan ia menyusup ke dalam nilai nilai yang paling mendasar yang dianut dan diyakini oleh bagian terbesar bangsa ini. Usaha-usaha reformasi berbagai bidang sudah dilakukan dalam merespon kemajuan. Termasuk modernisasi bidang pendidikan. Bahkan pada era kontemporer yang menekankan atas pendidikan berbasis hasil dan manajemen berbasis sekolah/lingkungan terus menerus diperbaharui. Hal ini diadopsi dari berkembangnya teknologi manajemen yang cepat merembes kepada jargon pembaruan sekolah dan telah memasuki sejarah gerakan reformasi pendidikan yang diharapkan.

Meskipun dalam beberapa hal pengaruh pendidikan nasional sudah menampakkan hasil, terutama dari segi pemerataan pendidikan, namun sejauh ini masih menghadapi problem yang memerlukan perhatian serius. Prilaku anak anak usia sekolah saat ini masih sangat memprihatinkan. Para ibu ibu rumah tangga semakin sulit mengendalikan sikap anak anak. Akhlak mereka tidak lagi mencerminkan akhlak dari keluarga muslim yang disiplin, taat dan penuh kasih sayang. Tanggung jawab dalam kaitan perbaikan akhlak tersebut tidak hanya tugas orang tua dirumah, guru di sekolah tetapi juga merupakan tanggung jawab organisasi massa Islam.

Berbagai hasil penelitian pada tingkat Asia Tenggara bahkan dunia menunjukkan rendahnya peringkat kemampuan anak anak bangsa. Kenyataan pahit itu harus dijadikan sebagai cambuk pelecut dan pendorong perubahan

ke depan. bukan mencari kambing hitam. Bahkan ada pernyataan lembaga peneliti yang dianggap tidak akurat.

Beratnya tantangan yang dihadapi ke depan menuntut akan adanya perubahan signifikan peran ormas Islam. Pimpinan ormas harus mampu berda di depan sebagai gerbong perubahan, memiliki visi yang kuat dan niat yang tulus untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dr. Mansour Faqih (2001: xiv) dalam karya John M Bryson berjudul "*Strategic Planning For Public And Non Profit Organisations*" mengungkapkan "proses demokratisasi sulit akan terwujud selama organisasi sosial dan keagamaan tidak memiliki kemampuan dan metode untuk merencanakan cita-cita dan visi kemasyarakatan mereka sebagaimana golongan bisnis merencanakan masa depan bisnis dan masyarakat sesuai dengan misi dan visi mereka sebagai organisasi bisnis."

Sudah waktunya ormas Islam menyiapkan diri dengan kemampuan metodologis untuk mempengaruhi kebijakan negara serta dalam mengarahkan bentuk masyarakat demokratis sesuai dengan visi organisasi massa Islam masing-masing. Diyakini karena sumber dasar atau azas organisasi Islam adalah berdasarkan kepada wahyu Ilahi serta bimbingan Nabi, maka antara satu ormas dengan yang lainnya tidak akan terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya akan bermuara pada cita-cita terwujudnya masyarakat yang adil, hidup indah dalam kebersamaan, negara yang baik yang beroleh keampunan dari keridhaan Allah SWT.

Kenapa perjuangan melalui kebijakan negara demikian penting? Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa langkah pertama dari tiga strategi perubahan



itu adalah melalui tangan artinya kekuasaan dan kekuatan, lalu dengan ucapan baik media lisan maupun tulisan, dan yang paling akhir yang berada pada posisi selekeh-lemah iman yakni; diam. Pada posisi manakah keberadaan ormas Islam ditilik dari sudut pandang sistem perubahan ke arah perbaikan yang digariskan Rasulullah itu? Mari berkaca.

### Budaya Unggul

Franciss Hesseilbein (1996: xiii) bahwa setelah memperhatikan kepribadian, gaya, kemampuan dan *interest* pemimpin unggul dan efektif adalah:

1. Mereka tidak pernah mulai dengan pertanyaan, apa yang saya inginkan?. Mereka mengawali dengan pertanyaan "apa yang dibutuhkan untuk dilakukan?"
2. Mereka selalu bertanya: "apa yang dapat saya lakukan untuk sebuah perbedaan atau keunggulan?"
3. Secara terus-menerus bertanya. "Apa yang menjadi misi dan tujuan organisasi? Bagaimana kinerja dan apa yang sudah dihasilkan organisasi?"
4. Sangat toleran terhadap keragaman manusia. Hampir tidak pernah mengukur seseorang dari sudut pandang dirinya sendiri. Dan tak pula pernah pula bertanya? Apa saya suka atau tidak suka pada orang ini?
5. Mereka tidak gamang dalam bekerja pada asosiasi. Mereka menikmati dan senang melakukannya.
6. Mereka menampilkan diri sebagai "contoh tauladan". Mereka membuat keyakinan pada diri staf atau anggotanya bahwa orang yang mereka lihat setiap pagi itu adalah

manusia baik yang mereka idolakan, hormati dan percayai.

Bila ada suatu hal yang kurang terlihat dan tampak dalam keseharian keorganisasian terutama pada ormas Islam ialah keinginan untuk punya karakter unggul. Semua orang sepakat hanya organisasi yang punya budaya unggul yang bisa maju. Ke depan, Ormas Islam yang tidak memiliki kemampuan mengemas kepentingan umat, akan terperangkap bagaikan katak dalam tempurung. Apalagi kurang pula jeli melihat peluang yang tertuang di depan mata. Disinilah ajakan untuk kembali ke nilai-nilai yang paling mendasar dalam Al-qur'an harus menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai "basha" visi masa depan. *Fastabiqul khairat*, berlomba untuk berbuat yang terbaik terulang dalam Al-qur'an beberapa kali dalam berbagai versi. Penggunaan waktu maksimal bukan hanya himbauan, penggugah, bahkan ia juga dilengkapi dengan ancaman. Dan watak kerja keras sangat rinci diungkapkan. Semua itu perintah untuk sebuah keunggulan.

Semua nilai-nilai keislaman yang mengajak untuk memiliki karakter kompetitif dalam perbaikan kebutuhan umat ke depan harus menjadi semangat pertarungan menegakkan kebenaran. Perbaikan terhadap pemerintah, legislatif maupun yudikatif itu dijadikan sebagai tanggung jawab kolektif ormas Islam. Bahwa umat Islam ikut bertanggung jawab terhadap baik maupun buruknya akhlak bangsa. Itu bisa diatasi dengan menjalin kebersamaan tidak hanya interen ormas antar ormas Islam, tetapi melampaui sekat sekat suku, ras dan agama. Menuju Islam yang rahmatan lil'alamin.



Lebih jauh keunggulan ormas dalam membangun karakter bangsa hanya bisa dilakukan bila perencanaan strategis membangun manusia Indonesia seutuhnya itu didukung penuh oleh pemerintah khususnya dalam masalah dana. Masalah finansial ini hanya semata-mata persoalan manajemen saja. Karena uang umat ada dan cukup besar. Persoalannya mampukah kita menggugah nurani para pengambil keputusan untuk berpihak dan bermurah hati memberikan hak umat dan bangsa ini.

Bukan sesuatu yang mudah untuk memasuki wilayah kekuasaan. Tetapi juga tidak bermakna sebaliknya, bahwa itu suatu yang tidak mungkin. Harus ada strategi pendekatan yang terus menerus agar suara dan kepentingan umat jadi perhatian. Umat tidak boleh dendam apalagi dengki. Hanya masalah perilaku dan gaya pejabat kita. Karena semua itu lingkaran sejarah yang selalu berulang. Persoalannya adalah bagaimana menangani masalah dan peran apa yang dapat dimainkan oleh ormas Islam.

Menarik apa yang dikatakan Mansour Fakih (2001:xix) tentang besarnya peran ormas keagamaan bahwa; "...organisasi masyarakat sipil seperti halnya organisasi sosial keagamaan maupun LSM di negara mana saja yang menganut sistem demokratis, memiliki hak sebagaimana organisasi negara maupun bisnis untuk mempengaruhi segenap kebijakan negara, terutama yang menyangkut masalah sosial agar kebijakan tersebut memihak pada kepentingan rakyat". Perjuangan ke arah mampu mempengaruhi kebijakan negara itu memerlukan perencanaan strategis organisasi sosial keagamaan yang diawali dengan adanya kesepakatan tentang visi dan misi organisasi.

Davis Conley, (1996) menemukan banyak pimpinan organisasi memiliki ambivalensi bahwa kadang-kadang mereka mengeluh tentang kegunaan visi, sedangkan dilain pihak para ahli secara terus menerus menghargai visi sebagai sesuatu yang harus dibuat dan menjadi tugas para pimpinan.

Di manakah posisi ormas Islam pada saat ini? Apa yang menjadi fokus agenda bersama umat ke depan? Dan bagaimana mengawali kembali kerja besar yang tengah dihadapi? Tulisan ini berusaha menjelaskan persoalan tersebut dalam perspektif manajemen organisasi.

### Masalah Sederhana Kita

Ada fenomena yang menarik untuk diamati. Ketika ditetapkan UU otonomi daerah dengan konsekuensi pemilihan langsung oleh rakyat. Pada saat yang sama terbuka peluang besar bagi ormas Islam untuk menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah umat. Kepercayaan umat Islam kepada pemimpin masih kuat. Advokasi para ustad masih didengarkan. Tetapi peran ini terabaikan oleh pemimpin ormas. Demikian halnya pada saat perhatian pemerintah mulai meningkat tentang peningkatan biaya pendidikan nasional baik BOS maupun bantuan lainnya. Hampir tidak terdengar bahwa ada Ormas Islam yang menangani dan atau ikut mengawasi perjalanan bantuan tersebut. Di sana sini terdengar jeritan para orang tua murid dan nada sumbang pengalihan penggunaan dana BOS yang dimanfaatkan untuk dana rekreasi. Dialih gunakan untuk SPP dan sebagainya. Apa artinya ini? Bahwa kesadaran akan kesulitan yang dialami bangsa masih rendah. Sayang memang, senyatanya



dalam kaitan ini pemimpin umat tidak banyak berbuat. Jeritan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas untuk dibantu terabaikan. Muncul bahasa klise bahwa itu kan sudah ada yang menangani.

Itu sebagian kecil contoh sederhana yang dialami umat. Sebenarnya pada wilayah inilah sentuhan ormas Islam sangat dibutuhkan. Dengan cara ini pula ikatan persaudaraan yang kuat dapat dibuhul. Untuk dapat ikut berperan dalam berbagai macam masalah kebangsaan. Pemimpin ormas harus memiliki visi ke depan. Apa mimpi kita tentang masa depan umat ini? Apa yang direncanakan? Apa pula yang sudah dilakukan?.

### Mengapa harus ada visi

Visi penting, Karena ia mimpi masa kecil kita. Bayangan masa depan yang ingin kita wujudkan. Angan yang selalu menggoda. Keinginan yang senantiasa menjentik dan menggelitik cita kita. Visi itu sudah ada ketika orang dalam suatu organisasi membagi suatu kesepakatan atas nilai-nilai, kepercayaan, tujuan-tujuan dan sasaran yang akan mengarahkan perilaku mereka. Visi itu, rasion elok kita tentang masa depan yang kita angankan. Keindahan, keteduhan, keteraturan, kenyamanan yang ingin umat dan bangsa ini wujudkan. Singkatnya, visi adalah suatu kompas di dalam suatu organisasi. Di ormas Islam umpamanya, sebagai suatu kerangka kerja yang menjiwai organisasi, ia merupakan kepercayaan yang tumbuh secara bersamaan dengan tujuan-tujuan yang lebih disukai dan ingin dicapai, metode dan iklim-iklim di mana diciptakan sebagai jiwa masyarakat yang membangun norma perilaku. Visi juga disebut pernyataan

yang memberikan inspirasi dari suatu pemimpin masa depan yang disusun dan dimengerti dalam suatu skenario yang jelas, bagaimana visi akan dicapai. Suatu misi yang baik tidak hanya tujuan yang berharga tetapi juga tantangan dan menjangkau semua orang yang ada di organisasi.

Nanus dan Dobbs (1999) menjelaskan bahwa: "*a vision is a realistic, credible, attractive and inspiring future for the organization*". Perlu digarisbawahi bahwa sebuah visi semestinya bersifat realistik, terpercaya, menarik dan memberi inspirasi bagi masa depan organisasi.

Pendapat Fritz, yang dikemukakan juga oleh Lashway, mengatakan bahwa organisasi-organisasi memperoleh kemajuan bila memahami visi secara jelas dan luas dan dapat menciptakan hubungan antara kenyataan dan cita-cita. Mendorong seseorang untuk bisa bekerjasama dan mengurangi jurang pemisah. Pengaruh visi yang demikian itu khususnya dalam ormas Islam sangat penting artinya untuk menata pengenalan terhadap budaya yang berbeda dalam organisasi.

Banyak pemimpin percaya bahwa pengembangan visi adalah suatu sudut pandang ke depan dari penempatan suatu pernyataan kepercayaan dan kemudian berusaha mengimplementasikannya. Bagaimanapun, beberapa peneliti menyarankan bahwa visi lebih dari sekedar satu proses evolusi dari pada satu peristiwa/waktu. Ia merupakan proses yang memerlukan refleksi, tindakan dan evaluasi ulang. Selanjutnya pendapat Hong, dikemukakan oleh Lashway bahwa visi adalah suatu pikiran yang penuh tujuan melalui banyak dan sedikit pengalaman setiap hari ada peluang yang mendekat kepada penerimaan lembaga anda.

Banyak orang mengasumsikan bahwa visi diturunkan



dari atas atau pikiran seorang pimpinan yang kuat dengan imajinasi, energi dan karismanya kemudian melompat dan mulai masuk ke dalam suatu transformasi menjadi budaya utama organisasi. Sejatinya pemimpin organisasi memiliki peran penting dalam mengarahkan visi. Kadang-kadang dia sendiri yang menanganinya. Dalam mengartikulasikan visi, kadang-kadang lebih berhasil dibuat sendiri daripada berkelompok.

Pimpinan organisasi harus mengutamakan penyampaian visi dalam banyak kesempatan dan secara berulang-ulang. Karena ia akan menjadi daya dorong yang kuat untuk menjadikan seseorang itu memiliki komitmen untuk mewujudkannya.

Robert Starratt dalam Lashway menekankan pentingnya menetapkan visi organisasi. Tak masalah bagaimana menginspirasi dan menyuarakannya dalam kertas, memimpikannya jika tidak diwujudkan dalam bentuk konkrit seperti kebijakan, program dan prosedur. Pada beberapa catatan, kurikulum, penempatan staf evaluasi dan pembiayaan harus merasuki visi atau visi akan kehilangan kepercayaan nya secara perlahan.

Pimpinan organisasi harus menyediakan fokus atau apa yang dimaksudkan visi dalam terminologi organisasi. Beri kesempatan kepada seluruh komponen organisasi untuk mempelajari secara kritis apa yang telah menjadi pilihan sebagai visi organisasi. Tidak mudah bagi pengurus untuk berhasil secara mendalam, pengetahuan sistematis dari pelaksanaan yang dibutuhkan untuk membuat visi sebagai realita, tanpa analisis, perkiraan, pengembangan profesional, visi mungkin hanya tinggal dari pada menjadi satu faktor

penting hadir dalam kehidupan suatu organisasi.

Atas semua itu, pemimpin ormas Islam harus menciptakan suatu iklim dan budaya untuk berubah. Mereka melakukan hal ini melalui tindakan serius membicarakan tentang visi dan secara antusias, melalui dorongan, percobaan, melalui perayaan keberhasilan dan mengingat kegagalan serta meninggalkan kesalahan masa lalu dalam menghadapi perubahan yang tak nyata dan kesalahan dalam melangkah.

### Pemimpin 'Tawadhu'

Sewaktu para santri mencium tulus tangan kyainya. Ada kebanggaan tersendiri yang terasa ketika anggukan kehormatan dibalas sang kyai. Ketulusan yang lahir dari lubuk hati itulah yang membuat orang dihargai dan terhormat.

Pemimpin yang memahami kondisi umatnya selalu berada di depan memberi contoh dan sekaligus mendorong kontribusi semua anggota. Selalu bersikap tawadhu' akan menghadirkan suatu jenis kepemimpinan tim/membagi. Suatu kualitas kepemimpinan yang dibangun pada semua tingkatan suatu organisasi- tidak hanya pada pimpinan puncak. Kadang-kadang suatu perbedaan muncul antara bekerja dalam sistem dan bekerja atas sistem. Dalam suatu sistem, para manajer dari sistem yang bekerja atas organisasi membawa peningkatan terhadap siapa dia bekerja dalam organisasi. Secara otomatis, ada dalam peningkatan organisasi, meskipun mereka kurang mengawasinya.

Dijelaskan bahwa : *The leadership in that organization is clear, the source of the employer's empowerment did not lie in company policy, but in an atmosphere of confidence and trust*



*that was party of the organization's culture. That atmosphere was created because all employees shared a common vision of the company's purpose". (Langford dan Cleary, 1986: 138).* Pendapat ini menegaskan posisi kepemimpinan dalam organisasi penting, sebagai sumber pemberdayaan para pegawai dan tidak boleh diabaikan dalam kebijakan lembaga. Dalam suatu atmosfir percaya diri dan kepercayaan dari budaya organisasi. Atmosfir tersebut diciptakan sebab semua pegawai mebagi visi umum mereka ke dalam tujuan organisasi.

Jika sesuatu berlangsung salah, sifat individu dan persaingan masyarakat di mana kita hidup ingin memperoleh kegagalan, dapat lebih baik dengan seorang pribadi yang dapat mengatasi kegagalannya. Berbagai kelemahan dan permasalahan melebihi yang dapat mereka awasi, tetapi menciptakan kesulitan dalam kehidupan mereka.

Salah satu proses kepemimpinan adalah kemampuan mendorong staf agar dengan kesadaran sendiri muncul keinginan untuk membantu kegiatan keorganisasian.. Demikian pula proses kepemimpinan lainnya mendorong setiap orang dalam sistem untuk menyadari diri mereka sebagai anggota dalam kelompok yang sama dan bekerjasama atas masalah yang sama-sama dihadapi.

Sungguh pengakuan sebuah kegagalan bahwa sebagai peluang untuk pertumbuhan adalah satu dari karakteristik yang membedakan kepemimpinan nyata dari pengawasan saja. Pencerahan kepemimpinan melihat bagi kepemimpinan untuk memberikan dukungan, mencari jalan keluar dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya bagi orang-orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik". (*Leaders work with employees to improve the processes, rather than criticizing*

*workers for failures in the system, recognizing that the people who know the job best are the ones who actually do it )".* Dipahami bahwa pemimpin bekerja dengan pegawainya untuk meningkatkan proses, daripada mengkritik para pekerja dari kegagalan dalam sistem, pengakuan bahwa orang-orang yang mengetahui pekerja terbaik adalah orang yang benar-benar melakukan pekerjaannya".

### Pemimpinan Dinamis

Banyak perbedaan dalam gaya memimpin. Perbandingan gaya kepemimpinan dari keberhasilan militer, keagamaan,, politik dan pimpinan perusahaan digambarkan bahwa konsep kepemimpinan adalah suatu hal yang dinamis. Gaya kepemimpinan mengungkapkan tujuan dari organisasi sama halnya sebagai suatu tugas mereka. Dijelaskan bahwa :*today , organization operate with increasing need for creative thinking skills, the ability to get along with and work productively with others in team situations, enhanced communication skills, and expanded technological know-how".* Kepemimpinan harus mengubah untuk mencapai tuntutan perubahan ini. Kepemimpinan dalam kelas capat mendukung pelajar yang memerlukan untuk menagani dengan situasi kompleks daripada fokus atas solusi yang sederhana.

Menggulirkan visi secara jelas terhadap semua anggota dari suatu organisasi adalah tanggung jawab kepemimpinan. Mendorong para para pengurus untuk memiliki kebanggaan dalam kontribusi mereka terhadap visi adalah sama pentingnya. Bekerjasama dengan mereka untuk mebuat visi dari organisasi, akan menjamin munculnya irama kerja yang



indah. Pimpinan organisasi dapat mendukung para pengurus dalam berkarya. Ia tidak akan melakukan sesuatu tanpa sumber dari visi yang sama. Tetapi setiap interaksi memberikan satu peluang untuk memperkuat bahwa visi dan kekuatan perasaan pengurus akan memberi kontribusi terhadap organisasi.

Visi, dapat mendorong dan menciptakan kinerja yang baik, melibatkan mengalihkan perhatian dan memepertanyakan apakah pengetahuan seseorang pengurus itu sudah dapat dikontribusikan kedalam organisasi secara baik.

Visi secara khusus adalah sesuatu yang unik dalam organisasi. Seorang pengurus organisasi mungkin saja memandang dirinya sebagai memberikan peluang bagi pembelajaran aktif bagi semua anggota di organisasi tetapi diragukan apakah hal itu berhasil atau gagal untuk diwujudkan.

Salah satu faktor yang menentukan ormas Islam memiliki kualitas tinggi adalah perilaku kepemimpinan yang kondusif bagi kepuasan kerja personil, kinerja tinggi dan berfokus kepada kebutuhan organisasi. Perilaku pemimpin organisasi massa ditampilkan dalam menjalankan peran, gaya memimpin, hubungan interpersonal, mengambil keputusan, pembinaan iklim organisasi, keteladanan, pemberian imbalan (*reward*) dan hukuman dalam interaksinya dengan semua personil pengurus organisasi. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ormas untuk menjadi organisasi efektif.

Bagaimanapun, dalam kepemimpinannya pimpinan ormas akan mengambil keputusan, membuat perencanaan dalam wujud misi, visi, tujuan dan sasaran serta kebijakan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa : *Leaders in schools must develop knowledge for themselves and for others in the organization; leaders must sustain passion for the vision and a schools must become learning organizations in every way* " (Langford dan Cleary, 1986: 147). Itu artinya, pemimpin harus mampu mengembangkan pengetahuan untuk diri mereka sendiri dan untuk yang lainnya dalam organisasi. Bahkan pemimpin meneruskan keinginan besarnya untuk mewujudkan visi dan menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua cara yang dapat ditempuh.

Peningkatan kualitas organisasi bermuara kepada pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas berkelanjutan dalam bidang program kerja, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintah sarana dan prasarana organisasi. Hal itu penting dilakukan karena ormas Islam berfungsi mengembangkan potensi umat dalam membentuk watak bangsa (*nation character building*) yang menghargai hak-hak dan kewajiban anggotanya dalam rangka terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) yaitu suatu masyarakat sipil yang cerdas, demokratis, adil dan sejahtera.

## Penutup

Percepatan perkembangan ilmu dan teknologi menuntut organisasi dapat mengembangkan program kegiatan yang relevan. Untuk itu, pimpinan organisasi sesuai tingkatnya memegang peran penting sebagai ahli visi untuk menciptakan peluang membangun visi yang antisipatif.

Organisasi massa Islam dimanapun dan pada tingkat apapun tidak boleh statis, karena dinamika bergitu cepat



sehingga visi diperlukan untuk menciptakan masa depan yang diinginkan masyarakat dan umat Islam.

Al-Ittihadiyah akan tetap eksis sebagai sebuah pranata budaya umat dalam kehidupan modern. Potensi besar Al-Ittihadiyah sebagai ormas Islam baik dari segi kuantitas maupun kualitas menuntut pimpinan kolektif organisasi yang benar-benar handal sebagai ahli visi. Kemampuan mewujudkan visi sebuah organisasi adalah atmosfir peningkatan mutu di era globalisasi atau abad ke-21 ini. Tulisan ini mengetengahkan visi organisasi yang diwujudkan akan menjamin kemampuan mengantisipasi perubahan di masa depan.[]

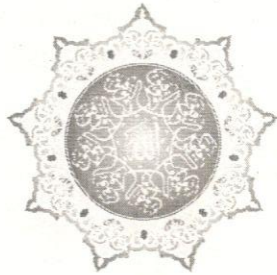
## DAFTAR PUSTAKA

- Anzizhan dan Syafaruddin, ed, *Visi Baru Al-Ittihadiyah*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2004.
- Lashway, Lary. *Visionary Leadership*. <http://eric.uoregon.edu/publications/digest10.html>.
- Langford, David P dan Barabara A. Cleary. *Orcherstrating Learning with Quality*. Sydney: Sydney Books International, 1986.
- Overton, Rodney. *Leadership Made Simple*. Australia: Wharton Books, Ltd. 2002.
- Tilaar, HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- Frances Hesselbein, *The Leader of The Future*. San Francisco: Jossey Best Publisher, 1996
- Rodney Overton, *Leadership Made Simple* Wharton Books (S) Pte-Ltd Singapore, 2002



# PENDIDIKAN BERBASIS UKHUWAH





## PENDIDIKAN BERBASIS UKHUWAH

Oleh: Drs. Syafaruddin, M.Pd.

### Pendahuluan

Dewasa ini banyak fenomena yang mencemaskan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sana sini banyak pertengkaran panjang, perselisihan, perpecahan yang menguras energi untuk berbuat baik bagi sesamanya. Peristiwa yang mencemaskan kelangsungan kesatuan bangsa juga senantiasa eksis berbentuk pertikaian etnik, perpecahan golongan, dan sengketa politik mungkin sudah cukup menggambarkan rapuhnya pilar kebangsaan. Tak terkecuali umat Islam. Sebagai bagian terbesar dari golongan dalam kehidupan bangsa Indonesia, krisis ukhuwah juga terasa mengganggu gerakan kultural Islam dalam format transformasi sosial umat.

Untungnya, pendidikan saat ini semakin diperhatikan. Kesadaran individu, kolektif, dan kesadaran sejarah

memungkinkan kita untuk melakukan kebangkitan bangsa. Pendidikan adalah senjata yang ampuh dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu alternatif adalah membingkai pendidikan berbasis ukhuwah. Realitas kemajemukan umat dan bangsa perlu dijadikan sebagai kekayaan bangsa, karena itu diperlukan rekayasa fungsional secara kultural bersama-sama membangun bangsa.

Kuntowijoyo (1999:52) menjelaskan pengalaman sejarah Islam menunjukkan bahwa ke dalam dan keluar umat Islam adalah plural. Ke dalam, umat Islam sejak awal di Madinah terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Ke luar, ada Islam, ada Yahudi, dan Kristen. Pluralisme adalah watak sejarah Islam, karena itu hidup dalam dalam keragaman agama, budaya, etnisitas dan ras di Indonesia bukan gejala baru dalam Islam".

Pendidikan perlu dimantapkan fokusnya pada basis nilai ukhuwah. Pengakuan akan perbedaan dalam berbagai hal yang kodrati dan ikhtiari, memungkinkan manusia dapat hidup bersama, berdampingan, dan bersaudara dalam kesatuan dan persatuan membangun kebangkitan bangsa yang besar, kuat dan berbudaya".

Ormas Islam memiliki banyak kekayaan kultural, terutama berbagai lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dll. Bagaimana peran Ormas Islam menawarkan pendidikan yang berbasis pada ukhuwan ini merupakan persoalan yang esensial. Banyak persoalan keumatan yang mengitari Ormas Islam kontemporer. Kuntowijoyo (1999) menjelaskan bahwa persoalan besar ormas Islam ialah bagaimana mengangkat umat supaya tidak terus menerus berada di bawah dalam tangga sosial karena pada umumnya



orang Islam tidak kompetitif menjadi kelompok terpinggirkan di negeri sendiri. Apalagi dalam era globalisasi, tenaga kerja luar negeri dengan bebas beroperasi di Indonesia.

Dalam pendidikan Islam, fokus pada nilai ukhuwah merupakan bagian penting dari manifestasi tauhid. Penghargaan akan perbedaan merupakan manifestasi ketaqwaan kepada Allah. Kepedulian kepada sesamanya, merupakan manifestasi ketaqwaan dan penghargaan kepada ciptaan Allah.

### Ukhuwah: Sifat Dasar Manusiawi

Ukhuwah (*ukhuwwah*) biasanya diartikan sebagai "persaudaraan", terambil dari akar kata yang apda mulanya berarti "memperhatikan". Makna asal kata ukhuwah memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara (Shihab, 1996:486).

Ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari segi ibu bapak atau keduanya maupun dari segi persusuan". Secara majazi, kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi dan perasaan. Bahkan ukhuwah yang berasal dari "akhu" membentuk kata "ukhuwah" bermakna juga dengan arti teman akrab atau sahabat".

Menurut Shihab (1996), kata "akh" (sudara) dalam al-qur'an dengan bentuk tunggal disebutkan 52 kali. Kata ini dapat berarti:

1. Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti penjelasan ayat yang berbicara tentang kewarisan, atau

keharaman mengawini orang-orang tertentu. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23: "Diharamkan kepada kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu (dari) anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki...".

2. Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga, seperti bunyi do'a Nabi Musa, as, yang diungkapkan Allah dalam surat Thaha ayat 29-30, yang artinya: "Dan jadikanlah untukmu seorang pembantu dari keluargaku (yaitu) Harun, saudaraku".
3. Saudara dalam arti sebangsa. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat al-a'raf ayat 65: "Dan kepada suku 'Ad" (Kami utus) saudara mereka Hud".
4. Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. Firman Allah dalam surat Shad ayat 23: "*Sesungguhnya saudaraku ini memunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai sesekor saja, maka dia berkata kepadaku: 'serahkanlah kambingmu itu kepadaku', dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan*".
5. Persaudaraan seagama. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*".

Berdasarkan kepada enam penegasan di atas yang bersumber kepada al-qur'an, maka pada intinya darai segi bahasa maka kata ukhuwah intinya adalah persaudaraan". Pada intinya, persaudaraan dimaksud adalah persaudaraan sekemanusiaan (*ukhuwah Insaniyah*), dan persaudaraan semakhluk dan seketundukan kepada Allah. Jadi peraudaraan



sesama makhluk ini ditegaskan Allah dalam surat An-An'am ayat 38: *"Dan tidaklah (jenis binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya) kecuali umat-umat juga seperti kamu"*.

Dalam persepektif persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), dipahami bahwa sebagai persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam (Shihab, 1996). Ditegaskannya pula, bahwa *ukhuwah islamiyah* dibagi kepada beberapa bagian, yaitu: (1) *Ukhuwah 'ubudiyah* atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah, (2) *ukhuwah insaniyyah (basyariyah)* dalam arti persaudaraan umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu, (3) *ukhuwah wathaniyyah wa an-nasab*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, (4) *ukhuwah fi dinal-Islam*, persaudaraan antara sesama muslim. Dengan demikian, pembicaraan tentang persaudaraan sesama muslim dengan berbagai latar belakang dan perbedaan etnik serta budaya yang tidak seketurunan menjadi sangat kosmopolitan. Bagi umat beriman, adalah kewajiban untuk senantiasa menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara sesama mereka. Sungguh tidak satupun ada dalih yang dijadikan melahirkan keretakan hubungan persaudaraan Islam.

Menurut Thuwairaqi (2004), *ukhuwah* merupakan buah dari amal di jalan Allah. *Ukhuwah* juga merupakan dasar dari amal di jalan Allah. Karena itu, amal tidak akan baik tanpa adanya *ukhuwah*.

## Tauhid Sosial: Membangun Kebersamaan untuk Membangun

Keimanan akan keesaan Allah, menjadi landasan semua pengetahuan dan perilaku dalam Islam. Karena itu, tauhid bukan sekedar keyakinan individu terhadap keesaan Allah, namun keyakinan yang berimplikasi kepada kemakhlukan sebagai wujud kehendak Allah terhadap hamba-Nya. Karena itu jalinan persaudaraan dalam islam adalah persaudaraan yang dijalankan karena Allah dan tujuan kepada Allah. Menghargai orang lain, peduli kepada yang lemah, membantu yang miskin, bukti keimanan kepada Allah yang menciptakan makhluk sesuai dengan hukum-Nya.

Ma'arif (1997:3) tauhid sosial adalah dimensi praksis dari risiko keimanan kepada Allah yang Esa, suatu doktrin yang memang sudah ada sejak periode sangat dini dideklarasikan al-qur'an ketika di Makkah awal berkembangnya Islam".

Lebih lanjut ditegaskan Ma'arif (1997) bahwa prinsip tauhid sosial diaplikasikan dalam berbagai prinsi, di antaranya: (1) doktrin tauhid, yang menegaskan keesaan Allah memerlukan dimensi sosial, politik, ekonomi, iptek dan kebudayaan dalam makna yang sempit. Tetapi terkait dengan semua dimensi ini, tauhid yang serupa itu pasti tidak berasal dari al-qur'an, (2) prinsip egaliter adalah sisi sosial dari doktrin tauhid. Prinsip ini terlalu lama terbenam dalam abu sejarah umat Islam. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu dibongkar kembali untuk memberdayakan umat Islam".

Tauhid sosial difokuskan kepada kedalaman tauhid yang berpihak secara praksis terhadap pemberdayaan umat Islam. Itu artinya, yang kaya bertauhid mendorong membantu yang



lemah, juga yang intelek bertauhid, secara amaliyah membantu yang bodoh, yang berkuasa bertauhid berpihak dan membantu yang tersiksa”.

Tanpa tegaknya prinsip ini, sistem sosial dan sistem politik dengan label Islam sekalipun pasti akan memperpanjang sistem pemasungan dan bahkan penindasan terhadap sektor masyarakat lemah dan tak berdaya. Padahal al-qur'an sejak dini, telah menyatakan perang terhadap segala bentuk pemasungan dan penindasan karena kitab suci al-qur'an sangat menghargai kemuliaan martabat manusia (Ma'arif, 1997).

Kepemimpinan di antara kaum muslimin harus selalu dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tali-tali ukhuwah dan mengikat setiap individu dengan yang lain berdasarkan persamaan keimanan di antara mereka karena ukhuwah memiliki buah yang menjadi harapan di dunia dan di akhirat”. Fakta sejarah Islam menunjukkan bagaimana rasulullah mempersaudarakan kaum mukmin di Makkah sebelum hijrah, membangun ukhuwah Muhajirin dan Anshar, bahkan mengikat sesama Muhajirin berdasarkan kebenaran dan saling mengasihi. Rasul selalu menanamkan makna ukhuwah di dalam jiwa setiap anggota masyarakat (At-Thuwairaqi, 2004:125).

Menghilangkan perbedaan dalam realitas adalah melawan hukum Allah. Menurut Qardhawi (1999) perbedaan disebutkan bukan darurat secara agama. Karena jika Allah menghendaki semua orang berhimpun dalam satu pendapat, niscaya membuat suatu teks agama dalam bentuk *qathiyah at-tsubut* (absolut dalam periwayatan) dan *qath'iyah ad-dalalah* (absolut dalam makna) hingga tidak ada tempat perbedaan

pendapat bukan hal sukar, tapi hukum ini kehendak Allah. Di sini Allah menunjukkan kepada umat bahwa Dia tidak hendak menghalangi adanya keragaman pandangan dan ijtihad”.

Selain itu ditegaskan Al-Qardhawi, bahwa perbedaan juga bukan darurat secara bahasa”, karena agama tertuangkan dalam teks-teks al-qur'an dan hadis Nabi. Semua ajaran dipahami dalam kerangka teks bahasa, sedangkan dalam bahasa terdapat *haqiqah* (makna sebenarnya), *majaz* (makna kiasan), *sharih* (jelas), dan *kinayah* (simbolik), *mantuq* (tekstual), *mafhum* (kontekstual), *zhahir* (terang), *muawwal* (interpretable). Selain itu ada teks yang dipahami melalui ungkapanannya dan ada yang dipahami melalui isyaratnya, seperti: ada yang *amm* (umum), *khas* (khusus), *mutlaq* (mutlak) dan *muqayyad* (bersyarat), *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).

Dijelaskannya pula bahwa, perbedaan juga bukan darurat secara manusiawi, karena umat manusia memiliki ragam watak, sikap dan kecenderungan. Ada orang yang mempermudah ada yang mempersulit, ada yang cenderung kepada teks ada yang lebih suka mengambil esensi, adayang lebih suka kepada *atsar*/pengaruh ada yang suka berpendapat. Semua ini menggiring manusia kepa perbedaan mazhab atau golongan aliran.

Ditambahkannya, bahwa perbedaan juga bukan darurat secara alami, karena Allah SWT menciptakan alam ini dengan amat beragam. Al-qur'an menyebutkannya dengan *mukhtalifun alwanuh* (beragam warnanya). Bukankah “perbedaan pendapat adalah rahmat”

Hal yang penting adalah kekuatan prinsip bahwa perbedaan jangan sampai membuat perpecahan, justru



diarahkan untuk memperkaya dalam rangka mencapai kebajikan dan kebenaran yang mendekat kepada Allah SWT.

### **Pendidikan Berbasis Ukhuwah: Suatu Keharusan Budaya**

Pendidikan sebagai proses bimbingan terhadap fitrah anak yang sedang berkembang mencakup spektrum yang sangat luas. Kegiatannya dapat berlangsung di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan potensi intelektualitas, moralitas, emosional, estetika anak sehingga berkembang secara terpadu dan optimal sebagai pribadi seutuhnya. Himpunan pribadi seutuhnya akan siap hidup di masyarakat dengan berbagai peran sosial untuk membangun budaya bangsa dalam masyarakat madani.

Pendidikan merupakan fenomena kebudayaan manusia. Dari waktu ke waktu senantiasa dilaksanakan dan berkembang untuk membina generasi muda melalui transformasi kebudayaan. Dengan kata lain, pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah anak yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak manusia dan telah berlangsung sepanjang kehidupan manusia dalam rangka mengembangkan kepribadian anak dan kebudayaan manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam (QS.2:30; 30:30). Orang tua, guru dan masyarakat melaksanakan pendidikan Islam sebagai tanggung jawab dalam membentuk generasi muslim yang mengabdikan kepada Allah, kuat keyakinannya (QS.7:172), dan menjalankan

kekhalifahan di muka bumi (QS.6:165).

Perasaan persaudaraan sebenarnya suatu fitrah yang dibawa manusia sejak lahir. Karena itu, pendidikan menjadi sarana penting dalam menumbuhkembangkan rasa persaudaraan sehingga terbentuk suatu komunitas, dan bangsa yang kokoh.

Qardhawi (2001:295) berpendapat bahwa secara prinsip perbedaan tidak mungkin dihilangkan, tidak dituntut oleh syari'at, darurat secara agama dan darurat secara alami". Jadi ukhuwah perlu dimantapkan, karena secara fakta perbedaan wujud, dan secara hukum perbedaan diakui sebagai kehendak Allah. Untuk memantapkan persaudaraan di kalangan umat, maka ada beberapa prinsip yang harus dijalankan:

1. Pengakuan terhadap Perbedaan (QS.49:13)
2. Menanamkan sikap kompetisi dalam kerangka ketaqwaan (QS.49:13), dan kerangka kompetisi kebaikan/*fastabiqul khairat* (QS.2:148).
3. Membangun sikap toleransi (QS.109:1-6)
4. Menghindari sikap lahir dan bathin yang mempengaruhi munculnya gangguan hubungan (QS.39:12).
5. Memuliakan dan menghargai orang lain (QS.17:70)
6. Menjalin kerjasama untuk kebajikan dan ketaqwaan (QS.5:2)

Agama harus tetap menjadi kekuatan kultural, moral, etika, nilai dan intelektual. Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, agama inklusif. Bertolak dari prinsip ini, maka keragaman latar belakang umat adalah kodrati, sehingga setiap orang harus berpegang pada nilai ukhuwah yang tinggi, menghargai perbedaan dan mencari titik persamaan untuk sama-sama



berkiprah di bumi Tuhan.

Dengan demikian konsep dasar pemantapan ukhuwah berdasarkan teks keagamaan, yaitu:

1. Konsep *tanawwu' al-ibadah* (keragaman dalam beribadah)
2. Konsep *al-mukti'u fi al-ijtihad lahu ajr* (yang salah dalam berijtihad /menetapkan hukum terdapat satu ganjaran)
3. *La hukma lillah qabla ijtihad al-mujtahid* (tidak ada hukum Allah sebelum ada ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid) (Shihab, 1996:497).

Dengan demikian, diperlukan format pendidikan berbasis kepada nilai ukhuwah dalam keseluruhan lembaga pendidikan yang dikelola ormas Islam. Hal ini penting untuk membangun kekuatan budaya umat, dan membangun perspsi positif dalam melihat perbedaan sehingga memperkecil pertentangan dan salah paham dalam pergaulan dan kerjasama umat membangun bangsa yang pluralistik ini.

Menurut At-Thuwairaqi (2004), untuk melaksanakan prinsip uhuwah dalam lembaga pendidikan, maka manajemen pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pihak manajemen pendidikan harus merasa bahwa semua orang yang ada di sekitarnya adalah saudaranya. Oleh karena itu, pihak manajemen tidak boleh mengutamakan sebagian mereka atas yang lain dalam hal pihak manajemen tidak boleh mengutamakan sebagian mereka atas yang lain dalam hal pergaulan, rasa terima kasih, penghargaan dan kepercayaan karena sikap demikian akan menimbulkan pengaruh negatif pada tiap-tiap individu".
- 2) Pihak manajemen harus menetapkan slogan "semua adalah saudara" agar tidak terjadi perpecahan dan

permusuhan antar individu.

- 3) Pihak manajemen pendidikan harus selalu berupaya memecahkan berbagai masalah yang terjadi antar individu dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga mampu menghilangkan pengaruh negatif dari permasalahan di hati mereka.
- 4) Pihak manajemen pendidikan harus berupaya memperkokoh tali hubungan antar individu lewat berbagai pertemuan yang terlepas dari urusan pekerjaan dan hal-hal yang bersifat resmi antara pihak manajemen dengan pihak karyawan sehingga mereka merasa seakan-akan berada dalam satu keluarga.
- 5) Pihak manajemen pendidikan harus selalu berupaya untuk bergabung dengan pihak karyawan dalam berbagai muhasabah dengan tujuan agar tercipta rasa saling cinta dan saling mengasihi antara pihak manajemen dengan pihak karyawan".

Pendidikan berbasis ukhuwah harus diformat dalam prinsip ingralitas substansi materi dan tujuannya. Konsep, prinsip, nilai dan fakta ukhuwah dirancang dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran. Setidaknya nilai-nilai ukhuwah harus mantap ditanamkan dalam pembelajaran mata pelajaran agama, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran sosiologi, dan pembelajaran pendidikan kewargaan negara.

Sesungguhnya dengan prinsip keesaan Allah dalam pembelajaran agama, dan akhlakul karimah yang diajarkan dengan efektif, sejatinya makna persaudaraan dalam perbedaan, atau persatuan dalam keragaman menjadi tuntas melebur sebagai kekayaan spiritual dan kultural umat dan



bangsa. Diperlukan kreativitas dan sikap inovatif para perancang pendidikan, guru-guru dan manajemen pendidikan dalam menghadirkan pendidikan berbasis ukhuwah tidak hanya pada dataran substansi materi, tetapi juga dalam aplikasi metodologi pembelajaran (simulasi, diskusi, studi banding, permainan peran), dan juga dalam perilaku manajerial harus ada iklim kondusif mewujudkan pendidikan berbasis persaudaraan (*ukhuwah*).

Dalam kehidupan keseharian sejak pendidikan usia dini, anak-anak harus sudah menerima nilai perbedaan sebagai kekayaan, perbedaan adalah ciptaan dan kehendak Allah, perbedaan mewakili yang baik dan buruk, atau benar dan salah. Karena itu, pola pembiasaan sikap berpikir positif (*positive thinking*), yang dalam bahasa agama disebut *Husnu Zhan* (baik sangka), tenggang rasa, saling memahami dan menghargai harus menjadi bahagian perilaku anak dalam berhadapan dengan orang lain yang berbeda.

## Penutup

Pendidikan berbasis ukhuwah dalam Islam adalah pendidikan yang menanamkan nilai persaudaraan kepada anak agar dapat hidup secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam berbagai perbedaan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk.

Secara kodrati perbedaan adalah hasil ciptaan Allah. Karena itu, keimanan tauhid menjadi inti dari pendidikan berbasis ukhuwah dalam berbagai aspek pendidikan yang dikembangkan format kurikulum pendidikan Islam, metodologi dan manajemen. Mencari dan menemukan

persamaan adalah kunci dari memperkokoh ukhuwah, karena itu nilai pendidikan ukhuwah adalah mencari titik persamaan dan menghargai perbedaan sebagai fakta kehidupan makhluk yang diciptakan Allah SWT.[]

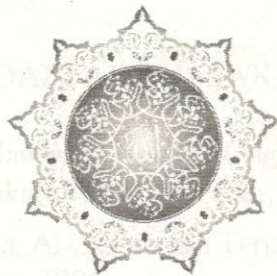


## DAFTAR PUSTAKA

- At-Thuwairaqi, Nawwaal, *Sekolah Unggulan Berbasis Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Daar Al-Falah, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Bumi Restu, 1986.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Rahasia Agama*, Jakarta: Pamadina, 1996.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- Maarif, Syafi'i, *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Jakarta: Intermedia, 2001.

## DINAMIKA HISTORIS AL-ITTIHADIYAH





## DINAMIKA HISTORIS AL-ITTIHADIIYAH Refleksi Ormas Islam di Tanah Kelahiran

Oleh: Dr. Al Rasyidin, M.Ag

### A. Latar Historis

Salah satu upaya pemerintah Hindia-Belanda untuk mengekalkan kekuasaannya di Indonesia adalah melalui politik pecah belah (*divide et impera*), baik yang dilancarkan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dalam dimensi kehidupan beragama, secara formal, pemerintah Belanda mempropaganda-kan politik netral terhadap agama. Namun secara faktual, kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai intervensi atau campur tangan, bahkan diskriminatif. Kepada missionaris Kristen, pemerintah Belanda selalu memberikan kebebasan yang lebih luas dalam mengembangkan agama, bahkan memberikan subsidi dana dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, aktivitas dakwah missionaris Islam di daerah

animisme dilarang.<sup>1</sup> Sekolah-sekolah Kristen selalu diberi subsidi besar-besaran, sementara institusi-institusi pendidikan Islam selalu diikat dengan berbagai peraturan yang memberatkan.<sup>2</sup> Akibatnya, tidak sedikit institusi-institusi pendidikan Islam yang berjalan apa adanya, bahkan dengan sistem dan kurikulum yang tidak teratur.

Politik *divide et impera* yang dilancarkan Belanda ternyata merambah hampir ke seluruh dimensi kehidupan bangsa. Adu domba antara masyarakat awam dengan kalangan bangsawan terus dilakukan. Perbedaan sektarian dan paham keagamaan dikalangan umat Islam terus ditumbuhsurburkan, bahkan diperuncing. Dalam konteks inilah kita melihat perseteruan antara umat Islam yang disebut sebagai kaum tua dan kaum muda ditumbuh-kembangkan.<sup>3</sup> Akibatnya, terjadilah perpecahan dikalangan umat Islam. Di satu sisi, kaum muda seringkali 'menuduh' kaum tua sebagai kelompok yang jatuh ke dalam *bid'ah*, *jumud*, *taqlid* dan menghambat kemajuan umat Islam.<sup>4</sup> Sebaliknya, kaum tua 'menuduh' kaum muda sebagai kelompok yang terlalu maju, terlalu rasional, dan ke 'barat-baratan'.

Kelahiran Budi Utomo, Sarekat Islam, dan sejumlah organisasi lainnya, baik yang bersifat lokal ataupun nasional, kebangsaan maupun keagamaan, menjadi sumber motivasi bagi munculnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dalam melawan kolonial Belanda. Momentum tersebut diperkuat lagi dengan dideklarasikannya sumpah pemuda tahun 1928 dan lahirnya sejumlah organisasi keislaman. Sejak saat itu, keinginan untuk bersatu dan menghimpun potensi serta kekuatan rakyat terus bergulir. Ibarat *Ashab al-Kahfi* yang baru terjaga dari tidur panjangnya, bangsa Indonesia, khusus-



nya umat Islam, semakin menyadari bahwa untuk merdeka dan maju mereka harus bersatu.

Kehadiran Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara tahun 1935 pada dasarnya merupakan respon umat Islam di wilayah ini terhadap situasi politik dan sosial-keagamaan yang berkembang di Indonesia, khususnya Sumatera Timur. Ketika itu, sebagaimana dikemukakan salah seorang mantan ketua umum Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, H. Mahmud Abu Bakar<sup>5</sup>, Belanda melancarkan politik pecah-belah yang melemahkan kekuatan umat Islam dan menghancurkan potensi alim ulama dikarenakan hendak memperkuat kukunya untuk menjajah Indonesia buat selama-lamanya. Politik adu domba tersebut termakan oleh umat Islam, sehingga muncullah kubu atau kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Pada satu sisi, muncul kaum intelek yang kebarat-baratan yang melontarkan kata-kata yang merendahkan ulama dan umat Islam dengan mengatakan bahwa kaum agama dan alim ulamanya adalah ortodok. Sementara itu, sebahagian ulama dan penganut agama Islam menuduh orang intelek sebagai kaki tangan Belanda. Pertengkaran antara kedua kelompok ini makin lama kian meruncing.<sup>6</sup> Dalam konteks inilah, Al-Ittihadiyah hadir untuk menjembatani dan mempersatukan ummat serta sebagai salah satu barisan jihad bagi kekuatan kaum Muslimin.<sup>7</sup>

Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatari oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan Islam yang belum tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Hal ini secara

eksplisit diterakan dalam pasal 2 *statuten* Al-Ittihadiyah, dimana pada ayat b dan c disebutkan bahwa maksud didirikannya Al-Ittihadiyah adalah untuk:

- (b) Mengoesahakan berdirinja roemah2 pergoeroean Islam
- (c) Mengatoer dan mensesoeaikan daftar peladjaran dalam roemah2 pergoeroean AI dan roemah2 pergoeroean yang tergaboeng dengan AI.<sup>8</sup>

Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat beragam. Disamping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karena itu, Al-Ittihadiyah didirikan untuk berusaha: (a) *mempersatoekan daftar peladjaran*, dan (b) *mempersoeaikan faham diantara goeroe2 terhadap soal2 jang berhoeboeng dengan agama Islam seoemoemnja*.<sup>9</sup>

Fakta lain yang dilihat Al-Ittihadiyah adalah kenyataan bahwa dalam pandangan masyarakat sekolah-sekolah modern yang dibangun dan dikembangkan oleh Belanda merupakan jalur terbaik bagi mobilitas sosial secara vertikal. Perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah hanya akan menerima dan mempekerjakan para pegawai tamatan dari sekolah-sekolah modern ini. Sementara di sisi lain, madrasah dan perguruan-perguruan Islam masih terlalu terpaku pada praktik-praktik tradisionalnya dan berorientasi murni keagamaan. Karena itu, satu-satunya lapangan pengabdian yang memungkinkan ditekuni para alumninya hanyalah sebagai *ustadz*, guru agama, *malim kampung*, atau guru-guru *ngaji*. Ketika Muhammadiyah, organisasi massa Islam yang terlebih dahulu eksis di Sumatera Timur, membangun sekolah-



sekolah modern seperti yang dikem-bangkan Belanda, maka minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sana demikian besar. Disinilah tokoh-tokoh Al-Ittihadiyah melihat perlunya mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Karena itu, ketika Al-Ittihadiyah memprogramkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, mereka membangun dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern.

## B. Identitas dan Kiprah Al-Ittihadiyah

### 1. *I'tiqad dan Mazhab Keislaman*

Al-Ittihadiyah bermakna persatuan.<sup>10</sup> Nama ini sengaja dipilih pendiri Al-Ittihadiyah untuk merepresentasikan maksud utama yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi ini, yaitu berupaya membangun satu perhimpunan umat Islam yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat Indonesia, seperti kaum bangsawan, orang kebanyakan, ulama dan pelajar, kaum intelektual dan kelas menengah (*intellectueelen* dan *middenstanders*). Persatuan itu dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan dan perseteruan antara kaum muda dengan kaum tua, antara ulama dan kelompok intelektual, serta antara kaum bangsawan dan masyarakat awam. Inilah identitas yang merupakan ciri khas Al-Ittihadiyah ketika pertama sekali organisasi Islam ini didirikan.

Sebelum Al-Ittihadiyah didirikan, di Sumatera Utara (ketika itu masih merupakan keresidenan Sumatera Timur) telah eksis dua organisasi Islam, yaitu Al-Jam'iatul Washliyah dan Muhammadiyah. Al-Jam'iatul Washliyah sering disebut

sebagai organisasi kaum tua, sedangkan Muhammadiyah disebut organisasi kaum muda. Memang tidak mudah mendefinisikan term kaum tua dan kaum muda, namun praktik keagamaan seringkali dikemukakan untuk membedakan kedua komunitas ini. Pelaksanaan *Qunut* ketika shalat subuh, menzhahirkan niat (*ushalli*) ketika akan mendirikan shalat, acara *tahlilan* atau kenduri kematian, doa berjama'ah dengan mengangkat tangan, merupakan contoh praktik-praktik keagamaan yang diamalkan kaum tua atau Al-Jam'iatul Washliyah. Sedangkan kaum muda atau Muhammadiyah sama sekali menolak praktik-praktik tersebut dan menyatakannya sebagai *bid'ah*. Persoalan *furu'iyah* ini seringkali memperuncing relasi antara kedua komunitas Muslim ini. Dalam kerangka inilah, Al-Ittihadiyah hadir dan mencoba menjembatani perbedaan antara kaum tua dan kaum muda dengan maksud mempersatukan umat Islam.

Sebagaimana umumnya terjadi di wilayah Indonesia lainnya, di Sumatera Timur, perbedaan paham antara kaum muda dengan kaum tua seringkali menimbulkan 'gesekan' bahkan konflik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Konflik antara dua kelompok umat Islam ini seringkali berbentuk saling ejek dan saling melontarkan tuduhan 'kafir mengkafirkan'. Begitupun, sulit mencari referensi atau data-data tertulis berkaitan dengan upaya konkrit yang dilakukan Al-Ittihadiyah untuk menjembatani perbedaan antara dua komunitas Muslim ini. Satu-satunya statemen yang dapat ditafsirkan sebagai bukti dari sikap 'netral' dan ingin menengahi ini adalah pernyataan bahwa Al-Ittihadiyah bukanlah organisasi yang berusaha mengembangkan paham-faham dan aliran baru dalam agama. Al-Ittihadiyah didirikan



dengan maksud utama mempersatukan kalangan kaum Muslimin.<sup>11</sup>

Dalam kenyataannya, upaya Al-Ittihadiyah untuk menyatukan kaum tua dan kaum muda tidaklah mudah. Sebagaimana dimuat dalam Sinar Deli edisi 28 Januari 1935, Al-Ittihadiyah sendiri sering digosipkan sebagai organisasi yang lebih simpati dengan azas dan gerakan baru kaum muda. Beberapa orang pengurus besar dan cabang Medan Al-Ittihadiyah bahkan disebut sebagai *propagandisten paham baroe*.<sup>12</sup> Sebenarnya sulit mencari bukti-bukti yang dapat menyimpulkan bahwa Al-Ittihadiyah simpati dengan azas dan gerakan kaum muda. Sebab, bila dilihat dari praktik-praktik keagamaannya, Al-Ittihadiyah sebenarnya memiliki banyak persamaan dengan kaum tua. Tampaknya, satu-satunya sebab yang membuka peluang terhadap tuduhan itu adalah aktivitas Al-Ittihadiyah dalam mendirikan atau mengembangkan sekolah yang banyak kemiripannya dengan sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah. Karenanya, tidak berbeda dengan Al-Washliyah dan Nahdlatul Ulama, Al-Ittihadiyah sebenarnya termasuk organisasi Islam yang tradisional dalam soal-soal agama, tetapi cenderung bersikap modern dalam soal dunia atau lembaga-lembaga pendidikannya.<sup>13</sup>

Ketika dideklarasikan pada 27 Januari 1935, dalam masalah *i'tiqad*, Al-Ittihadiyah secara tegas menyatakan bahwa mereka berpendirian menurut *i'tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yaitu *i'tiqad* yang sesuai dengan pendirian Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi.<sup>14</sup> Sedangkan dalam masalah Fiqh, sejak awal berdirinya, secara formal Al-Ittihadiyah telah menyatakan sikap 'netralnya' menyangkut mazhab Fiqh. Dalam azas dan tujuan organisasi, secara eksplisit Al-

Ittihadiyah menyatakan bahwa organisasi ini tidak memihak salah satu dari mazhab yang empat, tetapi menampung seluruh komunitas Muslim yang menjadi salah satu pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.<sup>15</sup> Begitupun, dalam realitas empirik, ternyata Al-Ittihadiyah tampak lebih cenderung pada mazhab Syafi'iyah. Itulah mungkin yang menyebabkan mengapa dalam perkembangan selanjutnya, pendirian Al-Ittihadiyah mengenai mazhab Fiqh ini akhirnya berubah. Pada muktamar ¼ abad Al-Ittihadiyah yang dilangsungkan di Medan, H. Mahmud Abu Bakar, yang ketika itu menjabat sebagai ketua umum, secara tegas menyatakan bahwa Al-Ittihadiyah memakai dan sependirian dengan mazhab Syafi'iyah.<sup>16</sup>

## 2. Orientasi Politik

Al-Ittihadiyah bukanlah organisasi politik. Sikap dan pendirian ini belum pernah berubah sejak Al-Ittihadiyah didirikan sampai perkembangannya saat ini, baik pada masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, bahkan era reformasi saat ini. Karena bukan merupakan partai politik, maka Al-Ittihadiyah dengan seluruh anggotanya menyalurkan aspirasi dan cita-cita politiknya melalui partai-partai politik Islam. Ketika di tahun 1947, hubungan antara Yogyakarta dan Sumatera secara politis pulih, maka bersama-sama Al-Jamiyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah menyatakan diri sebagai pendukung Masyumi.<sup>17</sup> Dukungan ini, menurut H. Mahmud Abu Bakar diberikan Al-Ittihadiyah dalam rangka menghormati, menahuti dan mengimplementasikan kesepakatan ulama dan pemuka-pemuka Islam di Yogyakarta bahwa hanya ada satu partai politik yang berazaskan Islam, yaitu Masyumi.<sup>18</sup> Dalam



anggaran dasar Masyumi tahun 1945, pada pasal II secara eksplisit dinyatakan bahwa Masyumi bertujuan *menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan*.<sup>19</sup> Karena itu, dalam pandangan Al-Ittihadiyah, Masyumi adalah satu-satunya partai politik berasaskan Islam yang bertujuan memperjuangkan agar terlaksananya ajaran dan hukum Islam, baik dalam tataran perseorangan, masyarakat, maupun negara.<sup>20</sup>

Sama halnya dengan sejumlah organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Washliyah, keberadaan Al-Ittihadiyah dalam Masyumi adalah sebagai salah satu anggota istimewa yang berhak memberi nasehat atau saran kepada partai. Untuk kepentingan inilah Al-Ittihadiyah membuka perwakilannya di Jakarta. Pada masa Orde Lama, sejumlah kader Al-Ittihadiyah duduk menjadi wakil-wakil rakyat, diantaranya Hadji Mahmud Abu Bakar (anggota DPR Daswati I Sumatera Utara), H. Sajuthi Noor (anggota DPR kotapradja Medan), M. Saleh Perangin-angin (anggota DPR kabupaten Deli Serdang). Meski demikian harus diakui bahwa secara kuantitatif jumlah kader Al-Ittihadiyah yang mendapat kedudukan, baik sebagai pengurus partai maupun wakil rakyat di DPR, relatif minim bila dibanding dengan kader-kader Al-Washliyah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ketika presiden Sukarno membubarkan Masyumi, keanggotaan istimewa Al-Ittihadiyah pun berakhir. Dalam tataran empirik, relasi antara Al-Ittihadiyah dengan Masyumi, terutama tokoh-tokoh dan bekas anggota istimewa Masyumi, hanya berlangsung atas dasar *ukhuwah Islamiyah*. Sejak saat

itu, wajah Al-Ittihadiyah di pentas politik bukan saja menurun, tetapi dapat dikatakan hampir tidak tampak lagi.

Ketika pemerintahan Orde Baru dimulai, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi mencoba mendekati Soeharto untuk merestorasi partainya. Namun keinginan ini segera ditolak pemerintah Orde Baru, dan sebagai gantinya, presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1968, yang membolehkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Ketika itu, bersama 16 organisasi massa Islam lainnya yang tergabung dalam Amal Muslim Indonesia, Al-Ittihadiyah menyatakan diri sebagai pendukung Parmusi. Cita-cita dan tekad untuk melaksanakan *syari'at* Islam dalam seluruh lapangan kehidupan, baik pada level individu, masyarakat, dan negara, tampaknya merupakan obsesi dan tujuan utama diberikannya dukungan Al-Ittihadiyah ke dalam Parmusi. Tidak mengherankan bila sejak saat itu aspirasi politik Al-Ittihadiyah beserta seluruh anggotanya disalurkan melalui Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).<sup>21</sup>

Sebenarnya, pemerintah Orde Baru memberikan *warning* agar para tokoh-tokoh Masyumi tidak diikut sertakan dalam kepengurusan dan keanggotaan Parmusi. Sepertinya, pemerintah Orde Baru merasa *phobi* terhadap kekuatan politik Islam sebagaimana pernah diperlihatkan Masyumi melalui kemenangannya dalam Pemilu 1955. Namun, karena posisi Al-Ittihadiyah tidak begitu terlihat mencolok dalam Masyumi, maka beberapa tokoh elit organisasi ini berhasil memasuki Parmusi, di antaranya yang pernah duduk di pimpinan pusat Parmusi adalah Drs. H. Imran Kadir dan H. A. Fuad Said.

Pada tahun 1970, ketika presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 1970, terjadi



perubahan drastis dalam tubuh Partai Muslimin Indonesia. Merespon moment itu, Al-Ittihadiyah berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan kader-kader organisasinya ke dalam pimpinan elit Parmusi. Namun, satu-satunya tokoh elit Al-Ittihadiyah yang berhasil mendapatkan posisi penting adalah H.A. Fuad Said. Ketika itu, beliau mendapat mandat penuh dari pimpinan pusat Parmusi untuk membentuk pimpinan wilayah partai di tiga propinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

Ketika pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 perihal penyederhanaan partai-partai politik peserta Pemilu, maka satu-satunya pilihan bagi partai-partai Islam adalah memfusikan diri ke dalam satu partai. Dari proses fusi itu lahirlah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sama dengan masa sebelumnya, Al-Ittihadiyah hanya berhasil memasukkan dua kadernya ke dalam PPP. Dua kader tersebut merupakan 'wajah lama', yaitu H. A. Fuad Said yang terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara dan Drs. H. Imran Kadir yang berhasil menduduki posisi sebagai ketua Departemen Koperasi/Wiraswasta PPP dan satu-satunya wakil Al-Ittihadiyah yang menjadi anggota DPR/MPR dari fraksi PPP.

Secara umum, setelah Pemilu 1977, kiprah Al-Ittihadiyah di bidang politik semakin tidak jelas. Minimnya kader-kader organisasi ini yang berhasil masuk sebagai pengurus inti atau elit PPP, merupakan faktor utama yang menyebabkan semakin 'layunya' kiprah Al-Ittihadiyah di bidang politik. Tampaknya, Al-Ittihadiyah mengalami persoalan serius dalam kaderisasi anggota dan regenerasi kepemimpinan sehingga organisasi ini tidak berhasil

memproduksi kader-kader yang mumpuni di bidang politik dan menempatkannya pada pucuk pimpinan PPP. Itulah sebabnya, setelah wafatnya H. A. Fuad Said dan Drs. H. Imran Kadir, sulit menemukan kader-kader Al-Ittihadiyah dalam partai politik dan wakil rakyat di DPR dan DPRD.

### 3. Kemaslahatan Umat

Al-Ittihadiyah memandang hal ini sebagai masalah yang sangat penting. Sejak berdirinya, organisasi Islam ini senantiasa berusaha mengedepankan kemaslahatan umat Islam. Ketika konflik kaum tua dan kaum muda berlangsung, Al-Ittihadiyah menghimbau umat Islam dan anggotanya untuk saling menghormati perbedaan mazhab dan memelihara *ukhuwah Islamiyah*.

Dalam konteks kehidupan sosial, pada muktamarnya yang pertama, Al-Ittihadiyah secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini akan tetap berdiri di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan, seperti kaum bangsawan, ulama, penuntut ilmu, intelektual, kelas menengah, dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Dalam konteksnya dengan penguasa, pada masa pra kemerdekaan Al-Ittihadiyah menekankan pentingnya memperhatikan dan menghormati aturan-aturan negeri serta adat kebiasaannya, baik dari *gouvernement* tanah Hindia Belanda maupun pemerintahan *zelfbestuur* atau raja-raja.<sup>22</sup> Ketika Indonesia merdeka, untuk mencapai kemaslahatan itu, Al-Ittihadiyah senantiasa menyeru umat untuk patuh kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin bangsa. Secara khusus, dalam hal kemaslahatan internal umat Islam, pengurus Al-Ittihadiyah pernah berpesan: *cintailah*



perkumpulan-perkumpulan Islam seperti Muhammadiyah, Al-Djami'atul Washliyah, dan Al-Ittihadiyah. Walaupun jalannya berlainan, tetapi tujuan seluruh organisasi Islam itu serupa. Dari itu, jangan ada lagi umat Islam yang membenci perkumpulan-perkumpulan Islam yang lain.<sup>23</sup>

#### 4. Kiprah Organisasi

Menurut Fuad Said, sejak berdiri hingga tahun 1999, Al-Ittihadiyah telah meletakkan dasar-dasar usaha perjuangannya dalam 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial.<sup>24</sup> Ketiga bidang ini merupakan aktivitas 'primadona' Al-Ittihadiyah sepanjang perjalanan sejarahnya hingga saat ini.

##### a. Pendidikan

Perhatian Al-Ittihadiyah terhadap pendidikan dapat dikatakan demikian besar. Diantara tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk: mengusahakan berdirinya rumah-rumah perguruan Islam dan untuk mengatur serta menyesuaikan daftar pelajaran dalam rumah-rumah perguruan Al-Ittihadiyah dan perguruan lain yang bergabung dengan Al-Ittihadiyah.<sup>25</sup> Motivasi memajukan bangsa dan mencermati masih besarnya angka buta huruf (ketika itu mencapai angka 93%) merupakan *backgroud* dan motivasi yang berada dibelakang pendirian lembaga-lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah, baik sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi.<sup>26</sup>

Menurut K. H. Sajuhi Noor, salah seorang tokoh ulama Al-Ittihadiyah, tujuan pendidikan Islam yang digagas Al-Ittihadiyah adalah:

- (a) Menciptakan putra/i muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat
- (b) Bertujuan 'ubudiyah, yakni agar putra/i muslim memperhambakan dirinya kepada Allah Swt
- (c) Menjadikan putra/i muslim menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia.<sup>27</sup>

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam perspektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersatukan tiga aspek utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu ilmu, iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang berilmu, beriman, dan beramal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur.<sup>28</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dwi sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua sistem kelembagaan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah memebentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

Berkenaan dengan pendidikan ini, salah seorang mantan ketua Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah menyatakan bahwa bagi Al-Ittihadiyah, pendidikan merupakan usaha yang sangat mendasar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif Al-Ittihadiyah, konsep manusia seutuhnya itu adalah sosok manusia yang memiliki kesatuan integral antara *head*, *heart*, dan *hand*.<sup>29</sup>

Bagi Al-Ittihadiyah, yang dimaksud dengan *head* adalah pengembangan dimensi kecerdasan nalar atau akal manusia. Dalam pandangan Al-Ittihadiyah, untuk mampu melakukan



suatu aktivitas atau usaha, maka diantara syarat utama yang diperlukan seseorang adalah kecerdasan pikiran.<sup>30</sup> Untuk pengembangan dimensi ini, Al-Ittihadiyah mengorganisir dua jenis kurikulum pendidikan. Untuk kelembagaan madrasah, diberikan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum sebanyak 30%, sedangkan untuk kelembagaan sekolah sebanyak 70%.<sup>31</sup>

Kemudian yang dimaksud *heart* adalah jiwa, qalbu, atau hati nurani. Pendidikan harus mengembangkan jiwa, qalbu atau hati nurani agar manusia memiliki akhlak dan kepribadian yang baik atau terpuji. Untuk mengembangkan akhlak atau kepribadian ini, diperlukan ilmu agama. Dalam konteks ini, dalam kurikulum madrasah Al-Ittihadiyah diberikan 70% bidang studi ilmu agama, dan untuk sekolah sebanyak 30%.<sup>32</sup>

Sedangkan *hand* adalah tangan, yakni dimensi yang menyangkut keterampilan jasmaniyah dalam melakukan tugas-tugas fisik-material. Menurut Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam bukan hanya bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual dan kepribadian mulia, tetapi juga keterampilan jasmaniyah. Persoalan ini sebenarnya telah menjadi fokus perhatian pendiri Al-Ittihadiyah, Sjech Hadji Ahmad Dahlan, yang menginginkan agar murid-murid Al-Ittihadiyah antara lain harus diberi didikan dalam *gymnastiek*.<sup>33</sup>

Usaha Al-Ittihadiyah dalam pendidikan tidak hanya terfokus pada usaha pendirian sekolah atau madrasah, tetapi juga menggabungkan sekolah atau madrasah yang belum masuk ke dalam satu organisasi Islam ke dalam Al-Ittihadiyah. Sejak berdiri sampai tahun 1940, Al-Ittihadiyah telah berhasil menggabungkan enam madrasah ke dalam organisasinya,

yaitu: (1) madrasah Al-Islamijay Saintisweg, (2) madrasah Al-Intisjarijah Soengei Kerastrast, (3) madrasah Al-Hoedadiniyah Gloegoer, (4) madrasah Daoedijah Jalan Antara, (5) madrasah Al-sjarifijah Sidodadi, dan (6) madrasah Al-Alijah Pertjoetweg.<sup>34</sup>

#### b. Dakwah

Secara umum, ada dua istilah yang berkembang di kalangan komunitas Al-Ittihadiyah berkaitan dengan dakwah. *Pertama*, dakwah disebut dengan propaganda Islam dan *kedua*, dakwah juga disebut dengan *tabligh*.

Istilah propaganda Islam tampaknya merupakan term yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama. Istilah propaganda dikembangkan dari *propagandisten* yang juga dimaknai dengan *muballighi* yang diutus ke suatu tempat untuk menyiarkan agama Islam.<sup>35</sup> Contoh untuk hal ini, adalah pengiriman para *ustadz* dan *muballigh* Al-Ittihadiyah ke Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Aktivitas inilah yang selalu dilakukan Al-Ittihadiyah sejak organisasi ini didirikan sampai masa kemerdekaan, Orde Lama.

Agak berbeda dengan propaganda, term *tabligh* tampaknya dimaknai sebagai upaya menyampaikan segala hukum-hukum Islam dengan tujuan agar umat Islam taat kepada Allah Swt dan rasul-Nya, Muhammad Saw. Pada awalnya, aktivitas propaganda Islam disatukan dengan pers dibawah Majelis Pers dan Propaganda Islam, sedangkan *tabligh* memiliki majelis tersendiri yang disebut Majelis Tabligh. Namun dalam perkembangan selanjutnya, majelis pers dan propaganda Islam dihapuskan. Dalam tahun 1960, badan



otonom yang mengurus dakwah berada dibawah kendali Majelis Tabligh Al-Ittihadiyah. Sedangkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama dan mengurus mereka, selain Majelis Tabligh, dibentuk pula Zending Islam Al-Ittihadiyah. Istilah ini tetap dipertahankan sampai masa Orde Baru, bedanya, istilah Majelis Tabligh disatukan dengan dakwah.<sup>36</sup>

Pada masa awal berdiri sampai awal Orde Baru, dakwah merupakan program unggulan Al-Ittihadiyah. Dalam konteks ini, kontribusi besar yang diberikan Al-Ittihadiyah tidak saja dalam bentuk mengislamkan masyarakat yang belum menganut suatu agama, tetapi sebagaimana dinyatakan Noer, Al-Ittihadiyah termasuk organisasi Islam yang sedikit banyaknya telah menjaga tauhid umat. Sekolah dan madrasah yang didirikan Al-Ittihadiyah juga berfungsi menjaga kelangsungan tauhid pada generasi Muslim berikutnya.<sup>37</sup>

Wilayah dakwah untuk mempropagandakan Islam kepada komunitas yang belum beragama umumnya difokuskan pada wilayah Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Dalam pelaksanaannya, tokoh-tokoh elit dan ulama Al-Ittihadiyah turut serta secara aktif turun ke lapangan untuk melaksanakan dakwah dan mengembangkan syi'ar Islam.

### c. Sosial

Dalam lapangan sosial, aktivitas Al-Ittihadiyah yang paling menonjol adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak miskin dan yatim. Untuk keperluan ini, sejak tahun 1943, Al-Ittihadiyah telah mendirikan panti asuhan anak miskin dan yatim di Jalan Japaris Medan. Ketika

terjadi revolusi kemerdekaan yang diikuti oleh agresi Belanda ke Sumatera Timur, panti asuhan anak-anak miskin dan yatim yang ada di sana diungsikan ke Pematang Siantar kemudian ke Tebing Tinggi. Kemudian pada tahun 1948, panti asuhan tersebut dipindahkan kembali ke kota Medan bertempat di Jalan Sei Kera Nomor 199. Baru pada 5 Januari 1957, Al-Ittihadiyah berhasil menempatkan panti asuhannya secara permanen di jalan Bromo, Kampung Tegal Sari Medan. Panti asuhan Mamiyai ini tetap eksis dan melaksanakan kegiatannya hingga sekarang.

Dalam panti asuhan Mamiyai, anak-anak yatim tidak saja diberikan perawatan atau pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga dibina ruhaniahnya yang menyangkut ilmu pengetahuan dan *akhlaq al-karimah*. Al-Ittihadiyah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, SMP, SMA, Ibtidai, Tsanawi, Aliyah, dan PGA bagi pembinaan kecerdasan, keterampilan, dan *akhlak al-karimah* anak-anak yatim yang berdomisili di sana.

Selain membina panti asuhan untuk menyantuni, memelihara, dan mendidik anak-anak yatim, aktivitas sosial Al-Ittihadiyah juga difokuskan pada upaya membantu para *muallaf* dengan membangun asrama zending Islam. Di dalam asrama zending Islam ini, para *muallaf* dididik dengan ajaran Islam, dengan harapan agar kelak mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan lainnya di bidang sosial adalah dengan menjalin silaturahmi antara sesama anggota, mendidik anggota untuk hidup hemat, dan saling tolong-menolong antara sesama anggota Al-Ittihadiyah. Untuk itu dibentuklah Majelis Simpanan dan Pertolongan (MASPAI). Majelis ini dibentuk



berdasarkan keputusan rapat Pengurus Besar Al-Ittihadiyah tanggal 6 Juli 1939. Ketika mula berdiri, majelis ini diketuai oleh Ali Basjah dengan dibantu oleh Soetan Baidoerie sebagai sekretaris dan Abdoel Hamid sebagai bendahara. Dalam statuten Al-Ittihadiyah, secara eksplisit dikemukakan bahwa tujuan didirikannya Majelis Simpanan dan Pertolongan ini adalah:

1. Memperkoeat perhoeboengan selatoerrahim antara pengeroes dengan anggota dengan djalan datang mendatangi keroemah masing-masing.
2. Mendidik anggota soepaja berhemat menjimpan oeang berdikit dikit setiap boelan.
3. Bertolong-tolongan dalam hal kematian dan kesoesahan atas anggota-anggota.<sup>38</sup>

### C. Dinamika Perkembangan Organisasi

Al-Ittihadiyah didirikan tanggal 27 Januari 1935 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1353 Hijriah. Organisasi Islam ini dideklarasikan di gedung *Zelfstandig Yong Islamiten Bond* Jalan Sisingamangaraja, belakang Masjid Raya Medan. Ketika itu, bersama-sama dengan para ulama, cerdik pandai, dan murid-muridnya yang berjumlah 200 orang, Sjech Hadji Ahmad Dahlan meresmikan berdirinya Al-Ittihadiyah.<sup>39</sup>

Secara formal, maksud didirikannya Al-Ittihadiyah adalah untuk:

- a. Mempertegoeh perhoeboengan silatoerrahim sesama oemat Islam
- b. Mengoesahkan berdirinja roemah2 pergoeroean Islam

- c. Mengatoer dan mensesoeaikan daftar peladjaran dalam roemah2 pergoeroean A.I. dan roemah2 pergoeroean jang bergaboeng dengan A.I.
- d. Memperloeas sji'ar dan propaganda Islam, dengan djalan melangsoengkan tabligh2, memperingati dengan oepatjara jang sepatoenja hari2 peringatan dalam agama Islam
- e. Dan lain2 oesaha jang haroes dan halal.<sup>40</sup>

Dalam anggaran dasar Al-Ittihadiyah pada pasal 2 dinyatakan bahwa organisasi ini berdasarkan Islam dan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian dalam pasal 3 diterakan pula bahwa Al-Ittihadiyah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tercapainya kualitas umat Islam yang maju dan mandiri serta dapat mengamalkan ajaran Islam *li-i'la kalimatillah*.
2. Terwujudnya cita-cita Islam dalam masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai idiologi negara menuju masyarakat madani yang diridhoi Allah SWT.<sup>41</sup>

Pendiri Al-Ittihadiyah adalah Sjech Hadji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Menurut Fuad Said, Ahmad Dahlan adalah seorang etnis Melayu.<sup>42</sup> Pendidikan awalnya beliau terima dan dalam dari madrasah Mahmudiyah di kabupaten Langkat. Setelah itu, beliau kemudian bertahun-tahun bermukim dan menuntut ilmu di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekembalinya ke tanah air, beliau menekuni profesi sebagai guru agama sehingga menjadi salah seorang ulama terkemuka di masanya. Ketika studi di Al-Azhar, Sjech Hadji Ahmad Dahlan berkenalan



dengan seorang wanita Mesir yang bernama Hj. Ummi Hanim Ali, yang kemudian dipersunting menjadi isteri beliau. Dalam sejarah Al-Ittihadiyah, Hj. Ummi Hanim Ali juga merupakan tokoh yang turut berjasa, tidak saja dalam memberikan dukungan moril, tetapi juga materil seperti menyumbangkan uang dan emas milik pribadinya untuk mendukung pendirian dan kontinuitas Al-Ittihadiyah.<sup>43</sup>

Berbeda dengan kebanyakan organisasi Islam yang ada di tanah air, tidak lama setelah mendirikan Al-Ittihadiyah, Sjech Hadji Ahmad Dahlan dan isterinya hijrah ke luar Sumatera Timur dan meninggalkan organisasi yang baru dibangun atau didirikannya. Tidak diketahui dengan pasti apa latar belakang hijrahnya pendiri organisasi ini. Dalam laporan pengurus Al-Ittihadiyah pada muktamarnya yang pertama, tahun 1941, hanya dinyatakan sebagai berikut: *Toean H. A. Dahlan alm – sebagai ketoea oemoem – berhoeboeng dengan beberapa hal dan keadaan, meninggalkan Soemattera Timoer.*<sup>44</sup> Peristiwa kepindahan ini merupakan tantangan berat pertama yang dihadapi Al-Ittihadiyah dalam melangsungkan keberadaannya. Namun tantangan ini berhasil dihadapi oleh para tokoh pendiri lainnya dengan terus mengembangkan Al-Ittihadiyah ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ketika pertama sekali didirikan, komposisi Pengurus Besar Al-Ittihadiyah terdiri dari:

Ketua Umum	: Syech Hadji Ahmad Dahlan
Ketua Muda I	: Lasimoen
Ketua Muda II	: Mohamad Nazir Nasution
Djoeroesoerat I/Sekretaris	: Abdul Hamid Toeloes
Djoeroesurat II	: M. M. Syarif Siregar

Bendahari	: O.K. Amran, Hadji Azhari, Tasman, Mohamad Ali, Abdul Hamid, dan Ismail
Penasehat	: Sjech Hasan bin Ma'soem dan Sjech Abdullah Afifuddin
Ketua Kehormatan	: Tengku Otteeman Sani Perkasa Alamsjah dan Sultan Sulaiman <sup>45</sup>

Meskipun terdapat etnis Jawa dan mandailing, namun bila dilihat dari komposisi etnis, para pengurus awal Al-Ittihadiyah di atas didominasi oleh etnis Melayu. Sedangkan dari sisi profesi dan kedudukan di masyarakat, para pengurus besar Al-Ittihadiyah sebagaimana diterakan di atas terdiri dari berbagai kalangan. Ketua Muda I dan Sekretaris II (djoeroesoerat II), yakni Lasimoen dan Sjarif Siregar, keduanya merupakan pegawai kantor Pos, Telepon, dan Telegraph (PTT). Sekretaris I, yakni Abd. Hamid, adalah seorang anggota polisi yang kemudian menjadi komisaris polisi di Aceh. Sjech Hasan bin Ma'soem adalah seorang ulama terkemuka di Sumatera Timur dan merupakan imam besar istana kesultanan Langkat. Demikian juga Sjech Abdullah Afifuddin, beliau adalah seorang ulama dan guru besar Langkat, mantan kepala kantor Departemen Agama kabupaten Deli Serdang, pernah menjabat sebagai dekan fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan, dan kelak hijrah serta 'menetap' di Nahdlatul Ulama (NU). Sultan Sulaiman merupakan sultan dari Kerajaan Serdang. Sedangkan Sultan Otteeman Sani Perkasa Alamsjah merupakan putera mahkota Kerajaan Deli. Inilah profil pengurus Al-Ittihadiyah ketika pertama sekali organisasi Islam itu didirikan.

Berbeda dengan Muhamamdiyah yang mayoritas etnis



Minangkabau dan Al-Washliyah yang mayoritas Batak, dilihat dari profil para pengurusnya dapat dikemukakan bahwa Al-Ittihadiyah merupakan organisasi Islam multi etnik dan multi profesi, meski harus diakui bahwa etnis Melayu merupakan proponent utama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan ulama dan sultan-sultan Melayu dalam Al-Ittihadiyah. Namun, ketika Al-Ittihadiyah mengembangkan organisasinya ke berbagai daerah, pluralitas etnik ini tampak semakin kentara. Pluralitas seperti ini terus berlangsung dan dipertahankan Al-Ittihadiyah. Dalam serangkaian muktamar Al-Ittihadiyah, yaitu satu kali semasa era pra kemerdekaan (1941), sebelas kali di era orde lama (1945-1968), dan empat kali di era Orde baru (1975-1999), pluralitas tersebut tetap dipertahankan. Para pengurus yang dipilih dan terpilih dalam serangkaian muktamar tersebut tetap terdiri dari berbagai kalangan dan kelompok etnik Muslim. Begitu juga, ketika cabang-cabang Al-Ittihadiyah didirikan diberbagai daerah, secara etnisitas, komposisi pengurusnya selalu terdiri dari berbagai suku, seperti Melayu, Karo, Jawa, Banten, Mandailing, Batak, bahkan Minangkabau.<sup>46</sup>

Ketika pertama sekali didirikan, untuk memepermudah penyelenggaraan aktivitas organisasi, Al-Ittihadiyah membentuk majelis-majelis yang terdiri dari:

1. Madjelis Organisatie dan Djoeroe Perekasa yang dipimpin oleh Abdul Hamid Toeloes dan Sjarif Siregar
2. Madjelis Secretarie dan Penjiaran Oemoem
3. Madjelis Tarbijah
4. Madjelis Tabligh
5. Madjelis Fatwa
6. Madjelis Pers dan Propagnada<sup>47</sup>

Selain majelis di atas, Al-Ittihadiyah juga membentuk badan-badan otonom organisasi, seperti Persatuan Pemuda Al-Ittihadiyah (PPAI) dan Persatuan Puteri Al-Ittihadiyah (PERPAI). Kedua badan otonom ini memiliki peran besar dalam menghidupkan dan menjamin kontinuitas organisasi.

Pada masa Orde Lama, badan-badan otonom dalam Al-Ittihadiyah berjumlah sembilan, yaitu:

1. Persatuan Putri Al-Ittihadiyah (PERPAI)
2. Gerakan Pemuda Al-Ittihadiyah (GERPAI)
3. Angkatan Putri Al-Ittihadiyah
4. Kepanduan Al Muhadjirin
5. Majeli Anak Miskin dan Yatim Al-Ittihadiyah (MAMIYAI)
6. Zending Islam Al-Ittihadiyah
7. Majelis Pendidikan Pengajaran Al-Ittihadiyah
8. Majelis Tabligh Al-Ittihadiyah<sup>48</sup>

Pada masa Orde Baru, jumlah badan otonom itu bertambah satu lagi sehingga seluruhnya berjumlah sepuluh, yaitu:

1. Persatuan Puteri (Muslimat) Al-Ittihadiyah
2. Gerakan Pemuda Al-Ittihadiyah (GERPAI)
3. Angkatan Putri Al-Ittihadiyah
4. Panti Asuhan Anak Yatim MAMIAI Al-Ittihadiyah
5. Majelis Zending Islam Al-Ittihadiyah
6. Majelis Pendidikan/Pengajaran dan Kebudayaan Al-Ittihadiyah
7. Majelis Tabligh dan Da'wah Al-Ittihadiyah
8. Majelis Fatwa Al-Ittihadiyah
9. Majelis Ekonomi Al-Ittihadiyah.<sup>49</sup>

Masa-masa awal eksisnya Al-Ittihadiyah, badan-badan otonom di atas, khususnya PPAI dan PERPAI sering difungsikan



sebagai instrumen untuk unjuk kekuatan (*showforce*) dan menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memasuki Al-Ittihadiyah. Rapat-rapat umum dan pawai akbar selalu melibatkan PPAI dan PERPAI. Pada tahun 1935, tahun ketika Al-Ittihadiyah didirikan, organisasi ini berhasil menghimpun 750 orang pemuda/pemudi untuk melakukan pawai keliling kota Medan. Pawai akbar yang juga dapat dinilai sebagai *showforce* Al-Ittihadiyah adalah *optocht* yang dilakukan pada tahun 1937. Ketika arak-arakan Al-Ittihadiyah tiba di Kerkstraat dan akan berbelok ke gang Paleisweg, mereka bertemu dengan arak-arakan *showforce* Al-Wasliyah yang datang dari Soekamoelia. Kedua arak-arakan ini bersatu, berjalan bersama-sama menuju istana Maimun, sehingga barisan arak-arak itu merupakan barisan besar yang terdiri dari beribu-ribu murid.<sup>50</sup> Pada tahun 1938, dalam rangka memperingati maulid dan isra' mi'raj, organisasi ini kembali melibatkan PPAI, PERPAI, dan murid-murid sekolah Al-Ittihadiyah dalam pawai akbar. Fakta yang sangat menarik, seluruh pawai unjuk kekuatan itu selalu berakhir di istana Maimun dan diterima oleh sultan Negeri Deli. Dari sini, tampak relasi yang kuat antara Al-Ittihadiyah dengan kesultanan Melayu. Hal itu dibuktikan lagi ketika ulang tahun kerajaan Negeri Deli pada 1938, seluruh anggota Al-Ittihadiyah dari pengurus besar hingga cabang-cabangnya serta murid-murid perguruan atau sekolahnya, melakukan *optocht* dan diterima oleh Sultan Deli, Putera Mahkota, Bendahara Negeri, wazir-wazir, dan orang-orang besar kerajaan Deli serta rantau jajahannya. Dalam kesempatan itu, secara tegas sultan Deli menyatakan sukacitanya atas kunjungan-kunjungan Al-Ittihadiyah ke istana sultan.<sup>51</sup>

Suatu hal yang tampaknya merupakan 'warna khas' Al-Ittihadiyah dalam mengembangkan organisasinya adalah upaya merangkul dan melibatkan penguasa wilayah ke dalam organisasi Al-Ittihadiyah. Ketika pertama sekali berdiri, organisasi ini berhasil mendapatkan dukungan sultan Langkat dan merangkul sultan Serdang dan putera mahkota kerajaan Deli menjadi penasehat Al-Ittihadiyah. Tidak terakomodasinya dengan baik sultan-sultan ini dalam organisasi Al-Washliyah dan Muhammadiyah<sup>52</sup> (dua organisasi Islam yang lebih dahulu berdiri di Sumatera Utara) merupakan momentum strategis bagi keberhasilan Al-Ittihadiyah dalam merangkul kedua penguasa daerah ini ke dalam organisasinya.

Melibatkan para penguasa daerah, seperti sultan dan para penghulu, ke dalam organisasi memang merupakan langkah strategis dan bisa bernilai efektif dalam mengembangkan organisasi. Keberhasilan Al-Ittihadiyah dalam mendirikan cabangnya di berbagai wilayah *Karolanden*, seperti Berastagi, Kabanjahe, Tiga Binanga dan Tiga Beringin serta Perboelan, umumnya dilatari oleh keterlibatan aktif sejumlah penguasa daerah. Sukses di Berastagi tidak dapat dilepaskan dari peran Soetan Koemala Boelan, yang menjabat sebagai penghulu Pekan Berastagi. Sukses di Kabanjahe, tidak bisa dilepaskan dari peran Muhammad Arif yang bergelar Maharadja, yang merupakan *Hoofdmantrie der Zout en Opium Regie* di Kabanjahe. Sukses pendirian cabang Tiga Beringin dan Tiga Binanga tidak juga bisa dilepaskan dari peran wakil raja Sinembah, wakil polisi, dan penghulu Pekan Tiga Binanga dan Tiga Beringin (Randi). Kemudian di daerah Perboelan, keberhasilan Al-Ittihadiyah mendirikan cabang di sana tidak terlepas dari peran Gale, penghulu Pekan Perboelan, yang



(2) pengembangan *syi'ar* atau dakwah Islam, (3) pendirian dan penggabungan sekolah dan perguruan-perguruan Islam ke dalam Al-Ittihadiyah, dan (4) pengasuhan atau pemeliharaan anak-anak yatim. Disamping keempat bidang itu, Al-Ittihadiyah juga membentuk majelis simpan pinjam serta majelis pers dan propaganda yang menerbitkan majalah 'Bahtera'.<sup>56</sup>

Secara khusus, dalam bidang pengembangan organisasi, pada masa pra kemerdekaan Indonesia, Al-Ittihadiyah telah berhasil membentuk cabang-cabangnya di berbagai daerah Sumatera Timur, dari mulai kota Medan, Langkat, Tanah Karo, Simalungun, Tebing Tinggi, Binjai, dan Bandar Setia, Deli Serdang. Dalam hal ini, motivasi mengembangkan *syi'ar* atau dakwah Islam dan pendirian sekolah atau madrasah, tampak selalu berada dibalik pendirian cabang-cabang Al-Ittihadiyah di berbagai daerah. Masih ditemukannya penganut animisme, minimnya pengetahuan agama dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Muslim di Sumatera Utara menjadikan motivasi tersebut semakin rasional dan positif untuk dilakukan.

Segera setelah Pengurus Besar Al-Ittihadiyah diresmikan, para tokoh organisasi ini membentuk kepengurusan Al-Ittihadiyah cabang Medan. Secara resmi, pengurus cabang Medan dibentuk pada tanggal 27 Januari 1935. Karena hari dan tanggalnya bersamaan, maka susunan kepengurusan Al-Ittihadiyah cabang Medan umumnya merupakan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Pengurus Besar Al-Ittihadiyah. Pada era pra kemerdekaan, salah seorang tokoh yang menjadi ketua Al-Ittihadiyah cabang Medan ini adalah Ibrahim Arsjad.

Setahun setelah organisasi Islam ini didirikan, tepatnya tanggal 3 Desember 1936, Al-Ittihadiyah membentuk cabangnya di Berastagi. Sebagaimana dinyatakan ketua panitia *conferentie Jubelleum* 6 tahun Al-Ittihadiyah, pendirian cabang Berastagi ini dianggap sebagai pintu pembuka jalan bagi Al-Ittihadiyah untuk mengembangkan dakwah Islam, khususnya ke daerah-daerah Karolanden dan Simalungun.<sup>57</sup> Tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam pendirian dan pengembangan Al-Ittihadiyah cabang Berastagi ini adalah sebagai berikut:

1. Raden Ahmad Rahidin yang merupakan ketua cabang dan wakil Pengurus Besar Al-Ittihadiyah untuk daerah Karolanden.
2. Soetan Koemala Boelan, penghulu Pekan Berastagi yang juga menjadi penasehat pengurus Al-Ittihadiyah cabang Berastagi.
3. Hadji Fachroeddin, seorang dukun patah di Berastagi, yang diangkat menjadi bendahara pengurus Al-Ittihadiyah cabang Berastagi.
4. Moethalib Ibrahim, seorang guru madrasah Al-Ittihadiyah Berastagi yang juga menjadi wakil pengurus besar kedua untuk daerah Karolanden.
5. Tuan Markoem, M. Soebandi, Sastrowikeromo, Minoen, M. Jacob, Selamat, Abdul Sjarif, Idris. Mereka semua menjadi anggota pengetua Al-Ittihadiyah cabang Berastagi.<sup>58</sup>

Ketika pertama sekali dibentuk, susunan kepengurusan Al-Ittihadiyah cabang Berastagi adalah sebagai berikut:



Ketua	: Abd. Sjarif
Wakil Ketua	: Markoem
Bendahara	: Abd Sjarip
Sekretaris I	: Soebandi
Sekretaris II	: Soekiman
Para Pembantu	: Djasman, Sastrowirokromo, Soeratmin, dan Kidjan.
Penasehat	: St. H. Boelan dan R. A. Rahidin
Ketua bagian Tarbiyah	: Mohd. Ali <sup>59</sup>

Dalam tahun yang sama, 1936, Al-Ittihadiyah juga mendirikan cabangnya di Kabanjahe. Pendirian cabang Kabanjahe merupakan inisiatif sebuah komite persiapan yang diketuai oleh Mohamad Arif yang bergelar Samporno Maharaja. Beliau dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa dalam pendirian Al-Ittihadiyah di wilayahnya. Untuk menindaklanjuti inisiatif komite tersebut, maka pada tanggal 27/28 Nopember 1936, secara resmi dibentuklah pengurus Al-Ittihadiyah cabang Kabanjahe. Ketika itu, susunan pengurus Al-Ittihadiyah cabang Kabanjahe yang dilantik adalah sebagai berikut:

Ketua/Voorzitter	: Djoemat
Sekretaris	: M. Arif (Semporna Maharadja)
Komisaris	: Datuk Koempoel dan Soekis
Penasehat	: Habib Hasan dan Hasian Siregar

Berselang dua tahun kemudian, Al-Ittihadiyah melebarkan 'sayapnya' di daerah *Karolanden* dengan mendirikan cabang di Tiga Binanga dan Tiga Beringin. Sama halnya dengan Kabanjahe, pendirian Al-Ittihadiyah cabang

Tigabinanga dan Tiga Beringin diawali dari pembentukan panitia persiapan yang diketuai oleh Tuan Mohamad Noer. Tiga Binanga adalah pusat sebenarnya dari penduduk asli tanah Karo yang beragama Islam.<sup>60</sup>

Bertempat di *loods* pekan Tiga Binanga, pada hari minggu tanggal 27 Pebruari 1938, secara resmi dibentuklah pengurus Al-Ittihadiyah cabang Tiga Binanga dan Tiga Beringin. Susunan kepengurusan yang disahkan ketika itu adalah:

Ketua/Voorzitter	: Randi
Wk. Ketua	: Mohamad Noer
Sekretaris	: Mohamad Misbah
Penningmeester	: Sepatmalam
Komisaris	: Oesman
Penasehat	: Hadji Soeleman, Hasan Machmud, dan Ibrahim

Ketua cabang Al-Ittihadiyah Tiga Binanga dan Tiga Beringin, Randi, adalah penghulu Pekan Tiga Beringin. Sedangkan para penasehat, yakni Hasan Machmud adalah *Hoofdonderwijzer Gouv. School*, sedangkan Hadji Soeleman dan Ibrahim, keduanya adalah guru agama pada sekolah Al-Ittihadiyah.

Setelah terbentuk, fokus usaha yang dilakukan para pengurus Al-Ittihadiyah cabang Tiga Beringin dan Tiga Binanga adalah menyelenggarakan majelis *tabligh*, peringatan hari-hari besar keagamaan, seperti maulid nabi Saw dan *isra' miraj*, dan mengembangkan *syi'ar* atau dakwah Islam kepada orang-orang yang belum menganut suatu agama.

Dalam tahun yang sama, 1938, Al-Ittihadiyah juga



membuka cabangnya di Perboelan. Wilayah ini merupakan salah satu daerah pedalaman atau pelosok yang berada di wilayah *Karolanden*. Namun antusias penduduk untuk mendirikan Al-Ittihadiyah cabang Perboelan sangat besar sekali. Meskipun termasuk daerah udik, namun lebih kurang 150 orang penduduk, diantaranya 50 orang kaum ibu, menghadiri acara pengesahan pengurus cabang Perboelan pada tanggal 31 Juli 1938.<sup>61</sup>

Ketika pertama sekali didirikan, susunan anggota pengurus Al-Ittihadiyah cabang Perboelan ini adalah sebagai berikut:

Ketua	: Gagah Sembiring
Wakil Ketua	: Gale (penghulu Pekan Perboelan)
Sekretaris	: Ali Akbar
Penningmeester	: Bantal
Komisaris	: Sampak dan Rehmalam
Penasehat	: H. Dja'far

Setelah cabang Al-Ittihadiyah tersebar di Medan dan beberapa daerah di wilayah *Karolanden*, pada tahun 1940, Al-Ittihadiyah mengembangkan organisasinya ke Simalungun. Daerah ini merupakan salah satu tanah Batak di mana masih banyak terdapat orang-orang yang belum memeluk suatu agama, di samping penganut agama Islam dan Kristen. Karena itu, motivasi sebenarnya pembentukan cabang Al-Ittihadiyah di Simalungun adalah dalam rangka pengembangan dakwah dan *syi'ar* Islam.

Pada hari Jumat tanggal 12 malam 13 April 1940, bertempat di madrasah *Amaloeddin Javastraat*, dengan dihadiri oleh 50 orang kaum bapak dan 70 orang kaum ibu, dibentuklah

pengurus cabang Al-Ittihadiyah Pematang Siantar, Simalungun. Pembentukan dan pengesahan pengurus cabang Pematang Siantar dilakukan secara langsung oleh ketua dan sekretaris Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, yakni H. Abd. Malik dan I. M. Noeruddin Sulan. Susunan kepengurusan Al-Ittihadiyah cabang Pematang Siantar yang dilantik ketika itu adalah sebagai berikut:

Ketua I	: M. Atmopawiro
Ketua II	: Mas Abd. Rasjad
Sekretaris I	: Mara Laeot Siregar
Sekretaris II	: Said Hasan Machdar
Bendahara	: Dt. Mohd. Noer
Para Pembantu	: Mas Djojopawiro, Mas Soekardi, dan Mas Redjo

Suatu hal yang menarik, dilihat dari komposisi etnik, meskipun terdiri dari etnik yang beragam, namun susunan pengurus Al-Ittihadiyah cabang Pematang Siantar tampak didominasi oleh etnis Jawa. Padahal, etnik asli Pematang Siantar adalah suku Batak, yakni Batak Simalungun. Diduga kuat, komposisi seperti itu disebabkan masih sedikitnya etnis Batak, khususnya Simalungun, yang telah memeluk agama Islam.

Setelah Al-Ittihadiyah cabang Pematang Siantar terbentuk, dalam bulan yang sama, yakni April 1940, Al-Ittihadiyah mendirikan cabangnya di Bandar Setia. Cabang ini merupakan cabang ketujuh dari seluruh cabang yang telah terbentuk sejak berdirinya Al-Ittihadiyah. Pengurus Al-Ittihadiyah cabang Bandar Setia terbentuk pada tanggal 23/24 April 1940. Pembentukan dan pelantikan pengurus



cabang Al-Ittihadiyah Bandar Setia dilakukan secara langsung oleh ketua dan ketua muda Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, yaitu H. Abd. Malik dan Lasimoen, dan disaksikan oleh komisaris Al-Ittihadiyah cabang Medan, yaitu M. Salimin. Susunan kepengurusan Al-Ittihadiyah Cabang Bandar Setia yang terbentuk ketika itu adalah sebagai berikut:

Ketua/Voorzitter : Kasan Dimangoen  
 Sekretaris : Mondy  
 Bendahara : H. Semaoen  
 Para Pembantu : H. Serat, Daoed, Tjokro, Sarbini, Ali,  
 H. Achmad, Ibrahim, dan Sastro

Masih dalam tahun 1940, Al-Ittihadiyah membentuk cabangnya di Tebing Tinggi. Persiapan pendirian cabang Tebing Tinggi ini sebenarnya telah dimulai sejak jauh hari, yaitu sejak tahun 1938, namun baru terwujud dengan dibentuknya susunan Pengurus cabang Al-Ittihadiyah Tebing Tinggi pada tanggal 24 Nopember 1940. Bertempat di madrasah *Raudathoeel Islamijah* dan dihadiri oleh kira-kira 120 orang, disahkanlah susunan kepengurusan cabang Tebing Tinggi yang terdiri dari:

Ketua : Mohamad Saleh  
 Wakil Ketua : Zainoeddin Arsjad Lubis  
 Sekretaris I : Abdul Aziz  
 Sekretaris II : Soeleman Lubis, Oesman Js, dan Saleh Aziz  
 Bendahara : Moehamad Noer  
 Penasehat : Haroen  
 Para Pembantu : Aboe Bakar, Sanoesi, Oesman, Machmoed,  
 Ibrahim, Abdul Rachman, Anas, Hasan  
 Lubis

Pembukaan cabang berikutnya terjadi pada tahun 1946. Dengan dipelopori pemuda pelajar madrasah dan pesantren K. H. A. Karim Tamin Binjai, pada tanggal 10 Januari 1946 didirikanlah Al-Ittihadiyah cabang kabupaten Langkat. Ketika itu, para pengurus yang dikukuhkan adalah:

- Ketua Umum, I, II : M. Arsjad Rahaman, M. Jaseh  
 Djasad, Mhd. Iljas Amin  
 - Sekretaris I dan II : Legiman dan M. Nurdin Saragih  
 - Bendahara : Zainal Jakin  
 - Para Pembantu : M. Kasim Arif, M. Kamil K., M.  
 Yahya, Ali Hasan, Hasanul'arifin,  
 Ngadi W, Ali Rahman, dan M.  
 Ansjari

Setelah tahun 1946, cabang Al-Ittihadiyah berikutnya yang didirikan adalah Al-Ittihadiyah cabang kota Binjai. Dibukanya cabang Binjai dikarenakan pada tahun 1946 status Binjai resmi sebagai kotapradja atau kotamadya. Melalui surat Pengurus Besar tanggal 22 Desember 1959 nomor 317/PB/AI/'59 dikukuhkanlah Al-Ittihadiyah cabang kota Binjai dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- Ketua I dan II : M. Jahja dan M. Rasjid  
 - Sekretaris I dan II : M. Kasim Arif dan Imat Perangin-  
 angin  
 - Para pembantu : M. Tahir, Aliaman, Amat B, M.  
 Sjarif, dan Ansjari

Pada tahun 1953, bertepatan dengan muktamar Al-Ittihadiyah ke-7 di Pematang Siantar, Al-Ittihadul Wathaniyah, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Sjech Hadji Abd.



Wahab bin Abd. Rauf Sei Lumut pada 1906, menyatakan diri bergabung ke dalam Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadul Wathaniyah merupakan organisasi Islam yang berkedudukan di Labuhan Batu dan tersebar di ebrbagai wilayah seperti Negeri Lama, Sei Bamban, Tanjung Halaban, Selat Besar, Sei Palas, Sei Lumut, Sei Sanggul, Sei Berombang, dan Panipahan (dekat bagaansiapi-api).<sup>62</sup> Organisasi ini memiliki sejumlah lembaga pendidikan islam yang tersebar di sel;uruh wilayah tersebut. Dengan bergabungnya organisasi ini, maka secara otomatis tersebar pulalah Al-Ittihadiyah ke kabupaten Labuhan Batu.

Pada era pra kemerdekaan dan Orde Lama, dalam hal pengembangan syi'ar atau dakwah Islam, Al-Ittihadiyah terus menerus menyelenggarakan sejumlah *tabligh*, ceramah-ceramah agama, dan mengislamkan komunitas yang belum beragama, khususnya di daerah Langkat Hulu, Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli. Kemudian dalam bidang pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah telah mendirikan sejumlah sekolah atau perguruan Islam dan menggabungkan sekolah atau perguruan-perguruan yang belum tergabung ke dalam satu organisasi Islam mana pun. Sedangkan dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak yatim, Al-Ittihadiyah berhasil membangun panti asuhan yang diberi nama Panti Majlis Anak Yatim Al-Ittihadiyah yang disingkat Mamiyai.

Dalam perjalanan historis berikutnya, Al-Ittihadiyah terus berusaha memperluas wilayah pengembangan organisasi, pengembangan pendidikan, dakwah, dan pemeliharaan anak yatim. Pada masa Orde Lama, Al-Ittihadiyah mulai mengembangkan organisasinya dengan membuka perwakilan di Jakarta dan membentuk pengurus wilayah di Bandung, Jawa

Barat. Mukhtar ke-12 al-Ittihadiyah bahkan dilangsungkan di Bandung.

Pada tahun 1960, dilaporkan bahwa Al-Ittihadiyah telah memiliki cabang, anak cabang, dan ranting sebanyak 155 buah. Jumlah ini di luar perwakilan Al-Ittihadiyah Jakarta dan wilayah Bandung. Kemudian di awal era Orde Baru, jumlah cabang, anak cabang, ranting, dan wilayah Al-Ittihadiyah tersebut meningkat menjadi 221 buah. Begitupun, harus diakui bahwa bila dibanding dengan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pengembangan al-Ittihadiyah ini belum berarti apa-apa, sebab hanya menyebar di wilayah Sumatera Utara.

Dalam lapangan pendidikan, sejak berdiri hingga masa Orde Baru, Al-Ittihadiyah telah berhasil membangun sejumlah sekolah, madrasah, dan satu perguruan tinggi. Ketika usia Al-Ittihadiyah mencapai ¼ abad, dilaporkan bahwa organisasi Islam ini telah memiliki 177 unit madrasah *Tahdjhizi*, *Ibtidai*, *Tsanawi*, dan *Qismu 'Aly*, 5 unit madrasah wajib belajar, 5 unit PGA, 21 unit Sekolah Rakyat, 3 unit SMP, dan 1 unit SMA. Jumlah tersebut terus meningkat dan pada awal masa Orde Baru, Al-Itthadiyah telah memiliki 231 unit madrasah *Ibtidai*, *Tsanawi*, dan *Qismu 'Aly*, , 7 unit PGA 6 tahun, 35 unit sekolah yang terdiri dari Sekolah Rakyat, SMP, SMA, dan sebuah perguruan tinggi yang berada di jalan gedung arca, dekat stadion Teladan, Medan. Secara rinci, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun Al-Ittihadiyah sejak orde lama sampai orde baru sebagaimana tertera pada tabel berikut:



Tabel 1: Jumlah Lembaga Pendidikan Al-Ittihadiyah Era Orde Lama sampai Orde Baru

No. Lembaga Pendidikan	Masa/Periode	
	Orde Lama	Orde Baru
1 Madrasah Tahdjizi, Ibtidai, Tsanawi, dan Qismu 'Ali	177	231
2 Madrasah Wajib Belajar	5	-
3 P. G. A	5	7
4 Sekolah Rakyat/Sekolah Dasar	21	35
5 Sekolah Menengah Pertama	3	6
Sekolah Menengah Atas	1	7
Perguruan Tinggi	-	1
Jumlah	212	274

Potensi kelembagaan yang besar tersebut sebenarnya memiliki peluang yang cukup prospektif dan fungsional bagi membina generasi muda dan merajut kebersamaan komunitas Muslim sebagai *ummah wahidah* sesuai cita dan harapan ketika pertama kali Al-Ittihadiyah didirikan. Namun, perkembangan akhir-akhir ini justru menunjukkan munculnya gejala yang sebaliknya. Dalam sejumlah kasus, ada upaya-upaya dari kalangan tertentu untuk merubah status kelembagaan institusi pendidikan, bahkan aset Al-Ittihadiyah menjadi properti pribadi. Sedang pada sisi lain, krisis kepemimpinan pendidikan yang visioner dan lemahnya manajemen kelembagaan menjadikan sekolah-sekolah Al-Ittihadiyah mengalami stagnasi sehingga kurang atau bahkan tidak berkembang.

Dalam lapangan dakwah dan syi'ar Islam, Al-Ittihadiyah

tidak saja senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dakwah melalui pelaksanaan ceramah, *tabligh*, dan berbagai pengajian agama, tetapi juga menyebarkan syi'ar Islam dengan mengislamkan para penduduk yang belum memeluk agama di berbagai daerah Sumatera Utara, seperti Tanah Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Tapanuli Utara, dan daerah lainnya.<sup>63</sup> Dari seluruh wilayah itu, Simalungun dan Karolanden menempati peringkat pertama dalam daftar usaha Al-Ittihadiyah sebagai daerah tempat berusaha untuk perluasan syi'ar dan propaganda Islam.<sup>64</sup> Prioritas untuk daerah-daerah tersebut berkaitan erat dengan kondisi daerah dimana masih banyak ditemui komunitas yang belum beragama (animisme). Disamping Majelis *Tabligh*, untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dakwah dan syi'ar Islam, Al-Ittihadiyah mendirikan asrama zending Islam. Pada awalnya, zending Islam ini bergiat dalam aktivitas pengislaman, tetapi dalam perkembangan berikutnya, zending Islam ini juga melakukan aktivitas ceramah dan *tabligh* ke penjara dan kampung-kampung. K.H. Muslich (Kepala Kantor Urusan Agama propinsi Sumatera Utara), Zainal Arifin Abbas (Kepala Kantor Penerangan Agama propinsi Sumatera Utara), dan K. H. Masjkur (Menteri Agama) merupakan tokoh alim ulama yang tercatat pernah menghadiri aktivitas yang dilaksanakan zending Islam Al-Ittihadiyah.<sup>65</sup>



## Catatan :

<sup>1</sup> Penjelasan lebih mendalam mengenai kebijakan netral pemerintah Belanda terhadap agama lihat H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985) dan Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980).

<sup>2</sup> Menurut Noer, Belanda memang memandang pelaksanaan pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Lihat *ibid.*, hlm. 25. Bahkan ketika Belanda melipatgandakan jumlah sekolah-sekolahnya dengan dalih realisasi politik Etis, hal itu sebenarnya untuk mengcounter meluasnya pengaruh yang datang dari institusi pendidikan Islam. Lihat Taufiq Abdullah, *Agama dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 217.

<sup>3</sup> Dalam konteks ini, Noer menyatakan bahwa sikap pemerintah Belanda terhadap kalangan tradisi (kaum tua) dibanding dengan sikapnya terhadap kalangan modern (kaum muda), lebih lunak, karena kalangan tradisi lebih banyak memperhatikan agama dalam arti sempit dan kurang atau tidak berwarna politik sama sekali. Politik pecah belah (*divide et impera*) Belanda memang menghendaki pilih kasih terhadap berbagai golongan. Belanda lebih menyukai kalangan tradisi karena mereka dianggap lebih bisa menerima *status quo*. Lihat Noer, *ibid.*, h. 336.

<sup>4</sup> Lihat Noer, *ibid.*, h. 323.

<sup>5</sup> H. Abu Bakar adalah salah seorang mantan ketua umum Pengurus Besar Al-Ittihadiyah yang telah terpilih menjadi ketua umum sejak kongres II Al-Ittihadiyah di Tebing tinggi pada tahun 1945. Beliau lahir di Tebing Tinggi Deli tahun 1915. Beliau merupakan salah seorang alumni madrasah Al-Ittihadiyah pimpinan tuan Sjech H. Abdul Malik Sukaradja dan pernah bermukim di Mekkah selama 4 tahun dan belajar pada madrasah Saulatiah. Pernah menjabat sebagai ketua III BKS ulama militer Daswati I Sumatera Utara, anggota Dewan Pimpinan Masjumi wilayah Sumatera Utara, dan anggota DPRD propinsi Sumatera Utara. Lihat Bachroem Azhar et. al., *Peringatan Ulang Tahun ¼ Abad Al-Ittihadiyah* (Medan: Panitia Bear Kongres ke X Al-Ittihadiyah, 1960), h. 66.

<sup>6</sup> H. Mahmud Abu Bakar, 'Al-Ittihadiyah ¼ Abad' dalam Bahcroem Azhar et. al., *ibid.*, h. 15.

<sup>7</sup> H. Mahmud Abu Bakar, 'Muktamar ke-XII Al-Ittihadiyah' dalam Muchlis Arsjad et. al., *Buku Muktamar Al-Ittihadiyah ke XII* (Bandung: Seksi publikasi Panitia Muktamar, 1968), h. 19.

<sup>8</sup> Lihat C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, 'Azas, toejoean, oesaha, dan organisatie Al Ittihadah' dalam *Conrerentie Jubileum 6 Tahoen 1935-1941 Al-Ittihadah* (ttp: C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah Ke 1, 11941), h. 16.

<sup>9</sup> C.V.O. Conferentie *ibid.*, h. 51.

<sup>10</sup> C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, *op. cit.*, h.16.

<sup>11</sup> Lihat C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, *op. cit.*, h. 16. Menurut Noer, sekitar tahun 1935, kedua kelompok tersebut mulai berseru pada perlunya persatuan, dengan mengemukakan perlunya toleransi serta tekanan bahwa mereka tergolong sama saudara, umat Muhammad. Banyak di antara keduanya yang mengadakan perjalanan propaganda bersama untuk kepentingan Islam dan sebagai cermin dari pendekatan bersatu yang mereka lakukan. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam*, *op. cit.*, h. 337.

<sup>12</sup> Sebagaimana dikutip dalam C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, *ibid.*, h. 31.

<sup>13</sup> Bdk. Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h. 49.

<sup>14</sup> Bachroem Azhar et. al., *op. cit.*, h. 16.

<sup>15</sup> C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, *ibid.*, h. 16.

<sup>16</sup> Lihat H. Mahmud Abu Bakar dalam Bachroem et. al., *op. cit.*, h. 16.

<sup>17</sup> Lihat Deliar Noer, *op. cit.*, h. 49.

<sup>18</sup> Bachroem et. al., *op. cit.*, h. 20.

<sup>19</sup> Noer, *Partai Islam*, *op. cit.*, h. 118.

<sup>20</sup> Bachroem et. al., *op. cit.*, h. 20.

<sup>21</sup> H. A. Fuad Said, *op. cit.*, h. 61.

<sup>22</sup> Lihat Conferentie Al-Ittihadiyah, *op. cit.*, h. 20.

<sup>23</sup> Conferentie Al-Ittihadiyah, *ibid.*, h. 64.



<sup>24</sup> Lihat K.H. Fuad Said, 'Sejarah Singkat Al-Ittihadiyah dan Sambutan yang Disampaikan dalam Acara Pembukaan Mukhtamar ke-XVI dan HUT ke-64' dalam *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP Al-Ittihadiyah, 1999), h. 58.

<sup>25</sup> Lihat kembali *Conferentie*, *op. cit.*, h. 17.

<sup>26</sup> Ibrahim Arsjad, 'Meninjau ke Pergoeroean Islam' dalam *Conferentie*, *ibid.*, h. 82.

<sup>27</sup> K. H. Sajuthi Noor, 'Dakwah dan Pendidikan Islam' dalam *Buku Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke XII* (Bandung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke13, 1968), h. 52-53.

<sup>28</sup> K. H. Sajuthi Noor, *ibid.*, h. 53.

<sup>29</sup> Fuad Said, *op. cit.* h. 58.

<sup>30</sup> CVO Conferentie, *op. cit.*, h. 21.

<sup>31</sup> Lihat Bachroem et. al., *op. cit.*, h. 18.

<sup>32</sup> Bachroem et. al., *ibid.*, h. 18.

<sup>33</sup> CVO Conferentie, *op. cit.*, h. 53.

<sup>34</sup> Lihat CVO Conferentie, *ibid.* h. 52.

<sup>35</sup> Lihat Mohd. Sjarief Pohan, 'Kepentingan Propaganda Islam' dalam CVO Conferentie, *ibid.*, h. 89.

<sup>36</sup> Lihat Bachroem Azhar et. al., *op. cit.*, hlm. 16 dan Muchlis Arsjad et. al., *p. cit.*, h. 20-21.

<sup>37</sup> Lihat Noer, Partai Islam .., *op. cit.*, h. 426.

<sup>38</sup> Lihat C.V.O. Conferentie, *op. cit.*, h. 72.

<sup>39</sup> Lihat C.V.O. Conferentie, *ibid.*, h. 27 dan Muchlis Arsjad et. al., *op. cit.*, h. 18.

<sup>40</sup> *Ibid.* Lihat juga Bachroem Azhar et. al., *op.cit.*, h. 15.

<sup>41</sup> Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP dan PP Muslimat Al-Ittihadiyah, 1999), h. 68.

<sup>42</sup> K.H.A. Fuad Said, 'Sejarah Singkat Al-Ittihadiyah dan Sambutan yang Disampaikan dalam Acara Pembukaan Mukhtamar ke-XVI dan HUT ke-64' dalam *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP Al-

Ittihadiyah, 1999), h. 56.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>44</sup> Lihat dalam C.V.O. Conferentie, *op. cit.*, h. 31.

<sup>45</sup> Lihat CVO Conferentie, *ibid.*, h. 28, Muchlis Arsjad et. al., *op. cit.*, h. 18, dan Fuad Said, *ibid.*, h. 56.

<sup>46</sup> Pada awal berdirinya, tidak ada seorangpun etnis Minang yang berada atau memasuki Al-Ittihadiyah. Hal ini disebabkan, orang Minang umumnya adalah para simpatisan dan anggota Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang berskala nasional dan telah lebih dahulu berkembang di kota Medan. Namun dalam perkembangan berikutnya, di cabang-cabang Al-Ittihadiyah, ternyata orang Minang juga memasuki Al-Ittihadiyah, meskipun tidak dalam jumlah yang besar.

<sup>47</sup> CVO Conferentie, *op. cit.*, h. 22.

<sup>48</sup> Bachroem Azhar, *op. cit.*, h. 16

<sup>49</sup> Muchlis Arsjad et. al., *op. cit.*, h. 20.

<sup>50</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h.53.

<sup>51</sup> Conferentie Al-Ittihadiyah, *ibid.*, h.55.

<sup>52</sup> Tidak diakomodasinya penguasa kesultanan Melayu, baik dalam Al-Jam'iyatul Washliyah maupun Muhammadiyah, dikarenakan bangsawan Melayu dipandang 'bersahabat' dengan pemerintah kolonial Belanda, bahkan dianggap sebagai 'antek-antek' Belanda. Persahabatan dan kerjasama tersebut bahkan terus berlangsung sampai agresi Belanda tahun 1946. Menurut Langenberg, bangsawan Melayu, sebagian besar raja-raja Simalungun, beberapa kepala suku Karo, dan kebanyakan tokoh-tokoh Cina merupakan aliansi anti republik Indonesia yang ikut mempersiapkan berdirinya Negara Sumatera Timur. Lihat dalam Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal kemerdekaan* (Jakarta: Grafiti, 1990), h. 139-140.

<sup>53</sup> Lihat Conferentie Al-Ittihadiyah, *op. cit.*, h.32-43.

<sup>54</sup> Lihat Bachroem Azhar, et. al., *op. cit.*, h. 46.

<sup>55</sup> Lihat Conferentie Al-Ittihadiyah, *op. cit.*, h. 32-43..

<sup>56</sup> Setelah terbit 10 nomor, akhirnya penerbitan majalah Bahtera dihentikan dikarenakan kekurangan dana. Lihat CVO



Conferentie, *ibid.*, h. 68.

<sup>57</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h. 32.

<sup>58</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h. 33.

<sup>59</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h. 33.

<sup>60</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h. 35.

<sup>61</sup> CVO Conferentie, *ibid.*, h. 42.

<sup>62</sup> Faqih Adam Said, 'Dari Ittihadul Wathaniyah ke Al-Ittihadiyah' dalam Bachroem Azhar et. al., *op. cit.*, h. 52-53.

<sup>63</sup> Lihat Bachroem Azhar et. al., *ibid.*, h. 19.

<sup>64</sup> C.V.O. Conferentie, *op. cit.*, h.19.

<sup>65</sup> Bachroem Azhar et. al., *op. ccit.*, h. 19.

## TENTANG PENULIS

1. Prof.Dr.Hj.Djanius Djamin, SH.MH.  
Rektor Universitas Negeri Medan Sumatera Utara
2. Prof.Dr.H. Syahrin Harahap, MA  
Guru Besar Pascasarjana IAIN Sumatera Utara
3. Prof Dr. Dede Rosyada, M.Pd  
Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta
4. Prof.Dr.Armai Arief, M.Pd  
Rektor III Universitas Islam Negeri Jakarta
5. H.M. Ali Umri, SH.,MKn  
Ketua Penasehat DPW Al-Ittihadiyah
6. Prof.Dr.Bedjo Sujanto M.Pd  
Rektor Universitas Negeri Jakarta
7. Drs. Anzizhan, MM  
Sekretaris Jenderal DPP Al-Ittihadiyah
8. Drs. Syafaruddin, M.Pd  
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN – SU
9. Dr. Al Rasyidin, M.Ag.  
Dosen Pascasarjana IAIN – SU









Bangsa Indonesia telah melalui masa-masa sulit dalam kehidupan berbangsa. Berbagai ujian dan cobaan silih berganti. Banyak bencana alam yang memperlambat gerakan pembangunan berkelanjutan. Bahkan berbagai kerusuhan sosial yang terjadi hampir merenggut persatuan dan kesatuan bangsa. Kini, tiba saatnya merubah cara pandang tentang ragam persoalan keumatan dan kebangsaan. Kita harus meretas kemiskinan, mengikis kebodohan, dan menyingkirkan keterbelakangan. Sebagai elemen bangsa, ormas Islam harus responsif dan pro aktif. Perlu digali berbagai nilai-nilai budaya bangsa untuk pembangunan yang memberdayakan. Semua kiprah diarahkan menuju perbaikan karakter bangsa. Bagi umat Islam, perlu reformulasi dakwah, pendidikan, politik dan budaya yang *rahmatan lil' alamin*.

Pemerintah perlu membuka peluang dan bermitra dengan ormas Islam dalam membangun. Karena itu, perlu dijalin kebersamaan, meskipun bangsa ini penuh keragaman dan perbedaan. Bersama membangun untuk kemajuan. Tanggung jawab pembentukan karakter bangsa adalah tanggung jawab bersama. Indonesia harus menjadi bangsa besar dan unggul. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Al-Ittihadiyah dalam rangkaian acara Takbir Akbar & Silaturahmi Nasional 2006 berupaya mengetengahkan kajian dakwah, pendidikan, keormasan dan kebangsaan. Tulisan para ahli ini diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan judul "*Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa*".

Solusi permasalahan kebangsaan diulas dan dibahas secara tuntas. Permasalahan manajemen pendidikan yang mengakar pada budaya pesantren perlu dijadikan model, revitalisasi wawasan kebangsaan di lorong global dan otonomi daerah menjadi tawaran, visi baru ormas Islam menuju keunggulan perlu dicermati, pendidikan berbasis ukhuwah akan memperkuat persatuan, dan reformulasi pendidikan agama dalam membangun karakter bangsa akan menjaga kemajuan. *Insya Allah!*



Penerbit  
**HIJRI PUSTAKA UTAMA**

ISBN 979-25-9554-6



9 789792 595543